

# MOESLIM CHOICE

● EDISI 34/ OKTOBER 2020  
● MOESLIMCHOICE.COM

● MOESLIMCHOICE.TV



## MUDHARAT PILKADA 2020

**MUALAF: DISEKAP  
TALIBAN, JURNALIS  
INGGRIS PUN  
MEMELUK ISLAM**

**SOSIALISASI  
MERGER BANK  
SYARIAH KIAN  
GENCAR**

**HERMAN DERU  
HARAPKAN "FOKKUS"  
FOKUS SYIARKAN  
ISLAM**

**PERTENTANGAN  
PALSU ANTARA  
KESEHATAN DAN  
EKONOMI**

ISSN 2614-2783



Rp 50.000

**15**  
TIPS PADU PADAN  
HIJAB ALA  
KOREAN STYLE





"Mutual Empowerment in Accelerating  
Sharia Economic Growth through Promoting  
Halal Industries for Global Prosperity"

# Virtual Fashion Show MODEST FASHION ISEF 2020

"Sustainable Fashion, Sustainable Lifestyle"

**28 - 31**  
OCTOBER 2020

720 Looks of Indonesia Modest and  
Muslim Wear From 164 Designers/Brands

Ready To Wear

Muslim Syar'i

Accessories

Traditional Textille

EVERYDAY

16.00 - 17.00 | 18.30 - 19.30 | 20.00 - 21.00

at ISEF Indonesia @isef.id ISEF Indonesia



WWW.ISEF.CO.ID



**PENANGGUNG JAWAB**

Usman Rizal

**DIREKTUR**

M. Kamel Fahresy SH

**PEMIMPIN PERUSAHAAN**

Zulfahmi Jamba

**PEMIMPIN REDAKSI**

Gunawan Effendi

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Hj Nur Khamidah

**REDAKTUR TRAVEL  
BUSINESS DEVELOPMENT**

Hj Elis Sukma Mawarni SSos MSI

**REDAKTUR KHUSUS  
DEVELOPMENT BUSINESS**Siswo Hadi Setiyono, SE, MM,  
Syahrul Ramadhan Siregar**REDAKTUR**Agung Mariyana, Yuki Rusdiah,  
Agus Jauhari, Endang Purwanti,  
Iwan Setiawan, Andianto**KEPALA BIRO SUMSEL**

Rahmat Romli

**REPORTER**Mega Puspita, Muhammad  
Fahresy, Widodo Bogiarto,  
Abdul Muktar, Sudjatmiko, Rio  
Hasan Sumantri, Raden Solihin, Ida  
Indiyani, Adhes Satria, Syauqi,  
M. Iqbal, Ilham Akbar,  
Sunarya Sultan**FOTOGRAFER**

Al Amin

**ART DESIGN CONSULTANT**

Fonda Lapod

**TATA LETAK**

Kosasih Chiko

**SEKRETARIS REDAKSI**

Niken Rizky Aprillandani

**KEUANGAN DAN ADMINISTRASI**

Susni Herawati

**DIVISI PENGEMBANGAN IT**

Wahyu, Irvan, Firman

**PENGEMBANGAN BISNIS**

Hadi Setyo, Ida Iryani

**DISTRIBUSI**

Itang Abdul Muhtar, M. Isro, Mulyadi

**PERCETAKAN**PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI  
ALAMAT : JL.KALIBARU TIMUR V/39F  
BUNGUR SENEN JAKARTA PUSAT

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## &gt;&gt;SALAM REDAKSI

## PILKADA 2020

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**S**alah satu keutamaan umat manusia adalah daya ingatnya yang paling lama dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Karunia itu bertambah pula dengan kemampuan dasar lainnya: membaca, menulis, berhitung, berbicara, dan mendengarkan, sehingga memungkinkannya membuat ingatan yang mudah hilang menjadi lebih lama bertahan dalam bentuk basis data.

Demikianlah, peradaban manusia saat ini idealnya akan lebih banyak memiliki basis data untuk mengatasi masalah semisal wabah Covid-19. Virus corona sumber Covid-19 mungkin memang baru muncul belakangan. Namun, fenomena wabah di kalangan umat manusia bukanlah sesuatu yang baru.

Catatan terlama tentang wabah setidaknya pernah terjadi pada masa sekitar 1.200 tahun sebelum masehi. Wabah selesma, flu, atau influenza kala itu meliputi Babilonia, Mesopotamia, Asia Tengah, hingga Asia Selatan. Lantas kita mengenal wabah pes atau sampar (*plague*), cacar (*smallpox*), demam kuning (*yellow fever*), kolera, demam berdarah, dan aneka rupa wabah hingga akhirnya mengenal virus corona penyebab Covid-19.

Dari berbagai catatan itu, pada umumnya, cara konvensional untuk menghadapinya adalah menemukan yang tertular dan mengisolasinya agar tak menular ke lebih banyak manusia lainnya. Dengan perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi, upaya mengatasi wabah dapat berawal dari pelacakan yang tertular melalui pengujian laboratorium. Lanjut menemukan vaksin dan obat-obatan demi menangkal serta mengatasi dampak negatifnya. Cara konvensional atau yang sudah menjadi kesepakatan umum itu dirumuskan dengan istilah 3-T, *test* (menguji), *trace* (melacak), dan *treatment* (menangani).

Nah, penerapan 3-T di Indonesia kerap menjadi bahan kritikan karena catatannya kurang memuaskan berdasarkan tolok-ukur yang menjadi standard bersama di tingkat dunia. Patokannya adalah tolok-ukur badan kesehatan dunia, World Health Organization.

Beriring kritikan-kritikan terhadap penerapan 3-T di Indonesia yang seakan tiada henti, kita juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Tak kurang dari 100 juta pemilih memiliki hak untuk menentukan kepala daerah masing-masing sesuai dengan wilayahnya.

Dengan begitu banyak jumlah pemilih yang terlibat di dalamnya; sekitar empat kali lipat jumlah penduduk Australia, atau sekitar 20 kali lipat penduduk Singapura. Maka muncul kekhawatiran wabah akan kian bergelora menjelang dan pasca Pilkada serentak 2020. Tak dapatkah kita menyelaraskan 3-T dengan Pilkada berdasarkan keutamaan umat manusia dan kemampuan dasarnya? ♦

## &gt;&gt;COVER EDISI INI



www.moeslimchoice.com

**ALAMAT REDAKSI/IKLAN**PT. Inter Media Digital  
Jalan Raya Kalibata No.  
8, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12750  
Telepon : (021) 791 96781  
FAX : (021) 791 96786**EMAIL :**

moeslimchoice@gmail.com

**FACEBOOK :**

moeslimchoice

**TWITTER :**

@moeslimchoice

**YOU TUBE CHANNEL:**

moeslimchoice TV

# >> DAFTAR ISI



06

## LAPORAN UTAMA

Dua organisasi kemasyarakatan terbesar yang menaungi umat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meminta rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 ditunda. Tak ketinggalan Gabungan Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212. Semua ingin umat selamat.

22

## COVER STORY

Tampilnya anak dan menantu Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilkada serentak 2020 yang beriringan dengan wabah Covid-19 mengundang tanggapan negatif maupun positif.



26

## LAPORAN KHUSUS

Tinggal tiga tahap penting lagi saja yang tersisa dari proses Pilkada serentak 2020. Pertama, masa kampanye 26 September-5 Desember 2020. Lantas pemugutan suara, Rabu, 9 Desember 2020.



36

## EKONOMI SYARIAH

Rencana merger bank bank syariah di lingkup Himpunan Bank Negara (Himbara) terjadwal tuntas pada Februari 2021. Sosialisasi makin gencar dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



50

## FASHION

Dengan perkembangannya yang luar biasa, Korea saat ini tak hanya menjadi tren di dunia kecantikan, namun juga telah menjadi salah satu kiblat fashion dunia, terutama di Asia.





# 56

## SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Keberadaan ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ustadz dan Ustadzah (FOKKUS) Sumsel diharapkan dapat memperluas syiar dan dakwah Islam di tengah masyarakat, mengingat tugasnya yang sangat multifungsi.



# 72

## BIROKRASI

Program wisata Covid-19 Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan dinilai lebih hemat dan efektif. Keberhasilan program ini diakui oleh nasional. Bahkan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta DKI Jakarta dan Provinsi lainnya mengikuti program Covid-19 Sulsel.

---

## REGULER

---

- 3 | DARI REDAKSI
- 20 | OPINI 1
- 40 | ADVERTORIAL
- 46 | MUALAF
- 54 | KOLOM 1
- 68 | KOLOM 2
- 80 | KESEHATAN
- 82 | KAJIAN 1
- 86 | KAJIAN 2
- 90 | RESENSI
- 92 | DUNIA ISLAM
- 96 | KAJIAN 3
- 98 | INPIRASI

# 84

## ISLAMICTAINMENT

Pesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 menjadi isu yang hangat dan menjadi perbincangan masyarakat sejak beberapa bulan terakhir ini.





Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir

# AGAR UMAT SELAMAT

Dua organisasi kemasyarakatan terbesar yang menaungi umat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meminta rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 ditunda. Tak ketinggalan Gabungan Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212. Semua ingin umat selamat.

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19,” tulis PP Muhammadiyah dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada Senin, 21 September 2020.

Siaran pers itu juga dibacakan langsung

melalui tayangan virtual oleh Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. “KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” ungkapnya.

PP Muhammadiyah mengimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan instansi terkait untuk

meninjau kembali jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 dan kampanye yang melibatkan massa. Menurut Mu'ti, di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa, serta menjamin pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, maka KPU dan pihak terkait harus mempertimbangkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada.

Pandemi Covid-19, lanjutnya, juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang

## EKSKLUSIF !!!! ALASAN KH.SAID AQIL SIROJ USULKAN PILKADA 2020 DITUNDA!!!!



Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj

sangat serius. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19. "Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19," kata Mu'ti.

Meski demikian, lanjut Mu'ti, kerja dan kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh jajaran belum menunjukkan hasil maksimal. Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. "Lemahnya koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik yang trivial dan kontraproduktif," ujarnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta KPU, Pemerintah, dan DPR RI menunda Pilkada serentak 2020 untuk memutus penyebaran Covid-19 demi kesehatan masyarakat.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," kata Ke-

tua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj dalam pernyataan pers PBNU yang ditandatangani oleh ketua umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan sekretaris jenderal KH Helmy Faishal Zaini, Minggu 20 September 2020.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendesak pemerintah agar menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini disebabkan karena penyebaran virus Corona atau Covid-19 hingga saat ini makin meluas. Melalui siaran persnya, PBNU menyampaikan bahwa, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi.

Terlebih, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda terkendali, justru sebaliknya. "Karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan," sambung pernyataan pers PBNU.

Selain itu, NU perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek, Cirebon, perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudarat, berupa politik uang dan biaya tinggi. Pernyataan sikap ini mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19.

Toh menurut PBNU, fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, di tingkat

pusat maupun daerah, serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit Covid-19, cukup sebagai alasan pemerintah untuk menunda pilkada. Oleh sebab itu rekomendasi untuk menunda Pilkada dinilai masuk akal.

Tak ketinggalan, gabungan ormas Front Pembela Islam (FPI), bersama GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda atau diundur hingga pandemi ini usai. Permintaan ini mengacu pada arahan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, lewat surat maklumat berjudul 'Hentikan Pilkada Maut' ditanda tangani Ketua FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua GNPF-U Yusuf M Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif.

Dalam maklumat itu disebutkan, Pilkada 2020 di tengah pandemi corona merupakan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan kluster penularan virus corona. Sehingga keselamatan masyarakat lebih utama dari urusan lain.

"Mengikuti arahan dan masukan dari Imam Besar HRS tentang pentingnya nilai kemanusiaan yaitu penyelamatan jiwa rakyat sebagai prioritas utama dibandingkan dengan politik dan ekonomi," ungkap pernyataan tertanggal 23 September 2020 itu.

Banyak sudah yang bersuara. Semua ingin umat selamat... ♦

# SELAIN ULAMA, BANYAK YANG INGIN PENANGGUHAN PILKADA

Menjelang masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mulai 26 September, keinginan menangguhkan Pilkada semakin mengemuka. Semuanya dengan alasan kesehatan dan kemanusiaan.

Faktanya, penanganan wabah Covid-19 dengan metode peningkatan uji penularan (*test*), pelacakan (*trace*), dan isolasi serta pencegahan kematian (*treat*) masih

menjadi yang terbaik dalam menekan angka penularan dan korban. Namun muncul keprihatinan bahwa Indonesia belum optimal menerapkan metode itu. Itu latar belakang banyaknya pihak yang menginginkan penangguhan Pilkada 2020 yang memasuki masa kampanye kali ini.

Terlebih menjelang masa kampanye Pilkada antara 26 September-5 Desember 2020 sebelum pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Tak urang dari Wakil Presiden (2004-2009 dan 2015-2019) HM Jusuf Kalla yang biasa disebut Pak JK menyuarakan agar pemerintah menang-



guhkan Pilkada. “Kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut,” ungkap Pak JK yang berbicara di berbagai format media.

Awalnya, soal keprihatinan penanganan Covid-19 antara lain muncul dari Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma’arif, yang juga seorang sejarawan. Tokoh yang biasa disebut Buya Syafii Ma’arif ini mengaku sangat prihatin terhadap kondisi yang terjadi.

“Sebagai salah seorang yang tertua di negeri ini, batin saya menjerit dan goncang membaca berita kematian para dokter yang sudah berada pada angka 115 pagi ini plus tenaga medis yang juga wafat dalam jumlah besar pula,” ungkap Buya Syafii ini melalui akun Twitter-nya, @SerambiBuya, Minggu, 13 September 2020.

Menurut dia, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena para dokter berada di garis terdepan dalam tugas kemanusiaan



*Nah, sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Perppu Corona menjadi UU, ternyata pemerintah sudah menyiapkan aturan penunjang yang merupakan turunan langsungnya. Inilah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 11 Mei 2020, sehari sebelum pengesahan Perppu Corona menjadi UU No 2 Tahun 2020.*

dalam penanganan Covid-19. Bahkan, jika hal ini terus berlanjut, negara Indonesia bisa oleng. “Jika begini terus, bangsa ini bisa oleg karena kematian para dokter saban hari dalam tugas kemanusiaan di garis paling depan,” kicau pendiri lembaga kajian Ma’arif Institute itu.

Jadi, Buya Syafii meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Kesehatan dan jajarannya untuk berusaha semaksimal mungkin menolong nyawa para dokter ini. “Terima kasih Pak Presiden. Ahmad Syafii Maarif,” tandasnya.

Nah, dari kondisi di lapangan yang menunjukkan semakin banyak tenaga medis menjadi korban wabah Covid-19, sangat wajar jika Pilkada serentak 2020 menimbulkan kekhawatiran wabah penyakit yang disebabkan virus corona itu akan semakin merajalela. Malah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terang-terangan merekomendasikan agar Pilkada 2020 ditunda.

Komnas HAM menilai ancaman penularan virus Corona saat Pilkada berpotensi terjadinya pelanggaran hak orang lain. “Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 bahkan jauh dari kata berakhir saat ini maka Penundaan Tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat, selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran Covid-19 semakin nyata, dari segi hak asasi manusia hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak antara lain,” kata Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM, Hairansyah, Jumat, 11 September 2020.

Maka Komnas HAM menegaskan, berdasarkan data nasional, penularan virus Corona masih terus terjadi. Mereka menilai tahapan pilkada berpotensi menjadi tempat penularan Corona. “Selanjutnya memasuki tahapan yang paling krusial yaitu penetapan calon yang diikuti deklarasi calon Pilkada damai, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih yang akan melibatkan massa yang banyak, sedangkan pada sisi lain kondisi penyebaran Covid-19 belum dapat dikendalikan dan mengalami trend yang terus meningkat terutama di hampir semua wilayah penyelenggara Pilkada,” kata Hairansyah.

Dalam hal ini Komnas HAM memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Antara lain, Komnas HAM meminta agar Pilkada 2020 ditunda hingga Corona bisa dikendalikan. “Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada; KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada



lanjutan sampai situasi kondisi penyebaran Covid-19 berakhir atau minimal mampu dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang dipercaya," ujarnya.

Lebih dari itu, Pak JK menilai tak ada urgensi bahwa Pilkada Serentak 2020 harus segera diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Ia mengatakan Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga pelaksanaannya perlu ditunda.

"Kita ingin rakyat agar menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Pak JK.

Namun, sambungnya, jika dalam

**MC** Maka JK menilai pemerintah harus memilih, antara demokrasi dan kesehatan terkait penundaan dan kelanjutan pelaksanaan Pilkada 2020. "Jadi sekarang menjadi pilihan kesehatan apa demokrasi? Atau kesehatan warga arau Pilkada. Mana yang kita pilih, saya kira tujuannya kesehatan masyarakat," ujar JK.

calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, dan proses penghitungan suara. "Semua calon akan berpotensi melanggar protokol demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau bukan calonnya yang menggunakan berbagai kiat untuk itu, maka para pendukung yang melakukannya (melanggar protokol kesehatan)," kata dia.

"Setelah itu hari pencoblosan di mana kerumunan tidak bisa dihindari sebab para pemilih harus berjejer, antre, menunggu giliran mencoblos," lanjutnya. Dengan alasan itulah Kalla mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid-19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.

Ia menilai Pilkada bahkan bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu ki-



proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, "Buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut."

Ia mengungkapkan, pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah sudah banyak tercipta kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid-19. Hal itu semakin parah dengan terpaparnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat daerah hingga nasional.

Pak JK memprediksi penularan Covid-19 akan semakin masif pada tahapan Pilkada berikutnya seperti penetapan

nerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah. "Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mullianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat," lanjut JK.

Ia merasa khawatir pelaksanaan kampanye dengan jumlah orang yang dibatasi tidak boleh lebih dari 50 tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. "Kalau memang sulit, dan kelihatannya susah untuk mencegah pengumpulan orang hanya 50, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka manfaat kepada

masyarakat, bisa ditunda," kata dia.

Pandangan Pak JK juga terkait dengan prediksi penyebaran Covid-19 yang melambat, dari semula diperkirakan September 2020 atau enam bulan setelah pasien pertama ditemukan. Namun, belakangan wabah Covid-19 ini diprediksi baru akan mencapai puncak pada Desember mendatang atau bertepatan pada momen pemungutan suara Pilkada serentak 2020. Juga perkiraan penemuan vaksin yang masih memakan waktu hitungan bulan atau tahun.

"Kalau kita buka vaksin barulah covid ini menurun. Dan banyak, perkiraan vaksin itu sudah mulai akan divaksinasi mulai Februari-Maret. Jadi kalau sudah berlangsung itu covid menurun," ujarnya

la menilai, penundaan Pilkada juga tidak berpengaruh signifikan pada proses peralihan kepala daerah. Menurutnya, para kepala daerah di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada baru akan habis masa jabatan pada 2021 mendatang.

Sedangkan para kepala daerah yang habis masa jabatan, kata Pak JK, bisa diganti dengan pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt), dan situasi itu tak menimbulkan perubahan signifikan pada pemerintahan.

"Kalau pun sudah melewati masa jabatannya itu kan ada pejabat sementara yang dapat menangani hal tersebut. Jadi ini biasa saja," ucap mantan presiden pendamping Jokowi di periode pertama itu.

JK mengaku khawatir, pelaksanaan Pilkada pada Desember justru akan memicu potensi penyebaran virus yang lebih besar. Pada tahap pendaftaran pada 4-6 September lalu, pemerintah tak bisa mengontrol kerumunan massa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, JK mengaku cemas kondisi serupa terulang di masa kampanye dan pencoblosan nanti. Menurut dia, hingga kini tak ada jaminan aturan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, bisa diterapkan di sejumlah tahapan Pilkada berikutnya.

"Walaupun dibatasi 100 orang siapa yang bisa menjamin. Pencoblosan kan enam jam, kira-kira 300-400 orang, tentu sulit untuk membatasi itu. Perhitungannya sore-sore, saksi-saksi ingin mengetahui itu diatasi, tapi tentu juga punya risiko," terang JK.

Pemerintah dalam hal ini mestinya dapat mengambil pilihan. Kendati Pilkada memang menggerakkan sektor ekonomi, namun di sisi lain pemerintah juga akan terus mengalokasikan anggaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi.

Maka JK menilai pemerintah harus memilih, antara demokrasi dan kesehatan

terkait penundaan dan kelanjutan pelaksanaan Pilkada 2020. "Jadi sekarang menjadi pilihan kesehatan apa demokrasi? Atau kesehatan warga atau Pilkada. Mana yang kita pilih, saya kira tujuannya kesehatan masyarakat," ujar JK.

Sementara aspirasi menunda Pilkada beriring dengan tahapan proses yang terus berjalan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 60 orang bakal pasangan calon yang positif terinfeksi Covid-19. Malah proses tahapan menuju Pilkada itu juga membuat personel penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, ikut terpapar.

Arief Budiman, Ketua KPU sebagai penyelenggara Pilkada 2020, juga terinfeksi Covid-19, dan saat ini menjalani karantina dan akhirnya masuk rumah sakit



**MC** *Jadi, Buya Syafii meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Kesehatan dan jajarannya untuk berusaha semaksimal mungkin menolong nyawa para dokter ini. "Terima kasih Pak Presiden. Ahmad Syafii Maarif," tandasnya.*

Arief menjalani tes usap (swab test) pada tanggal 17 September, sebagai syarat untuk mengikuti rapat yang membahas persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Istana Bogor, yang direncanakan berlangsung pada 18 September.

Arief akhirnya digantikan anggota KPU lainnya. Sementara seluruh kantor KPU ditutup hingga 22 September untuk didisinfeksi. Selain Arief Budiman, sebelumnya dua komisioner KPU lainnya, yaitu Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubaid Tanthowi, juga tertular Covid-19.

Begitu sulitkah menunda Pilkada serentak 2020? Pemerintah, penyelenggaranya, yang paling pantas menjawab. Wallahu a'lam bishshawab. ♦



Menko Polhukam Mahfud MD

## Tetap 9 Desember

# INILAH HUJDAH PEMERINTAH

Pilkada serentak 2020 sebenarnya sudah mengalami penundaan jadwal. Semula pemungutan suara terjadwal 23 September 2020 dan mundur menjadi 9 Desember 2020 dengan alasan wabah Covid-19. Pemerintah bergeming tak mundur lagi dari tanggal itu.

pemungutan suara Pilkada serentak 2020 tetap berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2020.

"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan Rapat Kerja itu di Kompleks Parlemen, Senayan.

Malah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum berakhir. Juru Bicara Kepresidenan Fadjoel Rachman mengemukakankannya melalui pernyataan resmi pada

Tanda-tanda jadwal pemungutan suara pada 9 Desember 2020 tak ada perubahan sudah tegas dalam putusan Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin, 21 September 2019. Rapat sepakat



hari yang sama saat Rapat Kerja Komisi II DPR berlangsung pada Senin, 21 September itu.

Fadjoel menegaskan sikap Presiden bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. "Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata dia.

Toh Fadjoel meminta masyarakat untuk tetap bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

"Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," kata Fadjoel.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sikap Presiden Jokowi itu juga diambil setelah mendengarkan

**MC** *Presiden berpendapat, kata Mahfud, pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan, dan pendapat Presiden ini sudah disalurkan ke Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya yang juga dilakukan kemarin. "Jadi pembicaraan sudah mendalam," ungkap Mahfud.*

masukan dari PBNU dan Muhammadiyah, yang meminta agar pelaksanaan pilkada ditunda terlebih dahulu. "Presiden telah mendengarkan dan mempertimbangkan usul-usul dari masyarakat," kata Mahfud MD dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2020 yang disiarkan dalam saluran YouTube Kemenko Polhukam, Selasa, 22 September 2020.

Menurut dia, semua masukan dari berbagai pihak didengar. "Yang ingin menunda, yang ingin melanjutkan; Dari ormas-ormas besar, seperti dari NU, dari Muhammadiyah, pun pendapat yang berbeda, semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan hal ini secara khusus untuk membicarakannya," ujarnya.

Presiden berpendapat, kata Mahfud, pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan, dan pendapat Presiden ini sudah disalurkan ke Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya yang juga dilakukan kemarin. "Jadi pembicaraan sudah mendalam," ungkap Mahfud.

Ia juga mengungkapkan beberapa alasan yang disampaikan Presiden Jokowi mengapa tetap memutuskan agar Pilkada 2020 jalan terus di tengah pandemi Corona. Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam suatu agenda yang telah diatur dalam UU dan berbagai aturan perundang-undangan.

"Jika pilkada ditunda, misal, sampai selesai Covid-19, bencana non-alam Covid-19, itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir. Di negara-negara yang serangan Covid-19 lebih besar, seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara sudah berlangsung pemilu, tidak ditunda," ucap Mahfud menjelaskan alasan kedua.

Alasan ketiga yang disampaikan Jokowi adalah pemerintah tidak ingin terjadinya kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) pada 270 daerah dalam waktu bersamaan karena ditundanya pilkada. Mahfud mengingatkan plt tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

"Sedangkan situasi sekarang Covid-19 kebijakan-kebijakan strategis yang implikasi pada penggerak birokrasi dan sumber daya lain, seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Oleh sebab itu, akan kurang menguntungkan bagi proses pemilihan kita jika 270 daerah itu dilakukan plt tanpa waktu yang jelas,"

sambungannya.

Mahfud lalu menyebut alasan berikutnya. Ia mengingatkan, Pilkada 2020 sebenarnya pernah dilakukan penundaan sekali hingga akhirnya diputuskan pada 9 Desember, dari yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September.

"Oleh sebab itu, penundaan sudah pernah dilaksanakan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan itu. Yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi atas masififikasi penularan Covid-19 seperti dikhawatirkan baik

resmi, Kamis, 28 Mei 2020.

Pemungutan suara yang bergeser menjadi 9 Desember 2020 tersebut berkonsekuensi pada tahapan Pilkada yang juga berubah menjadi 15 Juni 2020. Meski demikian, hal tersebut harus dijamin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak mengganggu keselamatan, kesehatan, dan proses demokrasi yang berjalan di 270 daerah.

"Protokol kesehatan dan koordinasi dengan Gugus Tugas tetap harus dijalankan, sehingga pada saat dimulainya



#### Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

oleh pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok atau masyarakat yang menginginkan ditunda," kata Mahfud.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sudah menyepakati penundaan jadwal Pilkada. Yang paling penting antaranya adalah menggeser hari pemungutan suara dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan melalui video conference pada Rabu, 27 Mei 2020.

"Kesepakatan pemungutan suara pada 9 Desember [2020] tentu diambil berdasarkan pertimbangan dari Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, dan juga atas saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pernyataan



*Pemungutan suara yang bergeser menjadi 9 Desember 2020 tersebut berkonsekuensi pada tahapan Pilkada yang juga berubah menjadi 15 Juni 2020. Meski demikian, hal tersebut harus dijamin dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak mengganggu keselamatan, kesehatan, dan proses demokrasi yang berjalan di 270 daerah.*

kembali tahapan pada 15 Juni nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan," kata Tito.

Sedangkan poin kesepakatan rapat antara Mendagri bersama Komisi II DPR RI dan Penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari tiga poin. Pertama, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor B196/KA GUGAS/PD 01 02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI.

Nah, pada September 2020, sekitar empat bulan setelah kesepakatan pergeseran jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, pemerintah dan DPR tak lagi mengubah jadwal tahapannya. Namun, DPR meminta KPU segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, revisi PKPU penting untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan mencegah pelanggaran protokol kesehatan. "Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10/2020 tentang Perubahan atas PKPY Nomor 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana nonalam," kata Doli.

Dia menerangkan, revisi PKPU harus menekankan pada enam poin. Pertama, melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan kerumunan, seperti rapat umum, konser, dan arak-arakan.

Kedua, mendorong kampanye melalui daring. Ketiga, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Keempat, Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai Pasal 69 huruf e dan j dan 187 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018 ten-



*Dia menerangkan, revisi PKPU harus menekankan pada enam poin.*

*Pertama, melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan kerumunan, seperti rapat umum, konser, dan arak-arakan.*

tang Kekarantinaan Kesehatan, serta Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218 KUHP bagi yang melanggar.

Kelima, pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Terakhir, pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui rekap secara elektronik.

Dia menambahkan, Komisi II DPR juga meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan Agung, serta Polri diintensifkan.



**Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia**

Terutama, dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, mulai dari penetapan pasangan calon, penyelesaian sengketa calon, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil

Komisi II DPR, menurutnya, juga meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 untuk mengantisipasi munculnya kluster baru Covid-19.

Simpulannya, semua menyadari tetap ada risiko peningkatan wabah Covid-19 seiring tahapan Pilkada serentak 2020. Permasalahan utama adalah mitigasinya, upaya menghindari dampak dan risikonya. ♦



Pelanggaran masa pendaftaran Pilkada

## MARI BICARA UPAYA MITIGASI

**Seiring kesepakatan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan tahapan Pilkada hingga hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020, prosesnya pun berlangsung sesuai dengan rencana. Persoalan berikutnya adalah upaya mitigasi.**

Tanda-tanda ancaman Covid-19 dalam Pilkada serentak 2020 sudah terlihat sejak pemerintah belum memutuskan kelanjutannya. Sejumlah calon kepala daerah dan wakilnya ternyata teridentifikasi positif Covid-19. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman juga telah mengakuinya.

"Data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan sampai dengan hari ini jumlahnya mencapai 60 calon dinyatakan positif Covid-19," kata Arief dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Malah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang berlangsung selama 4-6 September 2020.

Saat proses pendaftaran, bapaslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dan berpotensi menyebarkan virus corona. Sedangkan KPU telah melakukan



evaluasi dan perbaikan terkait kejadian tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tahapan pilkada selanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri dan Bawaslu untuk tegas mengawasi dan menindak pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran virus corona dan munculnya klaster pilkada.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pelaksanaan pendaftaran bapaslون abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bapaslون secara ramai-ramai konvoi ke KPU untuk mendaftar. Manajemen resiko belum maksimal disiapkan. Kami khawatir jika terus berlangsung akan berpotensi memunculkan klaster baru," kata Heroik M Pratama, peneliti Perludem, Rabu, 9 September 2020.

**MC** *Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pelaksanaan pendaftaran bapaslون abai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bapaslون secara ramai-ramai konvoi ke KPU untuk mendaftar. Manajemen resiko belum maksimal disiapkan. Kami khawatir jika terus berlangsung akan berpotensi memunculkan klaster baru," kata Heroik M Pratama, peneliti Perludem, Rabu, 9 September 2020.*

Maka Heroik meminta kepada pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi total pelaksanaan seluruh tahapan pilkada ke depan. "Jika tidak dapat memastikan protokol kesehatan dipenuhi secara ketat, tidak ada kata lain yaitu menunda tahapan pilkada dan kemudian melakukan evaluasi dan identifikasi ulang protokol kesehatan sampai ada prosedur ketat," kata Heroik.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebut, proses pendaftaran merupakan suatu ironi karena seharusnya dapat diantisipasi jika ada persiapan yang matang dalam mencegah kerumunan.

"Potensi pelanggaran dilakukan terang benderang, terjadi kerumunan dan arak-arakan massa. Seharusnya mitigasi persoalan tiap tahapan sudah direncanakan secara detail, namun kenyataannya tidak,"

kata Aditya.

Aditya menjelaskan, dalam situasi normal saja pelaksanaan pilkada sudah dapat dipastikan akan banyak menimbulkan masalah, apalagi dilakukan di tengah wabah virus corona yang kesulitannya berkali-kali lipat. "Pengalaman itu membuka mata bahwa KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan pemerintah kelabakan, dan gagap menghadapi situasi. Bahkan saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan. Mustinya sense of crisis-nya kuat bahwa ini tidak main-main," tambah Aditya.

Ia menjelaskan, tahap pendaftaran hanyalah awal dari potensi besar pelanggaran protokol kesehatan di depan mata yang muncul jika pilkada tetap dilaksanakan



**Kastorius Sinaga**

namun evaluasi tidak dilakukan. "Yang paling krusial paling dekat adalah penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, saya yakin pengumpulan massa akan terjadi. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, teknisnya bagaimana, kita berjalan dalam situasi gelap," katanya.

Toh segenap penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di 270 lokasi meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, tetap melanjutkan prosesnya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap 733 bapaslon yang diterima pendaftarannya, di mana 294 paslon adalah petahana.

Memang, KPU mewajibkan setiap bapaslon Pilkada Serentak 2020 menjalani tes PCR sebelum mendaftar. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 mewajibkan para bapaslon menyerahkan hasil tes tersebut saat pen-

MC

*Sedangkan penetapan pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 berlangsung pada Rabu, 23 September 2020 melalui rapat pleno di tiap-tiap KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara Pilkada. Di tingkat pusat, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang merupakan komisioner terbaru berbicara lantaran tiga yang lama sudah terkonfirmasi positif Covid-19 pula.*

daftar. PKPU itu melarang kandidat yang positif Covid-19 langsung melanjutkan ke tahap berikutnya. Kandidat itu diwajibkan menjalani penanganan Covid-19 hingga dinyatakan negatif. Setelah negatif, kandidat tersebut baru diperbolehkan melanjutkan tahap pendaftaran.

Sedangkan penetapan pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 berlangsung pada Rabu, 23 September 2020 melalui rapat pleno di tiap-tiap KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara Pilkada. Di tingkat pusat, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang merupakan komisioner terbaru berbicara lantaran tiga yang lama sudah terkonfirmasi positif Covid-19 pula.

"Pengumuman dilaksanakan oleh masing-masing KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada," kata Raka, Rabu, 22 September 2020.

Raka menjelaskan, mekanisme penetapan paslon digelar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan. Pasal 68 PKPU itu menyebutkan, penetapan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota.

Hasil verifikasi paslon kemudian ditunjukkan dalam berita acara penetapan paslon. Kemudian, berdasarkan berita acara tersebut, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan paslon melalui Keputusan KPU.

Selanjutnya, hasil dari penetapan paslon itu diumumkan di papan pengumuman dan/atau di laman KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota. "Selain diumumkan di papan pengumuman juga di laman KPU masing-masing," tutur Raka.

Raka mengatakan, penetapan tak akan dihadiri oleh pasangan calon kepala daerah. Oleh sebab itu, ia memastikan tak akan ada kerumunan massa.

Toh Raka tetap mengimbau agar seluruh pihak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama tahapan berlangsung. "KPU telah bersurat ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang protokol kesehatan agar benar-benar dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak. Termasuk pada saat penetapan paslon dan pengundian nomor urut," kata dia.

Kabar baiknya, angka pelanggaran protokol kesehatan dalam proses tahapan Pilkada menunjukkan penurunan. Paling tidak, itulah catatan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri (Stafsus Kemendagri),

Kastorius Sinaga.

Menurut catatan Kastorius, pada masa pendaftaran jumlah pelanggar protokol kesehatan mencapai 35 persen. Namun kini, beberapa hari kampanye berlangsung, jumlah pelanggar disebut menurun drastis. "Kita melihat semakin menukik jumlah pelanggaran. Terakhir dua hari terjadi 7 persen dari 270 daerah yang ada pelanggaran minor," kata Kastorius dalam diskusi virtual, Selasa, 29 September 2020.

Menurut dia, ada optimisme situasi bisa dikembalikan seiring penegakan hukum dan kesadaran stakeholder Pilkada serentak 2020. Lebih lanjut Kastorius menjelaskan, tingginya pelanggaran hukum di awal pendaftaran pasangan calon disebabkan beberapa hal.

Pertama, sosialisasi yang dianggap kurang. Bahwa peraturan baru ditetapkan per tanggal 1 September dan pada 3 September diadakan pendaftaran. "Artinya cuma ada tiga hari. Kita berkesimpulan perlu ada sinergi stakeholder di sini dan segera kita lakukan evaluasi," jelas dia.

Kemudian Kastorius menerangkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengevaluasi para petahana yang turut dalam aksi tersebut. Tito, kata Kastorius, langsung memberikan pembinaan. "Kemudian Bapak Mendagri mengerahkan jajarannya menyusun regulasi dengan mengeluarkan peraturan agar setiap daerah mengeluarkan Peraturan Daerah yang di dalamnya diwajibkan 3M," jelas dia.

Dengan dikeluarkan aturan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat bertindak bila terjadi pelanggaran seperti kerumunan. Kemudian di dorong pembuatan Satgas di tingkat RT serta larangan untuk melakukan kegiatan konvoi dan sejenisnya.

"Dengan serangkaian aturan itu kita lihat statistik sejak tanggal 23 September terjadi penentuan nomor urut dan penetapan paslon definitif. Kita evaluasi ada pelanggaran tapi sangat minor dari 30 persen menukik sekitar 10 persen," ungkapnya.

Namun, optimisme Kastorius perlu pula berimbang dengan fakta yang dikemukakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. Menurut dia, saat ini Indonesia belum memiliki cerita sukses yang bisa dijadikan indikator untuk menekan angka penularan Covid-19.

Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa PBNU meminta agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda. itambah lagi, faktanya masyarakat Indonesia belum disiplin menjalankan protokol

**MC** Raka menjelaskan, mekanisme penetapan paslon digelar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan. Pasal 68 PKPU itu menyebutkan, penetapan hasil verifikasi persyaratan bakal calon, dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota.

kesehatan yang baik.

"Kita semua tahu, kita belum bisa disiplin protokol kesehatan yang baik. Kita belum punya satu success story di berbagai macam tempat yang bisa dijadikan indikator untuk menekan laju penambahan Covid-19," ungkap Helmy, Rabu, 23 September 2020.

Ia mengatakan, kondisi di Indonesia saat ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah berhasil melakukan protokol kesehatan ketat. Dengan demikian, mereka sudah bisa memulai kembali kegiatan dan aktivitas normal sehari-hari.

Maka, harapan umat selanjutnya akan terwakili oleh suara Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang



**I Dewa Kade Wiarsa Raka San**

berharap, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 berjalan lancar. "Kalau tetap dilaksanakan pemilukada demi hak demokrasi, kita berharap semuanya berjalan baik dan lancar," kata Haedar.

Namun, ia juga berharap ada yang bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya pandemi Covid-19 menjadi semakin tidak terkendali setelah Pilkada 2020.

Haedar bersyukur apabila pemerintah sudah siap menyelenggarakan pemilu seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan. "Semoga Indonesia sebagai negara-negara maju tersebut dalam dalam menangani dan mengendalikan Covid-19," ucapnya.

Itu jelas persoalan mitigasi, upaya mengatasi dampak negatif wabah Covid-19 dalam Pilkada. Kita akan segera melihat kenyataannya. ♦

## Waspada! Virus Korupsi Mengintai

# TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2020

Tahapan Pilkada Serentak 2020 mulai memasuki masa kampanye hingga 5 Desember 2020. Jauh hari sebelum sampai ke tahapan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan 'warning' kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta aparat pemerintah baik dipusat maupun daerah serta Partai Politik dan peserta pemilu dalam hal ini calon kepala daerah, untuk menerapkan kampanye bersih dengan tidak melakukan praktik-praktik korupsi.



**OLEH: H. FIRLI BAHURI**

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

**D**ari pengalaman sebelumnya, praktik korupsi suap menyuap sering kali terjadi dalam tahapan ini, dimana penyelenggara pemilu sangat rentan di suap dengan berbagai jenis gratifikasi oleh peserta pemilu yang ke-

dapatan melanggar aturan kampanye.

Disinilah kejujuran dan integritas penyelenggara pemilu di uji, digoda oleh sejuta bujuk rayu surga dunia oleh iblis bernama korupsi.

Ketika menyerah bertahan dengan kejujuran, maka hilang sudah imun terhadap virus korupsi yang masuk untuk membebaskan sifat tamak, sisi kelam manusia yang selama ini terbelenggu erat oleh nilai kejujuran.

Tamak adalah rasa rakus manusia akan hasrat, syahwat dan nafsu duniawi yang sudah tidak mampu lagi di kontrol, sehingga orang tamak pasti akan berperilaku koruptif dalam semua hal.

Data empiris menunjukkan bahwasanya jenis tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah perkara suap menyuap.

Hal ini benar adanya mengingat Tahun 2018 lalu dimana saat itu saya bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK, kami berhasil melakukan 30 Kali OTT dengan 122 tersangka dan 22 kepala daerah, terkait tindak pidana korupsi berupa suap menyuap.

Pilkada serentak adalah ranah politik yang berbeda dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, sehingga kami akan langsung memproses hukum (tanpa menunda) semua pihak tanpa terkecuali, yang kedapatan melakukan atau terlibat praktik korupsi selama pilkada.

Saya katakan bhw proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, tidak menghambat apalagi menghentikan pelaksanaan pilkada 2020, pesta demokrasi akbar rakyat di daerah.

Saya ingatkan, penerima maupun pemberi suap akan kita jerat dengan Pasal 5 Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 250 Juta.

Saya juga menyampaikan bahwa walaupun KPK berada di Ibukota, jangan berpikir kami akan sulit memperoleh informasi tentang korupsi karena KPK memiliki Mata Rakyat dan kami juga akan mengajukan opsi hukuman terberat bagi para pelaku korupsi, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPK

KPK tentu tidak akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Ingat! KPK memiliki 'Mata Rakyat' yang selalu memberikan informasi kepada kami, perihal dugaan tindak pidana korupsi di seluruh daerah di Indonesia.



Sorot tajam anak-anak bangsa yang memiliki integritas serta menjaga nilai-nilai kejujuran, sehingga kilau cahaya korupsi tak kan mampu menyilaukan apalagi membutakan pandangan mereka.

Dalam kesempatan ini, saya kembali mengingatkan terutama kepada calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan instrumen apalagi anggaran negara, dalam kontestasi pilkada serentak 2020.

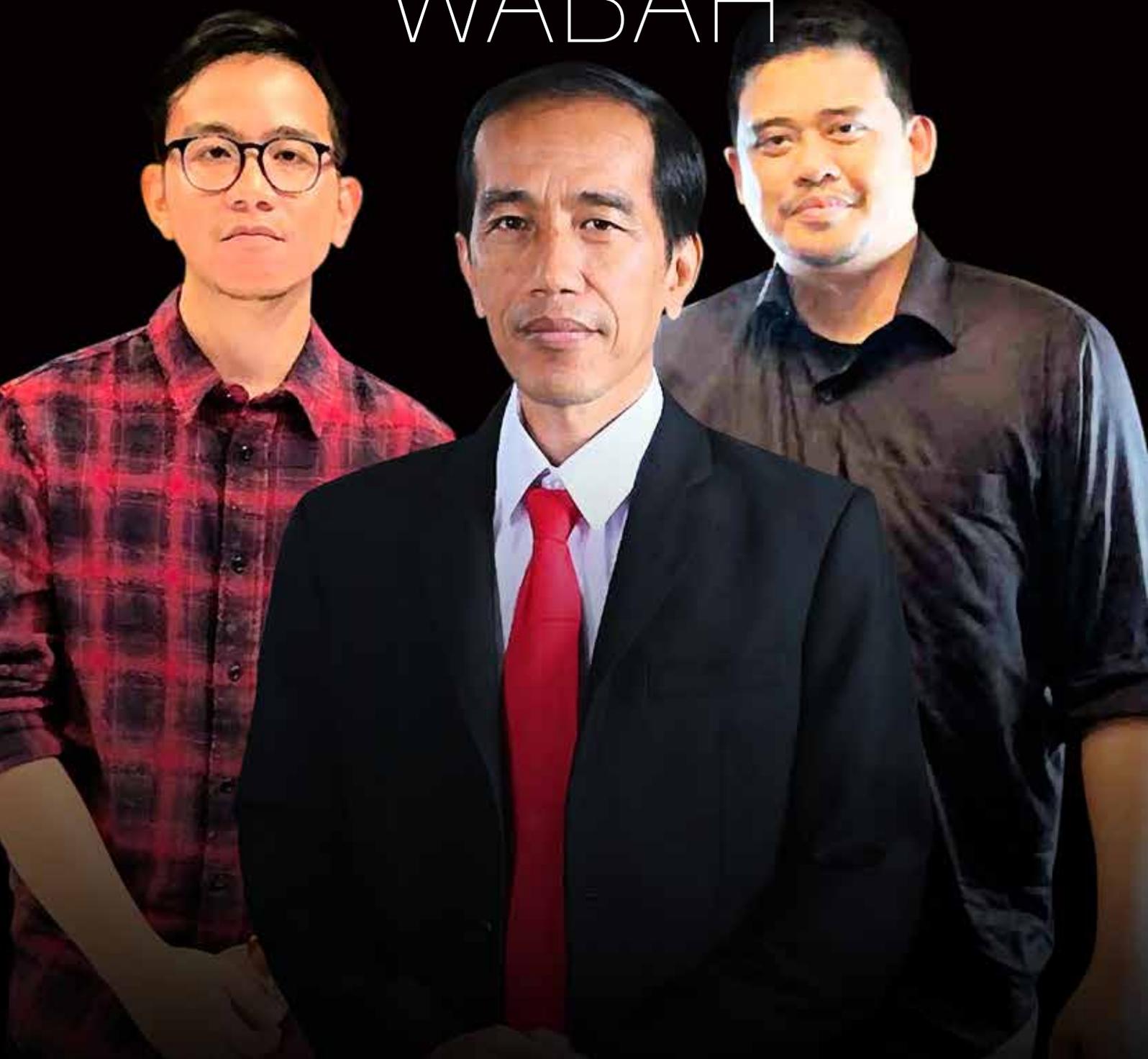
Bagi rekan-rekanku penyelenggara negara, aparatur pemerintah baik di pusat dan didaerah, serta para peserta Pilkada 2020, mari kita kita jadikan Pilkada Serentak 2020 ini sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas, melalui

**MC** Dalam kesempatan ini, saya kembali mengingatkan terutama kepada calon kepala daerah petahana atau dari unsur aparatur pemerintah untuk tidak menggunakan instrumen apalagi anggaran negara, dalam kontestasi pilkada serentak 2020.

cara-cara yang baik, bebas dari praktik korupsi. silahkan adu visi, misi dan program yang ditawarkan ke rakyat sehingga nanti kalau sudah terpilih sebagai kepala daerah akan membawa rakyat yang sejahtera, rakyat yang cerdas dan rakyat yang makmur.

Mari Bersama kita wujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang jujur, berintegritas, bermartabat, dan bebas dari Korupsi untuk mendapatkan pemimpin yang mampu membawa semua cita-cita dan harapan Founding Fathers kita, dimana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. ♦

# MENGEJAR TAHTA DI TENGAH WABAH



## Tampilnya anak dan menantu Presiden Joko Widodo dalam kontes-tasi Pilkada serentak 2020 yang beriringan dengan wabah Covid-19 mengundang tanggapan negatif maupun positif. Lebih dari itu, munculnya mereka di pentas politik merupakan pertanda atau sinyal menjelang Pilpres 2024.

**D**i Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo mendaftarkan dirinya sebagai calon Wali Kota. Lewat tengah hari, Gibran, bersama pasangannya, calon Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa melaju dari Kantor DPC PDI Perjuangan di kawasan Brengosan, Purwosari, dengan sepeda ontel (kayu) menuju Kantor Komisi Pemilihan di Jl Kahuripan, Sumber, Banjarsari.

Di belakangnya, tujuh kereta kuda atau andong mengiringi membawa para per-

der PDIP memberikan dukungan dengan membentangkan spanduk bergambar Gibran-Teguh.

Menurut Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, syarat pencalonan Gibran-Teguh dinyatakan lengkap. "Setelah dicek seluruhnya pendaftaran Gibran-Teguh dinyatakan sah dan memenuhi syarat. KPU kemudian memberikan tanda terima kepada bakal paslon Gibran-Teguh," katanya.

Hampir bersamaan dengan itu, namun di tempat berbeda, adik ipar Gibran, Bobby Nasution mendatangi KPU Kota Medan

kan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa bersaing dengan duet Bagyo Wahyono-FX Supardjo sebagai peserta Pilkada Solo 2020. Penetapan itu dilakukan melalui rapat pleno penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta di Kantor KPU Kota Solo

Rapat pleno tanpa dihadiri kedua pasangan calon itu dilakukan secara daring sesuai dengan ketentuan dari KPU pusat. "Kami sudah menetapkan lewat rapat pleno bahwa dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan kompetisi pada



wakilan partai pengusung maupun pendukung. Pengusung Gibran-Teguh adalah PDIP sedangkan parpol pendukung adalah Golkar, Gerindra, PAN, PSI, PKB, PPP, Nasdem, dan Perindo.

Pasangan Gibran-Teguh tampak mengenakan pakaian tradisional Jawa lurik dilengkapi dengan blangkon mengayuh sepeda ke Kantor KPU Solo. Kedua paslon itu diantar pula oleh istri masing-masing di salah satu andong.

Selain rombongan andong, ada pula puluhan kader PDIP dan relawan Gibran juga ngonthel mengiringi Gibran-Teguh. Sepanjang perjalanan, banyak pendukung Gibran-Teguh dari organ relawan dan ka-

dengan mengendarai skuter Vespa bersama pasangannya Aulia Rachman. Pasangan ini mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Berseragam kompak, pasangan ini mengenakan kaos putih disertai celana dan jaket jeans berwarna biru serta tidak lupa menggunakan masker berwarna hitam. Kedatangan keduanya disambut meriah oleh sejumlah pendukungnya yang dilaporkan lebih dulu tiba di Kantor KPU Kota Medan. Pasangan Bobby-Aulia diusung delapan partai politik (parpol): PDIP-Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, PSI dan Hanura.

Alhasil, KPU Kota Surakarta menetap-

Pilwalkot Solo 2020," kata Nurul Sutarti.

KPU Kota Medan juga menetapkan dua pasangan calon yakni Bobby Nasution-Aulia Rachman. Pasangan ini akan bersaing dengan duet Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

Maka, satu episode kisah anak-mantu Presiden menjadi kontestan Pilkada pun berlanjut. Di tengah wabah Covid-19 pula. Kontroversial? Ya. Toh ada tanggapan positif seiring tanggapan negatif.

Ada yang memandang anak-mantu Presiden yang masih menjabat mengikuti Pilkada adalah cerminan politik dinasti yang memanfaatkan jabatan orang tua untuk menduduki jabatan publik. Tuding-

an lain, bermainnya bohir (dari bahasa Belanda *bouwheer*, tuan kontraktor) atau pengusaha yang menjadi sponsor para calon untuk memuluskan bisnisnya ketika pasangan itu memenangi pemilihan. Juga terkait dengan oligarki, kelihain sekelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan di tangan kelompoknya.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, misalnya, berpendapat Pemilu dan Pilkada kerap diartikan sebagai demokrasi para cukong. Indikasinya, tingkat korupsi yang tinggi sepanjang

peluang penampilan kader unggulan yang berintegritas dalam parpol maupun dari berbagai elemen masyarakat sipil. Dampaknya, kata Busyro, penerapan demokrasi di Indonesia seperti itu telah menimbulkan situasi pelemahan dan pelumpuhan sistemik atas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri, dan Peradilan.

Namun, di mata Menko Polhukam Mahfud MD, nepotisme atau dinasti politik juga dipraktikkan di seluruh negara. Bahkan,

beberapa waktu lalu. "Dulu di Kabupaten Bangkalan ada yang mau mencalonkan diri karena kakaknya memimpin tidak baik. Jadi belum tentu orang nepotisme itu niatnya selalu jelek," ungkapnya.

Mahfud mengajak masyarakat untuk berpikir lebih terbuka mengenai kondisi ini. Menurut dia, warga yang memang tidak suka dengan nepotisme bisa memilih calon yang bukan dari turunan dinasti politik.

"Kalau tidak suka terhadap nepotisme, kesadaran moral masing-masing saja.



2004 hingga 2019 di berbagai daerah.

"Proses pilkada selalu ditandai dengan cukongisasi, cukongisme. Tentu cukong mengatur APBD, perizinan, dan sebagainya, didesain dalam kerangka kebutuhan bisnis mereka, bisnis yang gelap," ujar dia dalam webinar pada Rabu, 30 September 2020.

Busyro mengatakan dominasi cukong sebagai rentenir politik bisa memperkuat praktek politik uang (*money politics*). Permasalahan lain yang disebutkan adalah terkait dominasi dinasti politik dari elit istana kepresidenan bersama elit partai politik dan elit bisnis. "Pertanyaannya, apakah ini pupuk atau racun demokrasi?" ujarnya.

Menurut dia, dampak menguatnya dinasti oligarki politik adalah tersendatnya

lanjut Mahfud, siapa pun yang melarang adanya praktik nepotisme dan dinasti politik dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia.

"Di mana-mana (nepotisme dan dinasti politik) tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi. Tidak bisa. Akan terjadi pelanggaran HAM," kata Mahfud dalam webinar 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Minggu, 5 September 2020.

Untuk itu, Mahfud menilai, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah praktik nepotisme maupun dinasti politik pada Pilkada tahun ini. "Nepotisme maupun dinasti politik tidak selamanya buruk," sebutnya.

Kamudian dia mencontohkan kasus pencalonan salah satu Pilkada Bangkalan

Tapi, kita mau larang juga tidak bisa, ini fakta," jelas Mahfud

Fakanya, memang, bukan hanya Gibran dan Bobby yang tercaku dalam dinasti, bohir, dan oligarki. Beberapa nama juga disorot: Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati; putri Wapres Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan; dan putra Menteri Sekretaris Kabinet, Hanindhito Pramana di Kediri.

"Mungkin kita sebagian besar nggak suka dengan nepotisme, tapi harus kita katakan tidak ada jalan hukum konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," kata Mahfud

Pandangan Mahfud MD memang realistis. Pemilihan kepala daerah senantiasa

menyimpan cerita permainan uang yang mengiringinya. Mulai dari mengupayakan perahu atau kendaraan politik berupa dukungan partai untuk pencalonan, uang dan bingkisan untuk meraup suara, termasuk serangan fajar di hari pemilihan maupun permainan di tingkat tabulasi hasil.

Malah daftar itu dapat diperpanjang hingga tahapan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pernah menyebabkan Ketua MK menjadi terpidana. Alhasil, nyaris setiap tahapan mem-

dari elit politik itu sendiri. Ya saya sebutkan kalau mungkin Gibran dan Bobby adalah representasi ring Istana, yang saya sebutkan seperti Pilar yang tak lain juga adalah ring 1 dari elit politik. Makanya saya bilang, ini juga citarasanya kental sekali karena elite politik turun gunung untuk mendukung calon-calon yang dikeluarkan ini," tandasnya.

Jadi, pasangan Gibran dan Bobby sebenarnya adalah cerminan sistem politik dan dinamika yang menyertainya selama ini. Katakanlah sejak dimulainya pemilihan

pernah menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden RI.

Kini generasi kedua Jokowi muncul di panggung kontestasi Pilkada. Tentu ada yang berubah. Paling tidak, gaya dan tampilan mereka yang menyesuaikan diri dengan anak-anak muda millenial.

Satu hal yang mungkin luput dari perhatian adalah gaya mereka mengendarai sendiri kendaraan (sepeda ontel dan skuter Vespa) ketika mendaftarkan diri ke KPU. Mereka mengungkapkan simbol dapat mengendalikan sendiri arah kekua-



butuhkan uang. Pemilihan menjadi berbiaya mahal. Baik biaya untuk pengeluaran bagi kegiatan halal maupun biaya untuk kegiatan haram. Di situlah bohir memegang peranan.

Pengamat politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis), Adib Miftahul, menuturkan, Pilkada serentak 9 Desember mendatang citarasanya adalah nasional. Di mana ada Gibran anak Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution menantu Jokowi, putri Wapres Siti Nur Azizah, Rahayu keponakan Prabowo, dan Pilar Saga yang merupakan anak Bupati Serang sekaligus ring 1 dinasti Atut di Banten.

"Kenapa ini citarasa nasional? karena ini representasi dari elit politik istana dan

langsung di Indonesia pada awal Abad XXI. Pemilihan Presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah pada 2005.

Memang ada kesinambungan dan perubahan di sana. Kesinambungan dinasti politik, peran bohir atau biasa disebut plutokrasi, yaitu dominasi uang dalam proses politik, serta oligarki kelompok elite yang lihai meniti karir di jabatan publik.

Namun, tentu saja ada perubahan yang terjadi dalam sistem politik Indonesia sejak masa pemilihan langsung mulai menjadi tradisi. Perubahan para aktor, atau para pelaku yang berperan di pentas politik. Termasuk Presiden Joko Widodo yang

saannya. Berbeda sekali dengan ketika bapak dan mertua mereka mendaftarkan diri menumpang bajaj yang dikendalikan orang lain: simbol kedudukan tanpa kendali langsung.

Lebih dari sekadar simbol, Gibran dan Bobby yang tanpa pengalaman politik praktis mendalam akhirnya maju di kontestasi Pilkada serentak 2020, juga menubar sinyal lain. Bahwa pada saatnya nanti mungkin saja ada yang tanpa pengalaman politik praktis mendalam, akan maju dalam Pemilihan Presiden 2024. Siapa berani menutup kemungkinan seperti itu?

Apakah akan mengendarai sepeda ontel atau skuter Vespa? Kita tunggu saja tanggal mainnya. ♦



# TIBALAH MASA KAMPANYE PILKADA

Tinggal tiga tahap penting lagi saja yang tersisa dari proses Pilkada serentak 2020. Pertama, masa kampanye 26 September-5 Desember 2020. Lantas pemungutan suara, Rabu, 9 Desember 2020. Terakhir tentu lah penetapan pemenang Pilkada.

Masa kampanye dianggap paling rawan mengingat virus corona masih merajalela menebar penularan wabah Covid-19 di tengah siapa saja yang terlibat dalam Pilkada di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota kali ini. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki gagasan masuk akal di masa kampanye seiring dengan pandemi Covid-19.

Tito menyarankan agar pasangan calon yang bersaing di Pilkada 2020 membagikan sebanyak-banyaknya alat pelindung diri kepada masyarakat dalam kegiatan kampanyenya. Dengan begitu, ia berharap akan banyak masker dan

MC

*"Bisa kita bayangkan kalau itu sampai terjadi persepsi publik kepada pilkada ini akan baik, dan kita akan bisa menemukan pemimpin yang baik juga karena mereka melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka penanganan Covid-19," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Jumat, 2 Oktober 2020.*

hand sanitizer (pembersih tangan yang menonaktifkan virus) menyebar di tengah masyarakat.

Mendagri Tito juga berharap para pasangan calon menyediakan tempat-tempat cuci tangan dan sabun di ruang-ruang publik. Antara lain di bandara, terminal, stasiun, dermaga, hingga di depan kawasan permukiman.

"Bisa kita bayangkan kalau itu sampai terjadi. Persepsi publik terhadap Pilkada ini akan baik, dan kita akan bisa menemukan pemimpin yang baik juga karena mereka melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka penanganan Covid-19," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Jumat, 2 Oktober 2020.

Dalam pandangan Tito, perangkat perlindungan dan pencegahan penularan Covid-19 di tempat publik dan tersedia gratis itu bisa disertai dengan gambar, nomor urut, serta pesan dari pasangan calon terkait. Dia mencontohkan, jika setiap pasangan calon membagikan 100 ribu masker, nantinya akan ada 70 juta lebih masker beredar di masyarakat.

Hitung-hitungannya, ada 743 pasangan calon yang masing-masing menyediakan 100 ribu masker. Malah hampir 75 juta masker jika itu benar terjadi.

"Masker dengan ada gambar pasangan calon, nomornya, pesannya apa, pilih saya, Covid-19 di daerah kita akan aman, misalnya gitu. Yang PHK tidak ada. Namanya janji kan boleh saja," kata Tito.

Menurut dia pola pikir kampanye cara lama yang cenderung *show of force* untuk mengumpulkan massa harus diubah di masa pandemi ini. Kampanye yang menyebabkan kerumunan dilarang dan sangat dibatasi agar tak menjadi ajang penularan wabah Covid-19.

Tito juga mengingatkan agar paslon dan timnya lebih menggalakkan kampanye virtual. Ia mencontohkan pasangan calon kepala daerah yang berkampanye menggunakan layar virtual dibawa keluar masuk kampung oleh tim sukses.

Selain itu, Tito mengatakan agar tema kampanye berfokus pada bagaimana penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosialnya. "Kalau Anda jadi kepala daerah apa yang harus Anda lakukan menangani pandemi? Ini akan bisa mewarnai operasi cara berpikir strategi mereka dalam kemenangan dan waktu menang nanti. Itu yang kami harapkan," untkannya.

Toh Tito mengakui, dari hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 pada pekan pertama yang dimulai pada 26 September 2020, pelanggaran protokol Covid-19 masih terjadi. Namun pelanggaran itu disebutnya tak semasih saat pendaftaran ke KPU pada 4-6 September 2020 lalu.

Untuk pelanggaran-pelanggaran di masa pendaftaran ke KPU, Badan Pengawas Pemilu yang telaten membuat catatan. Menurut catatan lembaga ini, sekurangnya terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 berlangsung.

Bawaslu juga hendak menerapkan sanksi administratif hingga ancaman pidana bagi bapaslون yang melanggar. "Jadi bentuknya adalah rekomendasi kepada KPU. Nanti KPU memberikan rekomendasi ke Bawaslu tentang sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap bakal paslon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan," kata Abhan dalam konferensi pers tentang Hasil Pengawasan Pendaftaran Bapaslون Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang disiarkan di *YouTube* Bawaslu RI, Senin, 7 September 2020.

Abhan mengatakan dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang tidak

diatur ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun, sambungnya, Bawaslu memiliki kewenangan melimpahkan pelanggaran yang diatur di luar Undang-Undang kepolisiان ke pihak kepolisian dan kejaksaan. Misalnya melanggar UU Karantina Wilayah, UU Wabah



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian



Ketua Bawaslu Abhan

Penyakit Menular, atau Pasal 212 dan 218 KUHP, peraturan pemerintah daerah dan peraturan Kementerian Kesehatan.

"Artinya apa? Bahwa yang terkait dengan pidana memang menjadi ranah bagi penyidik kepolisian dan bersama kejaksaan nanti bagaimana menindaklanjuti pelanggaran UU di luar ketentuan perundang-undangan Pilkada," kata Abhan.

Kita lihat saja masa kampanye panjang selama 70 hari ini. Lebih banyak kerumunan atau alat protokol kesehatan yang dominan, dan bagaimana menangannya? ♦



# PELANGGARAN TAK TERELAKKAN

Sejak awal Badan Pengawas Pemilu sudah mengantisipasi kerumitan pengawasan rangkaian kegiatan seputar Pilkada 2020 yang berlangsung di masa Covid-19. Pelanggaran protokol kesehatan memang tak terelakkan.

**K**ota Depok, Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta, adalah contoh betapa sulitnya menerapkan protokol kesehatan dalam tahapan kampanye Pilkada. Lima hari jalannya kampanye Pilkada di Depok yang dimulai pada 27 September 2020, pelanggaran protokol kesehatan sungguh tak terelakkan

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Depok Dede Slamet Permana mengatakan, pelanggaran yang dilakukan adalah jumlah peserta kampanye tatap muka yang melebihi 50 orang. Serta tidak ada yang menjaga jarak. Hal demikian diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

"Pelanggaran ini kami temukan di kedua pasangan. Keduanya sama saja baik pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia yang bernomor urut satu dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang bernomor urut dua. Masih mengabaikan protokol kesehatan. Kami di Bawaslu Kota Depok mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Kemudian kami juga sudah berikan teguran tertulis kepada panitia pelaksana kegiatan tersebut," ujar Dede, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ironinya, selain menyelenggarakan Pilkada, Depok adalah salah satu kota pa-



ling rawan penularan Covid-19 di Jawa Barat. Dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa, kepadatan penduduknya pun di atas rata-rata. Alhasil, imbasnya terlihat dalam kampanye Pilkada yang sulit mengelakkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

"Jadi jarak antara orang yang satu dengan yang lain berhimpitan dan bersesakan. Kalau untuk protokol kesehatan memakai masker, Alhamdulillah sudah lebih patuh dibandingkan dua protokol lainnya ini," lanjut Dede.

Bawaslu Kota Depok memahami bahwa sulit menjaga jarak bisa juga diakibatkan karena ruangan yang relatif sempit. Bila itu dilakukan di dalam gedung yang luasnya tidak seberapa. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti tidak bisa diatur oleh panitia sedemikian rupa sehingga terhindar dari tak berjarak. "Iya bisa saja kursinya diatur jaraknya. Jika semua tak bisa masuk, dibatasi yang masuk. Bergantian. Ini sebenarnya teknis saja. Harusnya bisa diatur jika memang serius menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi ini," tutur Dede.

Secara keseluruhan, selama tiga hari awal masa kampanye, pelanggaran protokol kesehatan memang mencolok di berbagai lokasi kampanye. "Evaluasi kami lakukan pada 28, 29 dan 30 September

**MC** Bawaslu Kota Depok memahami bahwa sulit menjaga jarak bisa juga diakibatkan karena ruangan yang relatif sempit. Bila itu dilakukan di dalam gedung yang luasnya tidak seberapa. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti tidak bisa diatur oleh panitia sedemikian rupa sehingga terhindar dari tak berjarak. "Iya bisa saja kursinya diatur jaraknya. Jika semua tak bisa masuk, dibatasi yang masuk. Bergantian. Ini sebenarnya teknis saja. Harusnya bisa diatur jika memang serius menegakkan protokol kesehatan di masa pandemi ini," tutur Dede.

2020. Ada 582 kegiatan kampanye di 187 Kabupaten/Kota. Pelanggaran protokol kesehatan masih ditemukan pada 35 kabupaten/kota," tulis Komisioner Bawaslu Afifuddin, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ia merinci, beberapa daerah pelanggaran protokol pencegahan Covid-19, seperti di Depok, Trenggale, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Pasangkayu, Makassar dan Solok Selatan. Secara persentase, lanjut Afifudin, dari 582 kampanye tersebut, 43 persen atau 250 kegiatan di antaranya masih terjadi pertemuan tatap muka. Kemudian, 22 persen atau 128 kegiatan adalah penyebaran bahan kampanye.

Kemudian, Pemasangan alat peraga sebanyak 99 kegiatan atau 17 persen, kampanye di media sosial sebanyak 64 kegiatan atau 11 persen, dan kampanye dalam jaringan sebanyak 41 kegiatan.

"Mayoritas pasangan calon dan tim kampanye masih menggunakan kampanye dalam bentuk pertemuan langsung yang membutuhkan protokol kesehatan. Pilihan kampanye ini juga berpotensi adanya penyebaran Covid-19," ujarnya.

Sejak awal Bawaslu sudah mengendus gangguan Covid-19 terhadap Pilkada. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) terkendala oleh petugas yang tertular Covid-19. Beberapa kabupaten-kota juga terkendala memenuhi protokol kesehatan karena keterbatasan anggaran.

"Anggaran untuk pilkada sudah disetujui tahun 2019 kemarin, dan karena ada pandemi Covid-19 maka memerlukan anggaran baru dan sampai sekarang belum terpenuhi 100 persen ada beberapa daerah yang belum melaksanakan protokol kesehatan, karena masalahnya di daerah tersebut tidak ada petugas kesehatan, tidak ada rapid test, dan jaringan internet," jelas Fritz pada Webinar Nasional Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada Masa Pandemi Covid-19, Hambatan dan Solusinya, yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa, 11 Agustus 2020.

Kendala lainnya, lanjut Fritz, adalah potensi logistik kurang maksimal dan rasa tidak aman diantara para penyelenggara pemilu. "Karena kita melihat bahwa banyak protokol kesehatan yang harus dilakukan, sehingga mungkin nanti dalam proses persiapan ada hal-hal yang bersifat teknis kepemiluannya itu tidak terpenuhi melalui potensi di logistik," ujarnya.

Sedangkan potensi pelanggaran dalam pilkada, Fritz menyebutkan antara lain

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh petahana yang sulit dibendung, merebaknya politik uang lantaran banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Akibat dari pandemi covid-19, banyak terjadi PHK sehingga potensi untuk melakukan politik uang itu tinggi,” ujar Fritz

Selanjutnya, jelas Fritz, potensi pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Dia mencontohkan saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang diselenggarakan KPU. “Pada saat kami mengawasi simulasi tersebut, kami melihat bagaimana petugas KPPS pada akhirnya lebih fokus untuk memperhatikan protokol

slu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan sejumlah tantangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang menjadi tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di masa pandemi Covid-19. Pertama, partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pidana diprediksi akan makin rendah akibat pandemi covid-19.

“Di masa bukan pandemik, saat Pilkada 2015 dan 2018, situasi normal. Tapi, angka laporan masyarakat jauh lebih rendah dari angka temuan. Partisipasi masyarakat masih sangat rendah,” ujar Ratna dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu melalui daring di Jakarta, dikutip situs resmi Ba-



kesehatannya dan membuat lamanya antrian orang diluar, dan membuat teknis kepemiluannya menjadi kurang diperhatikan. Itu menjadi persoalan di TPSnya,” jelas Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu ini.

Dia juga mengungkapkan persoalan di TPS yang mungkin bisa terjadi seperti setiap orang yang hadir di TPS harus diukur suhunya dengan thermogun sesuai dengan prosedur yang mengacu pada PKPU nomor 6 tahun 2020. “Persoalannya adalah bagaimana bila thermogunnya rusak, apakah pemungutan suara tetap dilanjutkan atau tidak,” jelasnya.

Persoalan lain adalah penindakan terhadap pelanggaran. Komisioner Bawa-



“Satu kasus masih dalam proses penyidikan, satu penuntutan dan satu telah divonis di pengadilan,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu itu.

waslu RI, Senin, 31 Agustus 2020.

Sebagai informasi, sampai akhir Agustus 2020, baru tercatat 15 dugaan pelanggaran tindak pidana dari tahapan pertama berjalan hingga tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dari jumlah itu hanya tiga kasus saja yang menjalani proses hukum.

“Satu kasus masih dalam proses penyidikan, satu penuntutan dan satu telah divonis di pengadilan,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu itu.

Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan tiga kasus yang dilanjutkan ke tahap penyidikan diantaranya; pertama, kasus pemalsuan dukungan bakal calon perseorangan di Kabupaten Rejang Lebong,

Provinsi Bengkulu. Kedua, menghilangkan hak orang lain untuk menjadi calon bupati di Kabupaten Supiori, Papua. “Ketiga, Kepala daerah melakukan mutasi tanpa izin di Kabupaten Waropen, Papua,” tutup Ratna.

Ia menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap kualitas penanganan pelanggaran. Jika partisipasi masyarakat rendah maka dikhawatirkan kualitas penanganan pelanggaran Pilkada 2020 juga rendah.

Lebih dari itu, Bawaslu terkesan bekerja tanpa dukungan yang kuat dari lembaga lain sebagai penanggung jawab pada keamanan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah kondisi Covid-19 dalam kerangka Gakkumdu. Koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan aparat TNI di wilayah teritorial juga menjadi pertanyaan karena Gakkumdu bukan sekadar Bawaslu.

Ia menambahkan banyak dugaan tindak pidana pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak dapat diproses. “Padahal dalam beberapa peristiwa dugaan pelanggaran seperti politik uang, mahar politik sering terjadi di ruang tertutup, itu sulit terdeteksi jajaran pengawas pemilu dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk melaporkannya,” kata dia.

Politik uang menjadi diprediksi bakal marak karena keadaan ekonomi yang menurun akibat pandemi juga menjadi tantangan Bawaslu menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pilkada. “Menjadi kekhawatiran kita dengan kondisi ekonomi yang menurun, politik uang di tahun 2020 akan meningkat karena masyarakat menjadi sangat permisif terhadap politik uang,” jelasnya.

Kendati demikian, kata Ratna, pengaturan politik uang dalam undang-undang tentang pemilihan umum sudah lebih baik. Sebab, subjeknya tidak terbatas orang-orang tertentu, misalnya, peserta pemilu, peserta kampanye, dan pelaksana kampanye. Saat ini, subjeknya disebutkan setiap orang. Hal ini lebih mudah dalam menangani dugaan pelanggaran karena tidak ada pembatasan terhadap subjek.

Selanjutnya penjatuhan sanksinya pun jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pemberi dan penerima juga tidak luput untuk diberikan sanksi. “Tetapi tentu melihat situasi pandemi Covid-19, kondisi ini yang kita khawatirkan akan menutup ruang partisipasi masyarakat karena kalau mereka melaporkan akan menjadi subjek yang dikenakan sanksi,” ucap Ratna.

**MC** Ia menyebutkan tantangan berikutnya tentang pemanfaatan teknologi informasi yang belum terlalu dikenal dalam proses penanganan pelanggaran pidana. Tidak semua daerah pun juga memiliki akses jaringan yang memadai.

Tantangan lainnya, Ratna mengatakan, waktu penanganan pelanggaran pidana yang sangat singkat dibandingkan dengan pemilu. Bawaslu bahkan telah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait waktu penanganan pelanggaran tindak pidana, tetapi ditolak.

Ia menyebutkan tantangan berikutnya tentang pemanfaatan teknologi informasi yang belum terlalu dikenal dalam proses penanganan pelanggaran pidana. Tidak semua daerah pun juga memiliki akses jaringan yang memadai.

Menurut Ratna, hal itu dapat membuat kesalahan dalam berkomunikasi. Apalagi dalam penanganan pelanggaran berisiko besar jika terjadi kesalahan dalam proses



**Ratna Dewi Pettalolo**



**Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar**

pemeriksaan.

Ia juga mengkhawatirkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Alhasil, Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 memang tantangan terbesar penyelenggara untuk bisa mengajak masyarakat hadir di TPS pada hari pemungutan suara. ♦



Gedung Merah Putih KPK

# BAYANG-BAYANG MUDHARAT PILKADA

Telah 15 tahun, atau rerata tiga kali sudah Indonesia mengalami pemilihan langsung kepala daerah untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Bayang-bayang mudharat hasil Pilkada senantiasa menyertainya. Selain wabah Covid-19, catatan-catatan buruk pemenang Pilkada selayaknya mendorong upaya untuk mencegahnya.

**D**i luar dampak wabah Covid-19 terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti bahwa masa pemilihan kali ini bertabrak dengan petahana, pejabat yang mempertahankan kedudukannya dan berpeluang melanggar asas netralitas aparatur sipil negara dalam persaingan dengan kandidat penantangannya. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut menyoroti soal ini.

"Netralitas ASN dalam pilkada ini kayaknya penyakit lama yang belum sembuh-sembuh. Masalah netralitas itu jadi cacatnya demokrasi kita dalam pelaksanaan pilkada," ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan arahan virtual pada pertemuan virtual dengan pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa, 15 September 2020.

Tambahan pula faktor-faktor lain semisal politik dinasti, juga peran bohir, yang ikut menentukan pemenang Pilkada ketika menjalankan mandatnya sebagai kepala daerah. Berkombinasi dengan jejaring kekuasaan lama sebagai petahana, maka terbentuklah oligarki, kelompok kecil yang lihai memainkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok kecil sesamanya. Meskipun masih bersifat lokal skalanya.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dari 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, 224 antaranya melibatkan calon petahana. Para petahana ini sangat berpotensi menggerakkan aparatur sipil ne-



Abhan malah pernah menyebut sepuluh daerah rawan itu: Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Makassar, dan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Agam.

"Mohon maaf ini kami sebutkan untuk melakukan upaya antisipasi agar persoalan netralitas ASN di sana tidak terjadi secara masif," ucap Abhan.

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada 8 September 2020 juga sempat mengingatkan, agar seluruh pihak dapat menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas demokrasi. "Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu, yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI, dan Polri, tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," ucap Presiden.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada para penyelenggara pilkada untuk bekerja keras guna menghasilkan proses pilkada yang berkualitas.

"Netralitas, profesionalitas, dan transparansi penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan," ucapnya.

Salah satu indikasi jejaring petahana yang ampuh adalah gejala pasangan calon tunggal atau tanpa lawan dalam Pilkada. Persaingannya hanya dengan kotak kosong. Dari 224 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada pada 2020 ini, 21 antaranya atau hampir 10 persen menampilkan pasangan calon tunggal yang sebagian besar merupakan petahana.

Nah, puncak dari kekhawatiran pasca Pilkada adalah para kepala daerah itu tersangkut korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2020.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK.

"Korupsi yang ditangani KPK 36 persen atau 397 perkara, itu adalah melibatkan pejabat politik. Anggota DPR/DPRD 257, wali kota/bupati 119, ini sampai Mei 2020," kata Giri dalam sebuah webinar yang di-

gara (ASN) untuk melakukan pelanggaran netralitas demi kemenangan dalam Pilkada.

Alasannya, menurut Abhan, para petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang mereka pimpin. "Bagi calon pendatang baru sangat sulit melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," kata Abhan, melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman *Bawaslu RI*, Selasa, 29 September 2020

Di mata Abhan, petahana berpengalaman mengendalikan kekuasaan di daerah mereka. Oleh karenanya, peluang untuk menang lebih terbuka. "Sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan lima tahun di masa jabatannya," ujar Abhan.

Menurut Abhan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan ASN kerap dilibatkan petahana dalam kontestasi pemilu atau pilkada. Misalnya, pendidikan dan pengetahuan yang memadai memungkinkan ASN menjadi tim penyusun program dan materi kampanye. ASN juga mempunyai jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa.

Sementara, petahana memiliki wewenang strategis menggerakkan anggaran keuangan melalui penyusunan program dan kegiatan. "Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," sambungnya.

**MC** *Netralitas, profesionalitas, dan transparansi penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan*

siarkan akun *Youtube* Kanal KPK, Rabu, 30 September 2020.

Dalam paparannya, Giri juga mengungkapkan terdapat 21 gubernur yang ditangani dalam kurun waktu tersebut. Giri melanjutkan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch yang menggabungkan jumlah kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, ada 253 kepala daerah dan 503 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi.

Selain itu, data KPK juga menunjukkan bahwa kasus korupsi telah terjadi di 27 dari 34 provinsi se-Indonesia selama 2004-2020. Berkaca dari data-data di atas, Giri mengimbau para calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada 2020 untuk menjauhi praktik ko-

lain penerimaan *kickback* ataupun pengaturan pemenang lelang pengadaan.

Modus ketiga, jual beli perizinan, mulai dari perizinan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga perkebunan. "Berikutnya korupsi anggaran, sudah pintar, kenal sama DPRD. Jadi sebelum dieksekusi pun sudah terjadi," kata Giri.

Modus kelima, penerimaan gratifikasi. Giri mengingatkan bahwa setiap penerimaan gratifikasi dapat dikenakan piadana bila tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. "Nggak minta pun dikasih karena jabatannya bupati/wali kota. Belum masuk ke ruangan rumah dinas, semua perabotan sudah diisi dan yang isi pengusaha," kata Giri mencontohkan praktik



**Giri Suprapdiono**

rupsi bila sudah menjabat kelak.

Ia juga mengungkapkan modus atau cara korupsi yang diidentifikasi oleh KPK. Modus pertama, kata Giri, jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris daerah, hingga kepala sekolah.

Kedua, korupsi pengadaan barang dan jasa yang baru dapat dilakukan kepala daerah setelah memiliki wewenang merencanakan anggaran. Giri mengatakan, beberapa hal yang dilakukan dalam korupsi pengadaan barang dan jasa antara

**MC** Ia juga mengungkapkan modus atau cara korupsi yang diidentifikasi oleh KPK. Modus pertama, kata Giri, jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari jabatan kepala dinas, sekretaris daerah, hingga kepala sekolah.

gratifikasi.

Keenam, penggelapan pendapatan daerah, contohnya, ketika ada pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas daerah, tetapi malah dibagi-bagikan di kalangan pejabat daerah dan oknum-oknum lainnya.

Giri juga mengatakan, ia sering mendapati tak sedikit kepala daerah yang sudah menjabat justru berpikir untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan untuk kepentingan pilkada sekaligus mencari uang lagi untuk digunakan pada pilkada berikutnya. Nah... ♦

## Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada 2020

Secara keseluruhan, ada 25 pasangan calon tunggal di Pilkada serentak 2020 ini. Selain 21 kabupaten, empat lainnya adalah Pilkada Kota Gunung Sitoli, Nias, dan Kota Pematang Siantar, keduanya di Sumatera Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut daftarnya:

| NO | KABUPATEN/KOTA   | NAMA PASANGAN                               | PARTAI PENGUSUNG  |
|----|--|---|---|
| 1  | Kabupaten Humbang<br>Hasundutan, Sumatera Utara          | Dosmar Banjarnahor-Oloan P Nababan          | Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, Hanura, Demokrat                                      |
| 2  | Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara                        | Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli              | PDI-P, Demokrat, Hanura,<br>Gerindra, Golkar, Perindo,<br>PKPI, PAN                       |
| 3  | Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara                     | Asner Silalahi-Susanti Dewayani             | Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PAN, Hanura,<br>Demokrat, PKPI                        |
| 4  | Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat                        | Benny Utama-Sabar AS                        | Golkar, Demokrat, PKS, PAN,<br>PPP, PKB, Nasdem, PDI-P                                    |
| 5  | Kabupaten Ogan Komering Ulu,<br>Sumatera Selatan         | Kuryana Azis-Johan Anuar                    | PKB, Gerindra, Golkar, PDI-P,<br>Nasdem, PKS, PPP, Hanura,<br>Demokrat, PBB, PKPI         |
| 6  | Kabupaten Ogan Komering<br>Ulu Selatan, Sumatera Selatan | Popo Ali Martopo-Sholehien Abuasir          | PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PKS, Perindo, PPP,<br>PAN, Hanura, Demokrat, PBB |
| 7  | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu                       | Mian-Arie Saptia Hadinata                   | PKB Gerindra PDI-P Golkar<br>Nasdem PKS PPP PAN<br>Hanura PKPI                            |
| 8  | Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah                          | Mohammad Said Hidayat - Wahyu Irawan        | PDI-P   |
| 9  | Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah                          | Sri Sumarni-Bambang Pujiyanto               | PDI-P, PKB, Gerindra, PPP,<br>Hanura, Golkar, PKS,<br>Demokrat, PAN                       |
| 10 | Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah                           | Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih       | PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PKS, PPP, PAN,<br>Demokrat                       |
| 11 | Kota Semarang, Jawa Tengah                               | Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu | PDI-P, Gerindra, Demokrat,<br>PKB, PAN, Nasdem, PSI,<br>Golkar, PKS                       |
| 12 | Kabupaten Sragen, Jawa Tengah                            | Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto        | PDI-P, PKB, Golkar, PAN,<br>Nasdem  |
| 13 | Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah                          | Afif Nurhidayat- Muhammar Albar             | PDI-P, PKB, Golkar,<br>Demokrat, Nasdem, PAN,<br>Hanura                                   |
| 14 | Kabupaten Kediri, Jawa Timur                             | Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa | PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PKS, PPP, PAN,<br>Demokrat                       |
| 15 | Kabupaten Ngawi, Jawa Timur                              | Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko        | PDI-P, Golkar, PKB, Gerindra,<br>PKS, PAN, Nasdem, Demokrat,<br>Hanura dan PPP            |
| 16 | Kabupaten Badung, Bali                                   | I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Sulasa         | PDI-P, Golkar, Demokrat   |
| 17 | Kabupaten Sumbawa Barat, NTB                             | W Musyafirin-Fud Syaifuddin                 | PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PPP, PKS, PAN, PKPI                              |
| 18 | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur                        | Rahmad Mas'ud-Thohari Azis                  | Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra,<br>Demokrat, PKB, Perindo, PPP                              |
| 19 | Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim                      | Edi Damansyah-Rendi Solihin                 | Golkar, PDI-P, Gerindra, PAN,<br>PKS, Nasdem, PPP, Perindo,<br>Hanura                     |
| 20 | Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan                         | Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni  | PKB, PDI-P, Golkar, Nasdem,<br>PKS Perindo, PPP, PAN,<br>Demokrat                         |
| 21 | Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan                      | HA Kaswadi Razak-Lutfi Halide               | PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PPP, Demokrat                                    |
| 22 | Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat                  | HM Aras T-H Muh Amin Jasa                   | PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar,<br>Nasdem, PKS, Perindo, PAN,<br>Hanura Demokrat            |
| 23 | Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat                 | Markus Waran-Wempie Welly Rungkung          | PDI-P, Golkar, Nasdem,<br>Perindo, Hanura, PKPI   |
| 24 | Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat                  | Yosias Saroy-Marinus Mandacan               | PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem,<br>PKS Perindo, PPP, PAN,<br>Hanura, PKPI                     |
| 25 | Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat                        | Abdul Faris Umlati-Orideko L Burdam         | Gerindra, Golkar, Nasdem,<br>PKS, PAN Demokrat  |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

# SOSIALISASI MERGER BANK SYARIAH KIAN GENCAR

**Rencana merger bank-bank syariah di lingkup Himpunan Bank Negara (Himbara) terjadwal tuntas pada Februari 2021. Sosialisasi makin gencar dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**

**K**eseriusan melebur bank-bank syariah terafiliasi bank negara semakin jelas dengan kajian-kajian serius. Antara lain dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVIII yang berlangsung pada Senin, 21 September 2020 di Semarang, Jawa Tengah.

O ya, FREKS berlatar belakang keperluan OJK terhadap masukan dan pandangan dari kalangan akademisi. Dengan alasan itu, OJK akan mendukung penelitian di bidang keuangan syariah yang meliputi

perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah. Dengan begitu, muncul harapan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terkait keuangan syariah yang menunjang pengembangannya.

Namun, tentu saja FREKS juga dapat menjadi sarana sosialisasi program-program pembangunan ekonomi syariah. Begitulah, maka dalam FREKS VIII rencana merger bank syariah menjadi bahasan yang mendaat porsi lumayan besar. Dalam pidato pembukaan, misalnya, Ketua OJK Wimboh Santoso endukung terang-terangan rencana merger bank-bank syariah di lingkup Himbara.

"Kami sambut baik rencana Kementerian BUMN untuk membentuk satu sinergitas bank syariah yang lebih besar lagi dan akan jadi levelnya sama dengan BUKU IV," kata Wimboh. Menurut dia, saat ini jumlah pelaku industri keuangan syariah dan variasi produk sudah banyak, tapi belum ada lembaga keuangan syariah



# MENGENAL 2 SISI FREKS

Pada 2020 ini, OJK dan DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) bekerja sama dengan Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi tuan rumah menyelenggarakan FREKS XVIII dengan tema “Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berkelanjutan Melalui Sinergi Pengembangan Industri Halal, Adopsi Teknologi, dan Inklusi Keuangan”.

Ragam kegiatan dalam FREKS 2020 terdiri dari presentasi paper para finalis Call for Papers, kegiatan prominent scholar lecture oleh pakar keuangan syariah internasional, general lecture oleh pakar keuangan syariah nasional, dan dua sisi kegiatan.

Pertama, Forum Koordinasi IAEI. Forum ini membangun kerja sama dengan IAEI dan melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama. Peserta pada Forum IAEI merupakan rektor/dekan dan dosen Perguruan Tinggi Umum dan Agama Islam yang memiliki Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi IAEI.

Kedua, Seminar Forum Silaturahmi Stu-

di Ekonomi Islam se-Indonesia (FOSSEI). Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan FOSSEI yang dikoordinir oleh Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) setempat. Dalam Kegiatan ini, perguruan tinggi tuan rumah menjadi salah satu dari

panitia pegerah dan menyediakan lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Narasumber yang dihadirkan merupakan usulan dari FOSSEI atas persetujuan OJK. Pelaksanaan kegiatan seminarnya adalah FOSSEI. ♦

dengan kapasitas besar yang bisa berhadapan dan berkompetisi langsung dengan lembaga keuangan yang sudah hadir terlebih dulu.

Selanjutnya Wimboh menyatakan perlunya membangun lembaga keuangan syariah yang sepadan. Antara lain dengan kehadiran bank di level BUKU IV dan sektor non-bank dengan kapasitas setara lembaga sejenis yang konvensional. “Kita harapkan lembaga keuangan syariah yang berdaya saing, daripada yang hanya memikirkan upaya bertahan hidup,” katanya.

BUKU (Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha) IV adalah level tertinggi perbankan umum berdasarkan rumusan Bak Indonesia sejak 2012. Kategorisasi ini kemudian diperbaharui oleh Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Secara garis besar, maksud kategorisasi ini adalah mengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan besarnya modal inti. Kategorisasi ini berlaku pula untuk bank umum

**MC** *“Kami sambut baik rencana Kementerian BUMN untuk membentuk satu sinergitas bank syariah yang lebih besar lagi dan akan jadi levelnya sama dengan BUKU IV,” kata Wimboh. Menurut dia, saat ini jumlah pelaku industri keuangan syariah dan variasi produk sudah banyak, tapi belum ada lembaga keuangan syariah dengan kapasitas besar yang bisa berhadapan dan berkompetisi langsung dengan lembaga keuangan yang sudah hadir terlebih dulu.*

syariah, dan unit usaha syariah.

Untuk Bank BUKU IV, pengertiannya adalah bank dengan modal inti minimal Rp30 triliun. Di bawahnya ada bank BUKU III dengan modal inti antara Rp5-30 triliun, bank BUKU II dengan modal inti antara Rp1-5 triliun, dan bank BUKU I dengan modal inti kurang dari Rp1 triliun.

Menurut Wimboh, jika bank hanya sanggup bertahan hidup, akan kehilangan waktu dan kesempatan untuk meningkatkan daya saing produk dan layanannya. Kemampuan untuk berkompetisi, menurutnya, jauh lebih penting. Untuk melakukan hal tersebut, OJK sudah mengeluarkan ketentuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga keuangan. Seperti dengan regulasi peningkatan nominal modal minimum dan akselerasi konsolidasi.

Jadi jelas, inti sosialisasi merger bank syariah Himbara adalah membentuk bank besar yang andal bersaing dengan bank konvensional. Rencana merger itu sudah bergulir sejak Menteri BUMN Erick Thohir mengemukakannya pada awal Juli 2020. Kita tunggu realisasinya. ♦



## KABAR FESYAR DARI SUMBAR

**Meski wabah Covid-19 belum mereda, Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera 2020 tetap berlangsung antara 14-20 September 2020. Secara virtual tentu saja. Kali ini Sumatera Barat (Sumbar) menjadi tuan rumah utama.**

Fesyar merupakan salah satu ikhtiar Bank Indonesia mendukung Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. Selain juga merupakan rangkaian kegiatan menuju Indonesia Sharia Economic Festival.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Wahyu Purnama selaku panitia FESyar regional Sumatera 2020 mengungkapkan FESyar sudah diselenggarakan sejak 2017 di tiga wilayah regional. Ketiga wilayah itu yakni Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia. "Kegiatan FESyar Sumatera secara umum terdiri atas empat kegiatan utama yaitu pembukaan, sharia economic forum, sharia fair, dan tabligh akbar", tuturnya.

Bank Indonesia sebagai salah satu penjaga pilar stabilitas ekonomi dan keuangan, kata Wahyu, secara konsisten



*Sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri keuangan syariah, Bank Indonesia telah menginisiasi kegiatan International Syaria Economic Festival (ISEF) yang pelaksanaannya telah dibuka secara resmi melalui kegiatan Kick Off oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 7 Agustus 2020 lalu. "Kick Off tersebut diiringi dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai rangkaian kegiatan Road to ISEF," ungkap dia.*

mendorong dan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia yang diharapkan akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. "Pengembangan Ekonomi Syariah di Bank Indonesia difokuskan melalui tiga pilar yaitu pilar Penguatan Ekonomi Syariah, Penguatan Sektor Keuangan Syariah untuk Pembiayaan dan Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi," ungkapnya.

Sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan industri keuangan syariah, Bank Indonesia telah menginisiasi kegiatan International Syaria Economic Festival (ISEF) yang pelaksanaannya telah dibuka secara resmi melalui kegiatan Kick Off oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada 7 Agustus 2020 lalu. "Kick Off tersebut diiringi dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai rangkaian kegiatan Road to ISEF," ungkap dia.

Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr H. Sugeng mengemukakan Indonesia memiliki empat sektor potensial sebagai sumber pengembangan industri halal nasional. Sebut saja, sektor pertanian (*integrated farming*), industri makanan dan fesyen, energi terbarukan (*renewable ener-*

gy), dan pariwisata halal (halal tourism).

"Pengembangan sektor potensial tersebut dilakukan melalui pendekatan rantai nilai halal (halal value chain), yaitu pemberdayaan dan pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif, termasuk memperkuat digitalisasi UMKM Syariah (on boarding UMKM) untuk memperluas akses pasar dan pembuatan kanal pembayaran digital melalui QRIS atau QR Indonesian Standard," jelas Sugeng.

Nah, rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan FESyar Virtual Sumatera 2020 meliputi *Sharia Economic Forum* dan *Sharia Economic Fair*. *Sharia Economic Forum* merupakan platform berupa webinar yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi syariah, meningkatkan pendalaman pasar keuangan syariah/pemberdayaan *Islamic Social Finance* serta meningkatkan edukasi/kurikulum ekonomi dan keuangan syariah. Webinar edukatif ini melibatkan Kepala Departemen dan/atau Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera sebagai *keynote speaker* serta narasumber dan moderator dari tokoh-tokoh nasional, akademisi dan pelaku usaha yang ahli di bidangnya.

Lantas *Sharia Economic Fair* merupakan showcase program ekonomi dan keuangan syariah yang bertujuan sebagai sarana sosialisasi/edukasi/diseminasi, serta menumbuhkan wirausaha syariah. Rangkaian kegiatannya antara lain virtual expo dengan menampilkan UMKM unggulan di bidang fashion, food, integrated farming dan renewable energy. Selain itu, diselenggarakan juga kegiatan tabligh akbar, talkshow, dan berbagai perlombaan yang melibatkan narasumber nasional dan juri ternama antara lain, Prof Din Syamsuddin, Nycta Gyna, Itang Yunasz, Armand Maulana, Cakra Khan dan Jenahara.

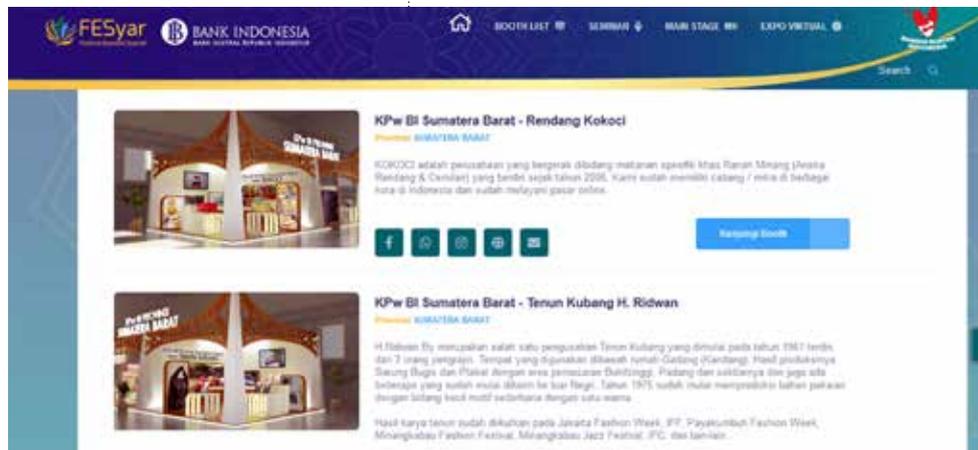
Kegiatan FESyar Regional Sumatera 2020 yang berlangsung secara virtual selama tujuh hari ini, diharapkan memicu diskusi potensi, perkembangan dan tantangan serta menentukan model business linkage yang dapat diterapkan dalam mendorong regional Sumatera sebagai *Islamic Economic Hub*. Termasuk mempertemukan pemasok dan produsen, produsen dan distributor, produsen dan konsumen, maupun investor pada industri halal nasional.

Ini sejalan dengan konteks wilayah Sumatera yang berbatasan dengan berbagai negara, seperti Singapura dan Malaysia, sehingga diharapkan dapat terjadi hubungan perekonomian yang lebih erat. Kegiatan Fesyar difokuskan untuk menampilkan sekaligus mendorong pe-

ngembangan usaha syariah melalui halal value chain, ekonomi pesantren, UMKM dan korporasi.

Selain itu, juga sebagai sarana edukasi dan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui seminar, talkshow, tabligh akbar yang diharapkan dapat mendorong halal *lifestyle* yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ZISWAF.

Dipandu oleh Ilham Suwardi, turut hadir dalam acara pembukaan ini antara lain Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Anggota Forkopimda Sumbar, Asisten Gubernur Bank Indonesia beserta para pimpinan satuan kerja di Bank Indonesia, Kepala Kementerian Agama dan Ketua MUI Sumbar, Kepala Kanwil Ke-



**MC** Gubernur Sumbar Prof Dr H Irwan Prayitno SPsi, MSc, dalam sambutannya menyatakan sangat mendukung dan berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menunjuk Sumbar sebagai host utama meskipun secara FESyar regional Sumatera 2020 berlangsung secara virtual. "Tentu secara khusus, kami di Sumatera Barat melihat FESyar ini sangat cocok, sangat tepat dengan keadaan, adat, budaya, kondisi yang ada di Sumatera Barat", ujarnya.

menag Sumbar, Kepala Perwakilan OJK Sumbar, Ketua IAEI, Pimpinan Perbankan Sumbar, Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan NU, Ketua Baznas Sumbar, Ketua dan Pengurus mess Sumbar dan Padang, serta stakeholder di Sumatera.

Gubernur Sumbar Prof Dr H Irwan Prayitno SPsi, MSc, dalam sambutannya menyatakan sangat mendukung dan berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah menunjuk Sumbar sebagai host utama meskipun secara FESyar regional Sumatera 2020 berlangsung secara virtual. "Tentu secara khusus, kami di Sumatera Barat melihat FESyar ini sangat cocok, sangat tepat dengan keadaan, adat, budaya, kondisi yang ada di Sumatera Barat", ujarnya.

Sumatera Barat, lanjutnya, adalah provinsi yang di dalamnya mengandung filosofi dan falsafah Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah (ABS SBK). "Jadi, ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat kita terkait dengan ekonomi syariah" kata Gubernur yang akan melepas jabatannya 10 tahun penuh itu. ♦



Delegasi Musiad Bertemu Presiden Erdogan

# TURKI UNDANG PENGUSAHA INDONESIA IKUT PAMERAN DAGANG

Asosiasi Pengusaha dan Industrialis Independen Turki MUSIAD (Müstakil Sanayici ve Isadamlan Dernegi) kembali menggelar MUSIAD Expo. Event internasional yang akan berlangsung selama empat hari (18-21 November 2020) ini juga kembali mengundang pengusaha Indonesia termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor untuk mengikuti pameran dagang tersebut.



Presiden MUSIAD Indonesia, Doddy Cleveland Hidayat Putra dan Duta Besar Republik Turki untuk Republik Indonesia, H.E. Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç.

Presiden Musiad Indonesia, Doddy Cleveland Hidayat Putra mengungkapkan momen ini akan menjadi sentrum utama bertemunya para pengusaha lintas negara dan kawasan Asia-Eropa.

"Semoga Musiad Indonesia dapat turut menghimpun para pelaku usaha dan industri nasional untuk turut memaksimalkan peningkatan interaksi perdagangan sekaligus kerjasama bisnis strategis kedua negara," katanya melalui proposal Musiad Expo 2020.

Kehadiran Musiad di Indonesia sejak tahun 2019 terus mengalami progress baik dalam membangun kolaborasi kerjasama jangka menengah dan panjang ditingkat nasional baik dengan pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan (Kemendag) dan kementerian luar negeri (Kemlu) sekaligus beberapa pemerintah daerah baik Pemprov dan Pemda. Serta dengan badan khusus pengembangan ekonomi



Stand

seperti Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Kadin, dan HIPMI.

“Musiad sebagai organisasi Asosiasi Pengusaha Bisnis dan Industrialis Independen yang Turki dan telah memiliki cabang di 105 negara termasuk Indonesia akan menjadi bagian utama yang akan memajukan platform ekonomi dan perdagangan kedua negara,” ungkap dia.

Sementara itu, Koordinator Ellis Create, lembaga yang menjembatani pengusaha Indonesia berpartisipasi dalam Musiad Expo 2020, Ellis Sukma mengungkapkan bahwa kegiatan yang biasanya dihadiri oleh pelaku bisnis dari 125 negara ini akan diisi dengan acara pameran dagang, forum bisnis antarperusahaan (B2B), konferensi bisnis (business gathering), dan gelar budaya bangsa, dan konferensi bisnis.

dia juga mengungkapkan bahwa kegiatan pameran sendiri memang berlangsung dari tanggal 18-21 November. Namun para peserta dari Indonesia akan diberangkatkan pada tanggal 14 November dan kembali ke tanah air 24 November 2020.

“Pameran dagang internasional ini menjadi peluang bagi pengusaha untuk penetrasi pasar Turki dan sekitarnya. Selain mengikuti pameran, para peserta dari Indonesia kami buat agenda lainnya sehingga keberadaan mereka di Turki tidak hanya sekedar mengikuti pameran,” kata Ellis Sukma.

Lebih lanjut Elis mengungkapkan bahwa Musiad Expo Trade Fair 2020 ini akan berlangsung di Tuyap Fair, Convention

and Congress Center, Istanbul.

Acara dua tahunan ini yang pada 2020 berlangsung ke-18 kalinya, kata dia, biasanya dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ungkapnya Ellis, sejumlah pengusaha Indonesia sudah berpartisipasi dalam pameran yang diikuti ribuan pengusaha asing dan dalam negeri Turki sendiri.

Untuk pengusaha Indonesia yang berminat, tinggal hitung biayanya saja. “Relatif terjangkau, sekitar Rp33 juta saja. Biaya Sudah termasuk stand pameran 3 x 3 meter persegi dan tiket pergi pulang Jakarta-Istanbul dengan visa Turki, akomodasi hotel bintang 4/5, transportasi lokal plus makan dan minum, tiket masuk Musiad Expo, B2B Meeting, Kunjungan Bisnis, Tiket Wisata, Guide, Buku Delegasi Elektronik, Sticker Bagasi, dan Sertifikat,” papar Ellis.

Dalam Musiad Expo ke-17 pada 2018 lalu, sejumlah perusahaan dan UMKM nasional berpartisipasi di pameran dagang itu. Antara lain mempromosikan lada putih berau, kopi gayo aceh, gula aren, gula merah, kerajinan tangan dan pertemuan bisnis *one on one* dengan pengusaha Turki.

Sedangkan perusahaan yang berpartisipasi antara lain PT Biru Marmara Group (BMG/General Trading-Edukasi), PT Nusantara Indah Tunggal (Property/Perdagangan Umum), PT Samara Insan Sentosa (Property, Kontraktor, Pengembang Kawasan Industri), PT Bijin Kuminta Mutiara (Pam Oil, Plantation, Trading), PT Chatada (mainan anak), PT Haula Sejahtera (Mainan Pendidikan dan Edukasi Anak-anak). ♦



## AGENDA KEGIATAN MUSIAD EXPO 2020 UNTUK PESERTA DARI INDONESIA

1. **14 November: Keberangkatan dari Jakarta menuju Istanbul.**
2. **15 November: Ketibaan Delegasi Wirausaha Ke Istanbul Turki, Kunjungan ke KJRI Istanbul, Turki (Landing langsung persiapan kunjungan KJRI check In Hotel).**
3. **16 November: Perjalanan pergi ke Bursa Tour Bursa PP. 17 November: Kunjungan ke MUSIAD Pusat persiapan Expo (Pagi kunjungan forum Expo).**
4. **18-21 November: MUSIAD EXPO 2020, Expo, B2B, Forum Bisnis. Festival Budaya (In Program Four Day Exhibition) Jadwal Menyesuaikan.**
5. **22 November: Kunjungan bisnis, B2B, Meeting (Noted bagi yang akan gabung di kenakan biaya tambahan sebesar Rp.3.000.000) Bagi yang tidak ikut acara bebas untuk tour Istanbul.**
6. **23 November: Istanbul tour dan persiapan kepulangan delegasi pengusaha Indonesia ke Tanah Air (Akan ada tour Istanbul City).**
7. **24 November: Pulang dan tiba di Indonesia.**

# WASPADA KOMUNIS ITU POSITIF DAN HARUS!

Tanggal 30 September, dikenang sebagai salah satu hari kelam dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Di hari itulah banyak jenderal, tokoh bangsa dan agama yang dibunuh oleh kelompok orang berideologi Komunisme. Mereka tergabung dalam sebuah partai yang disebut PKI atau Partai Komunis Indonesia.



**Oleh: Shamsi Ali Al-Kajangi**

Diaspora Indonesia di USA

**S**aya tidak perlu lagi membahas siapa PKI, ideologi dan agendanya. Karena saya yakin semua anak bangsa yang memiliki kepedulian tahu, paham dan sadar akan apa yang pernah terjadi dengan PKI di negeri ini.

Yang ingin saya sampaikan hanya sebuah kewaspadaan (al-hadzar). Sikap yang harusnya terbangun oleh setiap putra-putri bangsa. Bahwa ada masa di mana peristiwa kelam itu boleh saja terulang kembali. Sebab sejarah kerap terulang, walau dalam warna dan bentuk yang berbeda.

Masihkah dan perlukah diwaspadai?

Ada sebagian yang mengatakan bahwa isu PKI atau komunisme harusnya tidak lagi perlu dibahas atau diributkan. Beberapa alasan yang disampaikan, antara lain, bahwa ideologi Komunisme telah selesai (berakhir).

Dengan ambruknya Uni Soviet seolah paham komunisme juga telah runtuh. Bahkan dengan perubahan konstalasi dunia, di mana Rusia dan Amerika dengan aliansi Uni Eropa mengakhiri perang dingin, juga berarti ideologi Komunis telah berakhir.

China yang dikenal sebagai negara Komunis juga ternyata mengalami "shifting" atau pergeseran dari komunisme kepada paham yang nampaknya lebih dominan secara kapitalisme dan liberalisme. China semakin terbuka secara ekonomi.

Perkiraan di atas nampaknya terlalu menyederhanakan per-

masalah. Karena sesungguhnya isu Komunis dalam konteks Indonesia tidak harusnya selalu dikaitkan dengan Rusia atau China. Tapi memiliki tendensi pemikiran dan karakternya sendiri.

Selain itu, ideologi itu adalah faham atau pemikiran yang mempengaruhi karakter. Dan karenanya ideologi tidak selalu bubar dengan bubarnya sebuah institusi, termasuk organisasi atau negara.

Ideologi atau faham biasanya akan nampak melalui gejala-gejala (symptoms) yang kemudian berkembang dalam bentuk karakter dan aksi. Gejala ini terkadang sangat halus, sering menipu, bahkan tidak jarang dibungkus oleh teori-teori atau konsep-konsep yang menawan.

Saya jadi teringat kenapa Menteri Agama begitu "obsessed" dengan isu radikal? Tentu karena ada gejala-gejala, yang boleh jadi dicurigai sebagai gejala-gejala radikalisme. Sehingga berdasarkan gejala itu sang Menteri kemudian menghembuskan isu "radikal" agar terbangun kewaspadaan.

Masalahnya kemudian, kenapa ketika isu PKI dihembuskan berdasarkan gejala-gejala untuk membangun kewaspadaan justeru dituduh "mengganggu" bahkan membahayakan pemerintahan? Sehingga usaha-usaha mereka yang mengingatkan bangsa ini untuk waspada dihalangi di mana-mana.

Saya menilai ini perilaku paradoks dari kekuasaan. Saya justeru khawatir jika perilaku "unfair" ini justeru menjadi bagian dari symptom yang ada. Semoga saja saya salah.

Perlakuan "ketidakadilan" (unfair treatment) kekuasaan itu juga terlihat dalam menyikapi kelompok-kelompok yang dianggap mengancam negara atau ideologi negara. Salah satunya sebagai misal HTI.

Saya melihat ada sikap yang berbeda dari kekuasaan dalam menyikapi kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman itu. Ada yang ditindak dan dibumi hanguskan. Tapi ada yang seolah dirangkul dan dilindungi.

Tentu ini semakin membangun kecurigaan itu, dan pastinya menjadikan Umat ini semakin waspada. Kenapa ancaman yang dikaitkan dengan agama begitu dibenci? Sementara ancaman ideologi yang anti agama seolah biasa, bahkan serasa mendapat perlindungan. Saya khawatir sekali lagi, jangan-jangan ini jadi bagian dari symptom itu sendiri.

## Gejala-gejala itu...

Sebuah gejala tentunya bukannya kesimpulan, sampai masanya bisa dibuktikan. Gejala hanya jembatan menuju kepada realita. Dan karenanya sikap yang dibangun bukanlah "konklusi" (kesimpulan). Tapi sekali lagi, lebih kepada membangun kewaspadaan.

Sebagai ilustrasi saja. Jika saat ini saya terbang kembali ke Indonesia, pastinya setiba di Bandara Soekarno-Hatta suhu badan saya akan dicek. Kalau ternyata temperatur badan saya lebih dari normal, maka berarti saya ada "gejala" Covid.

Tapi tingginya suhu badan itu belum tentu sebuah "kesimpulan" jika saya positif Covid. Namun demikian karena suhu badan tadi, maka wajar saja kalau saya dikarantina hingga ada pembuktian jika saya negatif atau memang positif Covid.

Di sinilah urgensi kewaspadaan terhadap gejala-gejala PKI itu. Karena dari gejala itulah nantinya akan nampak (terbukti) apa benar atau tidak benar jika memang PKI menggeliat di negeri ini.

Di bawah ini saya ingin menyebutkan beberapa gejala yang bisa menjadi perhatian, sekaligus kewaspadaan bangsa ini.

Pertama, kebanggaan anak keturunan dan keluarga mantan pelaku di tahun 1965. Kesalahan memang tidak diwariskan. Karenanya keturunan PKI tidak harus ikut bertanggung jawab dengan dosa orang-orang tua mereka.

Yang menjadi masalah kemudian adalah keterbukaan mereka dengan kebanggaan itu. Jika PKI adalah dosa besar dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, lalu apa yang menjadikan mereka bangga dengan dosa besar itu?

Kebanggaan terbuka atas dosa besar itu

dan Hiroshima. Demikian pula Jerman maju karena sejarah kekalahan mereka di perang dunia kedua.

Maka upaya penghapusan sejarah PKI dicurigai sebagai upaya penina bobokan anak-anak bangsa agar tidak lagi paham dan peduli dengan peristiwa itu.

Saya diingatkan bagaimana kehebatan Amerika dalam membangun imej sejarah itu. Salah satunya adalah peristiwa 9/11 yang kemudian dislogankan: *we forgive, but never forget*.

Dalam kasus PKI, bahkan saat ini ada upaya-upaya membalik kenyataan seolah Komunislah yang korban. Tujuannya melemparkan kesalahan kepada TNI dan



justeru menjadi salah satu gejala atau indikasi tumbuhnya kembali ideologi yang mengantar kepada prilaku dan aksi PKI saat itu. Dan ini perlu diwaspadai.

Kedua, upaya penghapusan sejarah PKI. Sejak 2018 lalu pelajaran sejarah PKI ditiadakan dari sekolah-sekolah di Indonesia.

Selain penghapusan pelajaran sejarah PKI, juga pelarangan atau minimal peniadaan urgensi menonton film PKI yang menggambarkan kekejaman mereka.

Semua bangsa besar itu ada karena kebesaran sejarah yang mereka ketahui. Jepang maju karena sejarah perang Dunia kedua yang meluluh lantahkan Nagasaki

MC

*Sebuah gejala tentunya bukanlah kesimpulan, sampai masanya bisa dibuktikan. Gejala hanya jembatan menuju kepada realita. Dan Karenanya sikap yang dibangun bukanlah "konklusi" (kesimpulan). Tapi sekali lagi, lebih kepada membangun kewaspadaan.*

Umat Islam sebagai bagian dari upaya marginalisasi dua backbones (tulang punggung) bangsa itu.

Ketiga, meningginya serangan-serangan terbuka kepada Ulama dan institusi agama (baca Islam). Dalam sejarahnya hanya ideologi yang anti agama akan menyerang agama secara terbuka.

Telah banyak ulama dan ustaz-ustaz yang diserang. Mungkin yang paling heboh baru-baru ini adalah serangan kepada Syekh Ali Jaber.

Baru saja sebuah masjid di Tengerang dirusak dan dicoret-coret oleh sekelompok orang dengan kata-kata "anti Islam". Jika

serangan itu hanya kepada para ulama, boleh jadi karena memang ada ulama yang keras. Tapi ini justru institusi agama, bahkan agamanya itu sendiri begitu dibenci. Benci ulama boleh jadi karena perbedaan politik. Tapi benci agama dan institusi agama? Siapa lagi kalau bukan mereka yang memang anti agama?

Keempat, terjadi pelemahan institusi pertahanan negara. Tentu dalam hal ini TNI menjadi target utama. Saya tidak membahas secara vulgar dan detail masalah ini. Saya hanya berharap agar kita semua mencoba menganalisa kejadian-kejadian dalam tubuh TNI tahun-tahun terakhir.

Kelima, proses pembangunan ekonomi yang massif, tapi sangat "centralized" pada segmen masyarakat tertentu. Pembangunan infra struktur-infra struktur tidak mengarah kepada keberpihakan kepada rakyat. pembangunan itu seolah menjadi hiburan sesaat bagi rakyat luas.

Hal itu akan nampak ketika melihat kepada pembangunan sektor pertanian. Kepemilikan lahan di negara Indonesia diakui terkonsentrasi pada segmen masyarakat tertentu. Sementara rakyat luas semakin termarginalkan dengan masa depan yang semakin suram.

Keenam, gerilya politik yang tidak lagi malu-malu. Jika diperhatikan secara seksama perpolitikan di Indonesia akan nampak dengan sendirinya bahwa ada permainan cantik, tapi terkadang kasar, dalam marmajinalkan kekuatan Umat dan penduduk mayoritas Indonesia.

Partai-partai yang berwawasan keislaman dan kerakyatan akan dipaksa atau terpaksa untuk melebur dengan kekuatan besar. Pemaksaan itu sering dengan cara yang cantik. Tapi sering juga dengan kekerasan politik dan intimidasi.

Gerilya politik ini kemudian tanpa malu-malu mencoba untuk melakukan ronrongan kepada ideologi negara, Pancasila. Upaya mengganti Pancasila melalui RUU HIP jelas merupakan demonstrasi yang terbuka dari pihak-pihak yang anti negara. Dan itu melalui gerilya politik tanpa suncan lagi.

Ketujuh, "hidden player" atau pemain terselubung ada di semua negara. Bahkan biasanya mereka bukan sekedar pemain. Justeru mereka adalah "hidden power" (kekuatan atau kekuasaan di balik tirai).

Sebagai contoh saja. Di Amerika ada yang kita kenal dengan "kekuatan lobby". Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di negara ini lobby terkuat adalah lobby Yahudi Israel. Inilah yang menjadikan kenapa semua pemimpin negara ini nampaknya harus atau diharuskan mendukung Israel?

**MC** *Partai-partai yang berwawasan keislaman dan kerakyatan akan dipaksa atau terpaksa untuk melebur dengan kekuatan besar. Pemaksaan itu sering dengan cara yang cantik. Tapi sering juga dengan kekerasan politik dan intimidasi.*



Dalam sejarah Indonesia juga tidak terlepas dari hidden player atau hidden power ini. Ada masa-masa di zaman Orde Baru Umat Kristiani berkuasa. Anggaplah di masa keemasan Murdani.

Di akhir masa Soeharto ada penghijauan institusi negara dengan pemain-pemain yang tergabung dalam organisasi ICMI. Di saat itulah seorang Habibie naik ke puncak kepemimpinan bangsa sebagai Wapres, lalu kemudian menjadi Presiden RI.

Saya khawatir bahwa pada saat ini di Indonesia ada "hidden player" atau "hidden power" yang mewarnai, bahkan mengendalikan arah kebijakan negara. Siapa mereka itu dan

bagaimana eksistensinya? Di sinilah urgensinya kita membangun kewaspadaan itu.

Kedelapan, kekuatan luar (*foreign power*) atau minimal pemain luar (*foreign player*). Kenyataan ini kerap kali tidak disadari oleh banyak orang. Apalagi kalau pihak luar ini berhasil menggoda pemain dalam yang punya kepentingan-kepentingan sempit.

Untuk Indonesia, hal ini bukan baru dan sesungguhnya tidak juga mengejutkan. Upaya melemahkan bahkan memecah belah NKRI telah lama dimainkan oleh pihak-pihak luar yang punya kepentingan.

Dalam kasus Indonesia, seperti yang disebutkan tadi, ada dua segmen bangsa yang menjadi target utama mereka. Yaitu

TNI dan Umat Islam.

TNI akan ditampilkan dengan wajah buruk, zholim, anti HAM, dan seterusnya. Yang kemudian dilanjutkan dengan lobi-lobi internasional untuk menekan, baik ke dalam negeri dengan mengurangi anggaran, maupun keluar negeri dengan boikot. Di mana lalu TNI pernah diboikot untuk membeli senjata atau pesawat Tempir F-16 dari Amerika misalnya.

Di antara sekian foreign player (pemain luar) itu adalah ETAN (*East Timor Action Network*). Salah satu aktifisnya yang kita kenal di Indonesia dulu adalah Sidney John.

ETAN telah lama bekerja untuk merusak NKRI dengan melemahkan TNI dan Umat Is-



lam. Dari zaman Timor Timur, Aceh, dan juga Papua. Mereka berhasil di Timor Timur. Di Aceh dikalahkan oleh kelihaihan pak JK menyelesaikan kasus Aceh dengan baik.

Kini ETAN bergerilya untuk meronrong NKRI melalui Papua Merdeka. Sangat aktif dan mendapat dukungan dari beberapa negara yang punya kepentingan melihat Indonesia pecah.

ETAN kini juga memasuki isu PKI di Indonesia. Salah satu propaganda mereka adalah membuat film tentang kasus 30 September dengan membalik realita. Film yang mereka buat ditampilkan kekejaman TNI dan Umat Islam. Sementara PKI adalah korban kekerasan kedua segmen bangsa

MC

*Dan karenanya jangan dianggap gangguan, apalagi ancaman terhadap negara dan pemerintah. Sebaliknya justru harus diapresiasi dan didukung. Karena keselamatan negara dan bangsa adalah tanggung jawab semua elemen bangsa.*

(TNI-Islam) itu.

Hal itu kemudian mereka hiasi dengan memplintir seolah kebangkitan Umat menentang Komunisme sebagai bentuk intoleransi. Maka ibarat bertepuk tangan, kedua telapak tangan itu, dalam negeri dan luar negeri, melahirkan irama tepukan "radikalisme".

## Penutup

Sebelum menutup goresan ini, saya juga ingin mengatakan bahwa kewaspadaan itu bukan menambah beban atau menyirama bensin ke dalam kobaran api. Saya justru ingin menjadikan kewaspadaan ini sebagai jalan menyatukan langkah dan membangun rekonsiliasi kebangsaan.

Maka tentunya harus juga diakui adanya kemungkinan "mistreatments" yang terjadi ketika itu. Boleh jadi memang kaena dorongan politik, dan kepentingan lainnya termasuk kepentingan global saat itu, ada perlakuan-perlakukan yang salah kepada pihak-pihak tertentu.

Tapi ini harusnya tidak menjadi pembenaran untuk merubah narasi peristiwa, apalagi membalik realita yang sesungguhnya. Komunisme dan PKI bagaimanapun adalah musuh bangsa dan negara Indonesia.

Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa bangkitnya sebagian anak bangsa untuk membangun kewaspadaan terhadap ancaman ideologi PKI ini tidak lain karena kecintaan, nasionalisme, dan patriotisme mereka terhadap negara.

Dan karenanya jangan dianggap gangguan, apalagi ancaman terhadap negara dan pemerintah. Sebaliknya justru harus diapresiasi dan didukung. Karena keselamatan negara dan bangsa adalah tanggung jawab semua elemen bangsa.

Secara khusus bagi umat Islam, semangat menentang kemungkinan bangkitnya PKI adalah karena didorong oleh kesadaran bahwa Islam dan negara Indonesia adalah dua hal yang senyawa. Kedua entitas itu tidak akan bisa dipisahkan. Mengobok-obok negara ini adalah juga mengobok-obok iman/Islam itu sendiri.

Karenanya saya ingin berpesan kepada putra-putri bangsa, khususnya Umat Islam agar bersatu menjaga NKRI. Jangan mudah dipecah belah oleh "hidden player" tadi. Jangan ada yang mudah dirangkul, lalu yang lain ditendang.

Kekuatan negara Republik Indonesia ada pada kebersamaan TNI dan Umat. Hal yang telah dibuktikan sepanjang sejarah perjalanan negeri ini. Merdeka! ♦

*(Tulisan ini pendapat pribadi. Tidak mewakili siapa-siapa dan apapun. Boleh setuju dan boleh juga tidak setuju)*



## Yvonne Ridley

# JURNALIS INGGRIS YANG MASUK ISLAM SETELAH DITAHAN TALIBAN

Dia adalah seorang jurnalis Inggris yang pernah menjadi ketua Dewan Nasional Partai Respect (yang sekarang sudah tidak ada). Dia juga merupakan pendukung vokal Palestina. Tak hanya itu, dia juga seorang kritikus fanatik terhadap Zionisme dan penggambaran media Barat dan kebijakan luar negeri dalam Perang Melawan Teror.

**S**elama kariernya sebagai wartawan, Yvonne telah melakukan tugasnya ke seluruh dunia Muslim serta Amerika, Eropa dan Australia. Hingga dia disebut sebagai 'Sesuatu yang dekat dengan selebriti di dunia Islam' oleh jurnalis Rachel Cooke. Dan tahun 2008, namanya terpilih sebagai 'Wanita Paling Dikenal di dunia Islam' oleh Islam Online

### Siapakah Yvonne Ridley?

Wanita kelahiran Stanley, County Durham, Inggris ini memulai kariernya di sebuah surat kabar lokal yang merupakan bagian dari Durham Advertiser Series (Seri Pengiklan Durham).

Dari sana, dia pindah ke Newcastle

**MC** *Dari sana, dia pindah ke Newcastle upon Tyne dan bekerja untuk surat kabar The Sunday Sun dan Newcastle Journal untuk Surat Kabar Regional, Thomson, serta di The Northern Echo yang merupakan bagian dari grup Westminster Press.*

upon Tyne dan bekerja untuk surat kabar The Sunday Sun dan Newcastle Journal untuk Surat Kabar Regional, Thomson, serta di The Northern Echo yang merupakan bagian dari grup Westminster Press.

Sebagai jurnalis, Yvonne telah bekerja di banyak media, mulai dari *The Sunday Times*, *The Independent*, *Observer*, *Daily Mirror*, hingga *News of the World*. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Editor dan Editor khusus di Wales (untuk edisi Minggu), dan menjadi Ketua Reporter ketika medianya 'Sunday Express' mengirimnya ke Afghanistan setelah peristiwa 9/11.

Dalam satu wawancara, dia menyebutkan memiliki "Reputasi sebagai 'Patsy Stone of Fleet Street' yang dengan senang hati ditinggalkannya setelah dia masuk Is-

lam". Kecintaannya pada gerakan sayap kiri, anti-imperialis mendahului pertobatannya. Dia kemudian bergabung dengan Partai Buruh saat remaja sebelum akhirnya mengundurkan diri karena keputusan untuk menginvasi Irak pada Maret 2003.

### Ditangkap Taliban

Saat bekerja untuk 'Sunday Express', Yvonne dikirim ke Afghanistan. Pada hari-hari sebelum dimulainya invasi pimpinan AS ke Afghanistan, Yvonne yang visanya ditolak memutuskan untuk mengikuti contoh wartawan BBC, John Simpson, yang melintasi perbatasan secara ilegal dengan

**MC** Penerbit Express Newspapers, Richard Desmond, kemudian mengirim tim negosiator untuk berbicara langsung dengan pejabat Taliban di Kedutaan Besar Afghanistan di Islamabad, Pakistan. Segera menjadi jelas, bahwa rezim Taliban tidak menginginkan uang atau bantuan, melainkan bukti bahwa Yvonne memang benar-benar seorang jurnalis handal.

membuatnya ditahan, dan dijatuhi hukuman mati. Meski tuduhan sebagai mata-mata tidak terbukti, namun setidaknya dia di penjara karena secara ilegal memasuki Afghanistan.

Penerbit Express Newspapers, Richard Desmond, kemudian mengirim tim negosiator untuk berbicara langsung dengan pejabat Taliban di Kedutaan Besar Afghanistan di Islamabad, Pakistan. Segera menjadi jelas, bahwa rezim Taliban tidak menginginkan uang atau bantuan, melainkan bukti bahwa Yvonne memang benar-benar seorang jurnalis handal.

Komisaris tinggi Inggris untuk Pakis-



mengenakan burqa (baju Muslim Afghanistan).

Yvonne masuk Afghanistan pada 26 September 2001, dan menghabiskan dua hari menyamar di Afghanistan. Pada 28 September 2001, saat dia kembali setelah bepergian dengan seorang pemandu, tiba-tiba Keledai yang dia tumpangi dihentikan dan kameranya dilihat oleh seorang tentara Taliban. Yvonne pun ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata, hingga

tan, Hilary Synnott, bertemu dengan duta besar Afghanistan di Islamabad, Mullah Abdul Salam Zaeef, dan meminta pembebasan Yvonne. Setelah 11 hari ditahan, pada 8 Oktober 2001 Yvonne dibebaskan dan dikawal menuju perbatasan, di mana dia diserahkan kepada pihak berwenang Pakistan. Karena dikhawatirkan Yvonne akan terancam oleh pemboman sasaran Afghanistan sebagai bagian dari Perang di Afghanistan yang telah dimulai



pada hari sebelumnya.

Yvonne mengungkapkan, bahwa selama ditahan dia menyimpan buku harian yang dia sembunyikan di dalam kotak tabung pasta gigi di dalam pembungkus sabun. Selama ditahan, Yvonne juga telah melakukan mogok makan dan menggambarkan pengalamannya sebagai sesuatu yang menakutkan, meski secara fisik dia tidak terluka. Terungkap bahwa selama interogasi untuk membuktikan identitasnya, Yvonne telah menghina para penculiknya.

Setelah dibebaskan, pembimbingnya, Jan Ali dan Nagibullah Muhmand, serta putrinya yang berusia lima tahun, Basmena, ditahan di penjara di Kabul. Setidaknya tiga kerabat Muhmand juga ditangkap karena membantu Yvonne setelah Taliban mengembangkan hasil foto-foto di kameranya. Tapi kemudian semua dibebaskan tanpa dakwaan atau kerugian.

Yvonne telah membuat beberapa permohonan publik, termasuk satu melalui Pashto BBC dan Layanan Persia, yaitu mendesak Taliban untuk membebaskan para tahanan dengan alasan kemanu-



*Setelah dibebaskan, pembimbingnya, Jan Ali dan Nagibullah Muhmand, serta putrinya yang berusia lima tahun, Basmena, ditahan di penjara di Kabul. Setidaknya tiga kerabat Muhmand juga ditangkap karena membantu Yvonne setelah Taliban mengembangkan hasil foto-foto di kameranya. Tapi kemudian semua dibebaskan tanpa dakwaan atau kerugian.*

siaan yang sama, seperti yang diperlihatkan rezim kepadanya.

Yvonne kemudian mengatakan, bahwa dia berhati-hati untuk tidak merujuk langsung ke pria tersebut sebagai pembimbingnya, karena mereka sebelumnya telah setuju untuk tidak mengakui keterlibatan apa pun dalam peristiwa penangkapannya.

#### Masuk Islam

Dalam bukunya yang berjudul *'In the Hands of the Taliban'*, wanita kelahiran 23 April 1958 ini mengatakan, bahwa saat dirinya ditawan, dia diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang Taliban dan itu membuatnya kagum dengan kesopanan mereka. Semua pria yang berhubungan dengannya selalu menundukkan tatapan mereka kepadanya. Dan tentu saja, itu membuatnya bingung.

Pada awalnya, dia mengira bahwa mereka (orang-orang Taliban) akan mengeksekusinya, karena itu mereka tidak berani menatap matanya. Namun kemudian dia baru mengetahui, mengapa mereka tak

mau memandang pada dirinya. Ternyata, itu menunjukkan rasa hormat mereka pada seorang wanita.

Hal itulah yang akhirnya membuatnya kagum, sehingga saat di tahanan, Yvonne pun berjanji akan membaca Al-Quran dan mempelajari Islam jika mereka membebaskannya.

Memenuhi janji dan menetapkan apa yang dia gambarkan sebagai "latihan akademis". Yvonne kemudian benar-benar menepati janjinya untuk membaca Al-Quran, dan dia terkejut menemukan dimana, "Quran menjelaskan bahwa wanita itu setara dalam spiritualitas, nilai, dan pendidikan. Apa yang semua orang lupa adalah bahwa Islam itu sempurna; orang tidak."

Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2003, Yvonne masuk Islam. Dia mengklaim bahwa keyakinan barunya (yaitu Islam) telah membantu meninggalkan pernikahan yang rusak dan merangkul "keluarga terbesar dan terbaik di dunia (yaitu keluarga Islam)."

### Karier Selanjutnya

Setelah pindah agama, menjadi seorang Muslim, Yvonne mulai menyampaikan ceramah tentang masalah yang berkaitan dengan Irak, Israel, Afghanistan, Chechnya, Kashmir, Uzbekistan, wanita dalam Islam, Perang Melawan Teror, dan jurnalisme di Universitas di seluruh AS, Australia, Afrika Selatan, dan Timur Tengah.

Dia telah menulis dan berkontribusi terhadap sejumlah buku, di antaranya buku *'In The Hands of the Taliban'* dan *'Ticket to Paradise'*. Sebuah buku selanjutnya berjudul *'Torture: Does It Work'* diterbitkan oleh Military Press Studies pada tahun 2016.

Tahun 2019, dia menulis buku berjudul *'The Rise of the Prophet Muhammad: Don't Shoot the Messenger'* yang diterbitkan oleh akademisi *Cambridge Scholars Publishing*.

Yvonne Ridley adalah pelindung kelompok penekan yang berbasis di Inggris, *Cageprisoners* hingga Desember 2014. Dia juga Presiden Eropa dari *Persatuan*



**MC** Setelah pindah agama, menjadi seorang Muslim, Yvonne mulai menyampaikan ceramah tentang masalah yang berkaitan dengan Irak, Israel, Afghanistan, Chechnya, Kashmir, Uzbekistan, wanita dalam Islam, Perang Melawan Teror, dan jurnalisme di Universitas di seluruh AS, Australia, Afrika Selatan, dan Timur Tengah.

Wanita Muslim Internasional, dan Wakil Presiden Liga Muslim Eropa yang berbasis di Milan dan Jenewa.

Bungsu dari tiga bersaudara ini juga merupakan anggota dari Koalisi *'Stop War'* yang telah dia bicarakan di rapat umum, dan merupakan anggota Partai *Respect*, di mana dia mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen sebelum mengundurkan diri dari kepemimpinan dan dari partai pada awal 2014.

### Kehidupan Pribadi

Dalam kehidupan pribadinya, Yvonne telah menikah sebanyak lima kali. Pertama kali menikah ketika dia berusia 22 tahun; pernikahan keduanya, dengan seorang polisi, berlangsung tujuh tahun; suami ketiganya adalah Daoud Zaaroura, CEO Layanan Pengungsi Inggris Utara dan mantan kepala intelijen PLO, yang dia temui di Siprus, tempat dia bekerja untuk *'Sunday Sun'* yang berbasis di Newcastle, dan mereka memiliki seorang putri bernama Daisy Ridley, yang lahir pada tahun 1992. Sedangkan suami keempatnya, yang dinikahinya hingga 1999, adalah seorang pengusaha Israel, Ilan Her-mosh; dan suami kelimanya adalah orang Aljazair.

Tahun 2011, Yvonne pindah dan tinggal di Skotlandia, dan sejak itu menjadi anggota Partai Nasional Skotlandia (SNP), yang sebagian besar mendukung kemerdekaan Skotlandia. Dia juga seorang feminis dan sosialis.

### Penghargaan

Pada bulan Januari 2014, Yvonne dinominasikan untuk penghargaan *'Wanita Muslim Tahun Ini'* di ajang *British Muslim Awards*.

Pada Oktober 2019, dia juga dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas pekerjaannya dengan LSM *Protect the Rohingya*, ketika dia membantu tim pengacara Afrika Selatan mengambil pernyataan dugaan kejahatan perang dari pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar.

Yvonne juga dinominasikan untuk jasanya menolong tahanan wanita Suriah yang menjadi korban penyiksaan dan pelecehan saat ditahan oleh rezim Assad di Suriah. ♦mt/wikipedia

## 15 Tips Padu Padan Hijab

# ALA KOREAN STYLE

Dengan perkembangannya yang luar biasa, Korea saat ini tak hanya menjadi tren di dunia kecantikan, namun juga telah menjadi salah satu kiblat fashion dunia, terutama di Asia.

**O**utfit Of The Day (OOTD) ala Korea cenderung sederhana namun stylish dan terlihat fresh. Banyak yang beranggapan bahwa gaya fashion ala Korea identik dengan cute, seksi dan mini. Tapi nyatanya, ada beberapa gaya fashion ala Korea yang bisa Anda jadikan inspirasi, atau padu-padankan dengan hijab, sehingga bisa menjadi salah satu gaya fashion para hijabers.

Jadi, sekali lagi, buang jauh-jauh anggapan bahwa fashion ala Korea itu seksi dan mini. Anda mungkin lupa, bahwa pada musim dingin, beberapa outfit yang biasa digunakan perempuan Korea cenderung tertutup. Sehingga sangat aman dan bisa dijadikan referensi OOTD stylish bagi para hijabers Indonesia.

Saat ini, film dan drama-drama Korea telah banyak menghiasi pertelevisian Indonesia. Padu padan gayanya selalu keren dan membuat penampilan seorang wanita menjadi makin cantik dan elegan.

Tak hanya itu, saat ini, banyak juga kita temukan para selebgram atau selebriti yang bergaya ataupun berdandan atau berpenampilan ala perempuan Korea.

Hal itu sah-sah saja, bahkan Anda pun para hijabers bisa tampil dan berpenampilan seperti bintang-bintang Korea. Caranya mudah dan gampang, Anda hanya cukup dengan memadu-padankan gaya Korea yang Anda inginkan dengan hijab dan Aksesoris lainnya.

Berikut 15 Tips Padu Padan Busana Ala Korea yang Bisa Anda Coba:

### 1. Pilih Warna Terang

Bosan dengan hijab dan busana warna

pastel, abu-abu atau coklat? Untuk tampil bergaya ala Korean, Anda tak perlu ragu memadukan outfit dengan warna-warna terang, bahkan neon.

Hal itu, tak hanya akan membuat Anda terlihat keren, namun bergaya dengan busana warna terang akan membuat Anda tampil layaknya *street styler*, bahkan selebgram kekinian.

### 2. Busana Berlayer

Seperti diketahui, terdapat 4 musim yang berlaku di Negeri Ginseng, Korea, salah satunya adalah musim dingin. Di musim dingin ini, perempuan Korea biasanya akan mengenakan busana berlayer dalam berbagai warna.

Tak hanya warna pastel, bergaya dengan busana berlayer dan hijab dalam warna terang, akan membuat Anda tampil stand out di setiap kesempatan.

Dan mumpung telah memasuki musim hujan, tiru gaya *layered outfit* ala perempuan Korea dengan busana berwarna dan bermotif seperti gambar berikut ini.

### 3. Pinafore

Untuk penampilan hijab yang lebih unik, lucu dan menggemaskan, Anda



bisa memilih pinafore atau jumpsuit sebagai outfit sehari-hari. Padukan dengan inner berupa long sleeves bermotif garis-garis atau floral. Hal itu akan mendukung Anda untuk tampil menawan.

Pilihlah handbag yang elegan dan sneakers yang keren untuk memadukan gaya anggun dan kasual sekaligus trendy dan kekinian.

#### 4. Oversized Blouse atau Hoodie

Perempuan Korea juga dikenal dengan gaya busana yang serba 'oversize' alias longgar atau kelonggaran.

Kemeja, hoodie, jaket, blazer, hingga sweater oversize sudah bisa dipastikan akan membuat Anda langsung terlihat layaknya perempuan Korea.

Untuk tampil stunning, padukanlah hijab simpel Anda dengan atasan oversize, yang dipadu-padankan dengan celana jeans yang nyaman. Maka bisa dipastikan penampilan Anda akan luar biasa.

Jika Anda ingin gaya fashion ala Korea yang cenderung boyish. Maka Anda bisa memilih hoodie dengan warna-warna girly seperti pink, peach atau warna-warna pastel. Anda bisa memadukannya dengan celana jeans yang agak longgar, agar tetap sopan saat dipakai bersama hijab.

#### 5. Ragam Rok

Begitu banyak ragam rok yang ditawarkan di pasaran. Mulai dari rok plisket hingga rok tutu yang manis, dan itu bisa Anda padu padankan dengan hijab untuk mendapatkan gaya edgy yang tak membosankan. Untuk eksperimen yang lebih berani, padukan rok Anda dengan celana jeans biar semakin catchy

#### 6. Sweater Rajut dan Rok Plisket

Gaya fashion ala Korea lain yang bisa Anda contek adalah padu-padan antara sweater rajut dengan rok plisket. Pilih rok plisket dengan warna-warna netral supaya mudah dipadupadankan, misalnya seperti warna hitam, putih, gray atau coklat.

#### 7. Celana Kulot

Celana kulot dan palazzo menjadi fashion item andalan untuk Anda para hijaber, maupun para perempuan Korea.





Celana berwarna pastel yang dipadukan dengan statement blouse bisa membuat Anda tampil elegan dan menarik.

### 8. Stocking dan Kaus Kaki

Intinya, jangan pernah ragu untuk bereksperimen dalam berbusana, seperti yang kerap dilakukan oleh perempuan Korea. Memadukan *maxi dress*, rok plisket, hingga celana dengan stocking atau kaus kaki akan membuat Anda tampil kece seketika.

Tak melulu harus senada dengan warna hijab, pilih kaus kaki bermotif nyentrik untuk tampilan yang berbeda, itu juga tak kalah menariknya.

### 9. Statement shoes

Jangan pernah ragu untuk memilih jenis sepatu yang tak biasa, misalnya boots dan ugly sneakers. Pilihan sepatu ini bisa membuat Anda tampil keren seketika layaknya perempuan Korea. Bergaya dengan Korean hijab style seperti ini, akan membuat ootd (*outfit of the day*) Anda tak monoton dan membosankan.

### 10. Loose Chiffon Flowery Dress with Sweater Oversized

Salah satu gaya yang satu ini, sedang jadi tren di Korea. *Loose chiffon flowery dress 7/8* yang dipadu dengan *oversized sweater*.

Tambahkan boots untuk menutupi bagian kaki Anda. Maka, itu akan membuat penampilan Anda sangat keren dan unik.



### 11. Long Cardi

Untuk Anda yang memiliki t-shirt atau atasan tanpa lengan, Anda cukup memadukannya dengan celana panjang. Lalu tambahkan cardigan panjang untuk tampilan yang lebih manis tapi tetap sopan.

Kalau inner yang Anda gunakan adalah warna basic, maka Anda bisa memadukannya dengan cardigan panjang bermotif.

### 12. T-Shirt dan Celana Cargo

Bosan tampil girly, Anda bisa memadukannya dengan kaos oblong dan celana cargo. Anda juga bisa menambahkan deker tangan berwarna netral atau senada dengan hijab yang Anda kenakan.

Tambahkan belt supaya tampilan Anda semakin *stylish*.

### 13. Sweetshirts dan Celana Jeans

Gaya boyish ala Korea lainnya yang bisa membuat tampilan Anda simpel namun menarik adalah padu padan sweatshirts dengan celana jeans.

Pilih celana jeans berpotongan lurus, mom jeans atau boyfriend jeans agar terlihat seimbang dengan sweatshirts longgar yang Anda kenakan.

### 14. Overall

Untuk Anda yang ingin terlihat lebih cute, Anda bisa mengandalkan gaya fashion ala Korea dengan menggabungkan overall dan t-shirt atau sweatshirts.

Anda juga bisa memilih *overall jeans*

MC Intinya, jangan pernah ragu untuk bereksperimen dalam berbusana, seperti yang kerap dilakukan oleh perempuan Korea. Memadukan *maxi dress*, rok plisket, hingga celana dengan stocking atau kaus kaki akan membuat Anda tampil kece seketika.



agar mudah dipadupadankan atau overall dengan motif yang lucu seperti polkadot atau *checkered*.

**15. Statement Blazer**

Ketika Anda akan menghadiri sebuah acara formal, gaya fashion ala Korea yang satu ini, mungkin bisa Anda jadikan inspirasi atau andalan.

Gunakan *statement blazer* dengan

ukuran yang lebih longgar atau *oversize*, kemudian padukan dengan celana formal atau kulot. Maka dipastikan penampilan Anda akan terlihat rapi, modern dan elegan.

Sedangkan untuk acara yang semi formal, Anda masih bisa memadukan blazer dengan celana jeans seperti *skinny jeans* atau *straight jeans*. ♦/berbagaisumber, foto:Pinteres



## HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA

Islam sebagai agama universal, pada hakikatnya mampu memberi solusi bagi segala problematika umat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Dzat yang mengatur seluruh kehidupan, telah memberikan jaminan kemaslahatan didunia dan akhirat, bagi siapapun yang melakukan pemecahan terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat dengan 'terapi syariat' yang dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan dan aturan main yang telah ditentukan oleh agama.



**OLEH: KH. LUTHFI BASHORI**

Maka jaminan kemakmuran hidup, baik yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia, maupun kemaslahatan akhirat tiada lain adalah relevansi dari firman Allah yang artinya: "Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa kepada Allah, niscaya Kami bukakan kepada mereka segala macam keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun karena mereka mengingkari ayat-ayat/syariat Kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka

sendiri" (QS. al-A'raf - 96).

Syariat Islam, di samping sebagai solusi rabbani bagi kepentingan umat manusia, juga merupakan dustur atau undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang mana syariat Islam adalah suatu aturan yang diciptakan oleh Allah demi menjaga stabilitas kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Syariat Islam telah mengatur cara hidup manusia di seluruh aspek kehidupan, dari mulai yang terkecil semisal tata cara tidur yang baik, hingga urusan yang besar semisal bagaimana cara hidup menuju kenikmatan akhirat yang kekal abadi.

Dalam melaksanakan kewajiban bersyariat, ada dua macam yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Yaitu melaksanakan syariat yang bersifat Fardi (individu) serta syariat yang bersifat Jama'î (kolektif). Untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut:

Syariat Islam yang bersifat Fardi (individu), adalah kewajiban seorang muslim secara individu atau perorangan, contohnya kewajiban melaksanakan shalat, atau zakat, atau puasa atau haji, yang mana ibadah-ibadah tersebut apabila ditinggalkan oleh seorang muslim maka berdosa pribadinya. Sebaliknya apabila dikerjakan sesuai ketentuan, maka kewajibannya menjadi gugur, bahkan si pelaksana akan mendapat pahala.

Syariat Islam yang bersifat Jama'î (kolektif), adalah kewajiban umat Islam secara kolektif, contohnya, kewajiban melaksanakan shalat Jumat. Shalat Jumat tidak dianggap sah kecuali dilaksanakan secara kolektif. Bahkan apabila di suatu daerah yang dianggap sudah cukup syarat untuk melaksanakan shalat Jumat, namun tidak ada satupun yang melaksanakannya dari penduduk setempat, maka dianggap berdosa seluruh penduduknya.

Di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah banyak yang mengenal bahkan mengerjakan kewajiban-kewajiban bersyariat yang bersifat Fardi.

Sedangkan untuk melaksanakan kewajiban bersyariat yang sifatnya Jama'î, masih banyak yang meninggalkannya. Bahkan ada pula umat Islam yang dengan ekstrim menolaknya.

Kewajiban Jama'î yang belum dilaksanakan di Indonesia cukup banyak. Padahal, jika seluruh penduduk Indonesia tidak melaksanakannya maka berdosa mereka semuanya.

Di antara kewajiban tersebut, adalah melaksanakan hukum-hukum yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah yang bersifat kenegaraan, yaitu bersyariat Islam khususnya dalam kaitannya dengan hukum jinayat (pidana), seperti memberlakukan hukuman pidana cambuk bagi pemabuk, potong tangan bagi pencuri, dan hukuman ta'zir bagi pelanggaran lainnya yang disesuaikan oleh kebijaksanaan hakim, dan sebagainya sesuai dengan kaedah yang berlaku.

Kewajiban mengangkat seorang kepala negara dengan

perangkatnya sesuai ketentuan syariat, adalah salah satu kewajiban yang sangat urgen/vital yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia.

Dengan memilih kepala negara yang sesuai dengan syariat, akan mengantar Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Alquran dan Assunnah. Sehingga memungkinkan untuk membentuk lembaga-lembaga kenegaraan disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya lembaga peradilan dan kehakiman yang memberlakukan hukum fiqh dalam menangani seluruh per-

gaimana yang diwajibkan oleh Alquran, mengharuskan adanya Imam untuk memimpin pelaksanaannya serta wakil Imam. Dalam hal ini yang berhak bertindak sebagai Imam adalah kepala negara, atau diserahkan kepada wakil Imam, yaitu hakim yang ditunjuk dan diangkat oleh Imam.

Untuk itulah, selagi mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepala negara di Indonesia seperti yang berlaku saat ini, apalagi dengan adanya penolakan formalisasi syariat ke dalam hukum negara, maka tidak akan terlaksana kewajiban bersyariat semi-



masalah yang menyangkut urusan perdata maupun pidana.

Kewajiban memilih dan mengangkat kepala negara ini termasuk kategori kewajiban bagi umat Islam secara Jama'i, sehingga jika masyarakat Indonesia belum berusaha melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar, maka dianggap terus menerus berdosa kepada Allah, sampai terwujudnya perangkat pemerintah serta sistem kenegaraan yang sesuai dengan syariat Islam.

Di antara rentetan kewajiban memilih dan mengangkat kepala negara sebagaimana tersebut di atas, adalah bahwa kepala negara bertindak sebagai pelaksana utama hukum yang bersifat jama'i.

Contohnya, untuk melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, seba-



*Kewajiban memilih dan mengangkat kepala negara ini termasuk kategori kewajiban bagi umat Islam secara Jama'i, sehingga jika masyarakat Indonesia belum berusaha melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar, maka dianggap terus menerus berdosa kepada Allah, sampai terwujudnya perangkat pemerintah serta sistem kenegaraan yang sesuai dengan syariat Islam.*

sal potong tangan yang bersifat jama'i ini, sehingga berdosa seluruh masyarakat Indonesia, terutama para ulama dan tokoh agamanya yang telah mafhum terhadap permasalahan semacam ini, kecuali bagi mereka yang telah berjuang untuk merealisasikan apa yang tersebut di atas dengan secara konstitusional, sekalipun belum diberi keberhasilan oleh Allah SWT.

Untuk itulah perjuangan umat Islam di dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia belum usai, dan tidak ada kata 'final' di dalam memformat bentuk sistem pemerintahan Indonesia secara legal formal yang dibenarkan oleh undang-undang konstitusi, sehingga suatu saat terwujud negara Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan syariat Islam. Semoga! Wala-hualam bishawab. ♦



# HERMAN DERU HARAPKAN "FOKKUS" FOKUS SYIARKAN ISLAM

**Keberadaan ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ustadz dan Ustadzah (FOKKUS) Sumsel diharapkan dapat memperluas syiar dan dakwah Islam di tengah masyarakat, mengingat tugasnya yang sangat multifungsi.**

"**S**aya ucapkan selamat atas terbentuknya FOKKUS Sumsel. Saya tertarik forum ini karena fungsinya sangat mulia. Ustadz dan ustadzah dimaknai multifungsi, ada kalanya menjadi guru, penceramah, imam, atau sebagai penyelenggaraan pengurusan jenazah, pembaca doa, tahlil atau zikir," ucap Herman Deru saat menerima pengurus FOKKUS Sumsel periode 2019-2023 bertempat di ruang audiensi gubernur, Rabu (23/9).

Di kesempatan itu HD berharap FOKKUS Sumsel dapat membuat peraturan organisasi yang jelas kriteria seorang ustadz atau ustadzah.



Selain itu Herman Deru juga memberikan masukan agar anggota FOKKUS berlaku secara umum tidak hanya terbatas pada aliran tertentu saja. Mengingat FOKKUS terbentuk tidak lain tujuannya untuk syiar dan dakwah Islam

"Karena tujuan forum ini untuk syiar demi kemaslahatan umat. maka jelas yang ingin didapat bukan profit," harapnya sembari menyebut, dirinya akan usakan untuk hadir pelantikan pengurus FOKKUS dalam waktu dekat.

Sementara itu sebelumnya Ketua FOKKUS Sumsel M. Solihin mengucapkan terimakasih atas kesediaan gubernur meluangkan waktunya menerima audiensi pengurus FOKKUS Sumsel.

"Terimakasih pak Gubernur telah menerima audiensi kami. Sekaligus kami laporkan forum ini sudah memiliki legalitas dan siap membantu suksesnya program Pemprov Sumsel," terangnya.

Solihin menyebut, FOKKUS Sumsel ini sudah resmi menjadi satu organisasi yang dalam waktu dekat akan menggelar pelatihan khotib dan bilal se-Sumsel.

"Ini semua kita programkan sesuai dengan masukan dan saran dari pak Gubernur," tandasnya. ♦

## NASRUN UMAR : PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK AKAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perlindungan kekerasan pada anak, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk UPTD P2TP2A di empat Kabupaten/kota antara lain Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas dan 1 Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu pula Kabupaten dan kota membentuk Desa/Kelurahan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dengan jumlah 806 Desa atau Kelurahan dari 3262 Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan agar kekerasan terhadap anak dapat berkurang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar, saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Kebijakan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, (24/9) Kamis Pagi bertempat di Ballroom Hotel Novotel.

Dikatakan Nasrun, Selain anak menjadi korban kekerasan, anak juga dapat menjadi pelaku atau yang kerap di sebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurutnya, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya merupakan korban dari apa yang dilihat didengar dan dirasakan serta pengaruh lingkungan disekitarnya.

"Banyak faktor yang melatarbelakangi anak yang melakukan tindak pidana di antaranya, pendidikan, usia, pergaulan anak dan lingkungan keluarga," katanya

Lebih jauh Nasrun mengungkapkan untuk meminimalisir bahkan menuntaskan ABH, Pemprov Sumsel telah membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus membina ABH.

"Yang berada di POKJA ABH ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan penanganan terhadap ABH itu sendiri, yaitu Dinas DPPPVA Prov.Sumsel, Dinas Sosial Prov. Sumsel, Dinas Pendidikan Prov.Sumsel, Pengadilan Tinggi Prov.Sumsel, Kementerian Hukum & HAM Prov.Sumsel, Kepolisian Daerah Prov.Sumsel, Biro Hukum Setda Prov.Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Prov.Sumsel," tambahnya

Nasrun kembali menambahkan, proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang



melakukan tindak pidana kebutuhan pelayanan hak-hak korban salah satunya adalah pemenuhan hak korban dalam proses hukum dapat terpenuhi.

"Proses pemberian layanan di LPKA khususnya layanan rehabilitasi medis atau sosial dan reintegrasi sosial merupakan layanan yang sangat penting agar anak-anak tersebut dapat kembali diterima di masyarakat. Dengan adanya Kegiatan Rapat Kebijakan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan kasus dan korban kekerasan terhadap anak dapat berkurang dan khususnya kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan secara penuh undang-undang SPPA No 11 Tahun 2012," pungkasnya. ♦



# GUBERNUR HERMAN DERU RESMI KUKUHKAN 5 PJS BUPATI

**# Tekankan Soal Netralitas ASN**

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dengan resmi mengukuhkan lima pejabat sementara (Pjs) Bupati dari lima kabupaten yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang. Pengukuhan dilakukan di Griya Agung, Sabtu (27/9) malam.

Pengukuhan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 141.16-2942 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat sementara Bupati Ogan Komering Ulu, Nomor 131.16-2940 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat sementara Bupati OKU Selatan, Nomor 131.16-2982 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat sementara Bupati Ogan Ilir.

Kemudian Nomor 131.16-2918 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat sementara Bupati Musi Rawas dan nomor 131.16-2985 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat sementara Bupati Musi Rawas Utara.

Adapun 5 Pjs yang dikukuhkan yakni Pjs Bupati OKU resmi dijabat oleh Muhammad Zaki Aslam, S.Ip., M.Si., Pjs OKU Selatan Nora Elisya, S.H M.M, Pjs Bupati Ogan



Ilir Aufa Syahrizal, SP., MSc., Pjs Bupati Musi Rawas Drs. H. Ahmad Rizali, M.A, dan Pjs Bupati Musi Rawas Utara Ir. SA Supriono.

Dalam kata sambutannya, Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengucapkan selamat kepada Pjs Bupati yang baru saja dikukuhkan. Ia berpesan kecuali yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang didalam surat keputusan, bahwa Pjs Bupati harus menjaga kondusifnya daerah, harus bebas dari konflik, tidak boleh ada konflik baik konflik karena politik, ras, dan tatanan pemerintahan harus tetap berjalan, serta sistem keuangan harus tetap berjalan.

"Kemudian tidak mengubah RPJMD dari masing-masing Bupati yang definitif, itu tidak tertulis dalam SK maka dia (Pjs Bupati) tidak boleh mengimprovisasi, improvisasinya hanya boleh untuk tetap menjaga kedamaian," tegasnya

Ia juga minta Pjs Bupati untuk tetap menjaga netralitas ASN, terlebih Pjs Bupati-Bupati yang telah ditunjuk bukanlah putera daerah yang beralamatkan di Kabupaten tersebut.

"Jadi netralitas ini adalah mutlak bagi Pjs yang melaksanakan tugas, saya bersama Kapolda, Pangdam, Kajati juga tetap

menjaga kondusifitas daerah" ungkapnya.

Sementara untuk Bupati definitif yang sedang cuti ia mewanti-wanti untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Oleh sebab itu ia juga mengajak Pjs Bupati untuk mengawasi hal demikian.

"Sudah pasti sudah diatur jika menggunakan fasilitas negara maka ancamannya kan gugur, maka jangan pernah coba-coba menggunakan fasilitas negara dan Pjs ini akan ikut mengawasi bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan dari hal yang ringan, hingga yang terberat sampai mobil dinas, rumah dinas. Dan yang paling penting adalah pejabat politik yang cuti karena keinginan sendiri dan karena undang-undang Pilkada tidak berhak menandatangani dalam kapasitas sebagai Bupati selama cuti," pungkasnya. ♦



# SUMSEL MENUJU LUMBUNG PANGAN NASIONAL

Sektor pertanian merupakan salah satu andalan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan saat ini mampu menembus lima besar daerah penghasil beras nasional. Dalam rangka menuju Lumbung Pangan Nasional, Gubernur Sumsel H Herman Deru mendorong bupati dan walikota untuk terus berinisiatif agar pertanian di Sumsel dapat terus meningkat, terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini.

Untuk memotivasi hal tersebut Gubernur Herman Deru mengajak para petani di Sumsel harus bangga dengan profesinya.

Termasuk profesi sebagai petani mengingat wilayah ini sebagian besar lahannya merupakan lahan pertanian yang luas yang sudah sepatutnya disyukuri dan dimanfaatkan dengan layak.

Terlebih sektor pertanian selama ini telah menjadi marwah Sumsel sebagai daerah penunjang pangan nasional.

"Dari awal tidak jemu-jemunya saya katakan, kita jangan pernah minder mengaku

sebagai petani. Kita harus bangga dengan profesi sebagai petani, karena hasil jerih payah petanilah hajat orang banyak berupa pangan akan tercukupi," imbuhnya.

Sebagai sektor andalan Sumsel, Sumsel harus mampu berkontribusi dalam menyiapkan ketersediaan cadangan pangan baik untuk konsumsi dalam daerah bahkan lebih luas lagi sebagai penyedia stok pangan nasional. Oleh karena itu dirinya sejak dari menjabat sebagai Bupati OKU Timur pada periode pertama tahun 2005 hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumsel, sangat konsen dengan kema-

juan sektor pertanian.

"Baru saja kita saksikan tadi panen untuk penanaman kedua sekaligus awal dari musim tanam ketiga. OKU Timur kita tau menjadi lumbung pangan Sumsel. Ini juga yang pernah saya impikan saat menjabat OKU Timur, bahkan produksi. Jadi OKU Timur sempat mencapai angka 1 juta ton gabah kering panen pada tahun 2015 lalu," tambahnya.

Komitmen yang kuat dari Gubernur Herman Deru ini membuat dia lebih suka mengisi akhir pekannya dengan menghadiri panen raya. Salah satunya ke Desa



Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan Panen Raya bersama warga. Panen raya ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

HD mengaku bangga dengan petani dan masyarakat Desa Muara Pinang karena meski masih menggunakan irigasi semi alam namun produksi gabah kering panen sudah di atas rata-rata mencapai 6 ton lebih tiap hektare.

Ia pun berkomitmen kalau Pemprov tak akan tinggal diam. Bahkan jika memungkinkan dibuat irigasi dengan sistem air artesis pihaknya akan menambah jumlahnya seperti yang dilakukan di Air Batu Kabupaten Banyuasin.

"Ini berita baik. Sekarang tugas Gubernur, Bupati dan jajarannya. Bagaimana caranya agar produksi ini lebih meningkat lagi. Peningkatan itu bisa dilakukan dengan cara menambah luas tanam atau intensifikasi" ujar HD.

Sebagai kepala daerah yang benar-benar konsen dengan pertanian, kesempatan panen raya itu juga dimanfaatkan HD untuk berbagi tips kepada petani agar dapat mengikuti jejaknya meningkatkan produksi padi seperti di OKU Timur.

### Petani Harus Disiplin

Menurut HD, ia pernah sengaja berkeliling ke beberapa negara seperti Brunei, Philipina, Taiwan dan Thailand khusus untuk mempelajari teknik bertani. Dari sana ia paham betul bahwa kedisiplinan SDM dan petani adalah kunci utama dalam mendorong produksi padi. Karena untuk SDA di Sumsel cenderung sama memiliki gunung, irigasi hanya alat yang sedikit berbeda.

"Jadi saya pernah tantang ahli pertanian dari Taiwan untuk meningkatkan Produksi di OKUT saat itu. Waktu itu petani baru bisa panen 6 ton per hektare. Tapi si Kim (ahli pertanian) ini berani pasang target 14 ton. Asalkan sistem bertaniya mengikuti cara Dia," cerita HD.

Selanjutnya kata HD benar saja setelah panen pertama, dengan pembibitan dan pengairan mengikuti teknik yang dilakukan Kim panen mencapai target 14 ton. Kemudian begitu lagi panen lagi hasilnya tetap 14 ton.

Tak berapa lama setelah itu, para petani menghadap Saya. Mereka minta Kim dipulangkan karena petani mengaku sudah bisa mempelajari teknik bertani yang dicontohkan Kim. Alhasil Kim diminta pulang dan kemudian petani mulai ke sawah se-

perti biasa dan tibalah waktunya panen.

"Tau gak berapa produksinya padi yang dihasilkan petani? Setelah ditinggal Kim mereka tetap panen lagi 6 ton seperti semula. Tahu gak salahnya dimana. Itu karena kita tidak disiplin. Karena itu Saya minta petani disini disiplin, mulai dari pembibitan, pemupukan sampai panen biar losses (kerugian) nya tidak banyak," tegas HD.

Sama seperti ketika ia ke Thailand, HD mengaku pernah memperhatikan semua beras yang dihasilkan di penggilingan yang sama bentuk bahkan ukurannya. Hal ini menurutnya beda sekali dengan di Sumsel yang masih terlihat ada beras yang panjang, pendek bahkan patah. "Hal-hal seperti ini yang harus kita benahi," ujarnya.

Selain kopi dan lada, HD menjelaskan bahwa di Empat Lawang ini ada 13.000 lahan yang siap dikelola. Dengan 1000 PPL pertanian yang akan disebarnya ke Kabupaten Kota di Sumsel untuk membimbing para petani, diyakininya dapat meningkatkan nilai tambah padi maupun holtikultura yang ada di Empat Lawang.

"Di Sumsel inikan kita bagi zona wilayah, untuk di Empat Lawang, Pagaram, Lahat Saya yakin Empat lawang bisa jadi lumbung pangan." jelasnya.



Selain meningkatkan kedisiplinan petani, yang tak kalah penting untuk meningkatkan produksi pertanian adalah kepedulian pemerintah daerah itu sendiri.

Meski memiliki SDA yang banyak tapi petani tetap tidak bisa dibiarkan sendiri, karena mereka membutuhkan dukungan pemerintah.

"Tidak usah muluk-muluk. Kita harus pintar membaca kelebihan di Sumsel. SDM dan SDA kita ada jadi tinggal fokus saja di pertanian. Caranya kita harus mulai memperbaiki teknisnya. Kalau selama ini bertani tradisional, tanam dan panennya, sekarang pelan-pelan kita menuju mo-

pertiannya, itu artinya daerah tersebut berpotensi dikembangkan menjadi lumbung pangan," kata Herman Deru ketika melakukan Panen Perdana Padi Sawah MT.2020 di Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten OKU.

Menurut HD, meskipun lahan pertanian di Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU bukan termasuk wilayah irigasi teknis, namun hasil pertanian daerah tersebut patut diacungi jempol. Sebab saat ini, para petani bisa di wilayah tersebut bisa melakukan panen dua kali.

"Kita menghargai komitmen para petani disini yang tetap bersemangat se-

namun HD meyakini jika hasil pertanian di kabupaten OKU bisa ditingkatkan.

Bahkan dengan semangat para petani serta dorongan pemerintah, kabupaten OKU bisa menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Sumsel.

"Jangan kalah dengan sawah yang memiliki irigasi teknis. Sumsel ini berkomitmen untuk menjadi lumbung pangan nasional dan Kabupaten OKU harus juga berkontribusi. Jika lumbung pangan untuk daerahnya, OKU ini sudah melampauinya. Tinggal bagaimana agar bisa lebih ditingkatkan lagi semangat petani agar petani ini punya jiwa entrepreneur," jelasnya.

Artinya, lanjut HD, para petani tidak boleh hanya menjadi buruh di lahannya sendiri. Untuk itu, Pemprov Sumsel membentuk pansel untuk di tahun 2021 dengan mengangkat 1000 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang akan di sebar ke seluruh kabupaten dan kota sampai ke desa-desa di Sumsel untuk memberikan edukasi kepada para petani.

"PPL ini akan sangat membantu petani sehingga petani sehingga tidak menjadi buruh di lahannya sendiri. Mereka (petani) harus memproduksi pertanian secara maksimal guna menunjang perekonomian keluarga dan menunjang program daerah. Sumsel harus menjadi lumbung pangan nasional dan menjadi andalan bukan hanya slogan, infrastrukturnya dan juga semua hal yang diperlukan petani harus dipenuhi," paparnya.

Tidak hanya itu, HD pun memberikan bantuan bibit dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada petani di Kabupaten OKU berupa 4 unit mesin pemotong padi, 6 unit pompa air 6 unit, 11 unit hand sprayer, 51 ton benih jagung 2020, dan 11 ton benih padi.

"Bantuan ini berupa bibit hingga alsintan agar pertanian disini meningkat sehingga tidak kalah dengan daerah lain. Ini juga sebagai bentuk dorongan kita supaya petani semakin bersemangat," paparnya.

Diharapkannya, bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Terlebih, Sumsel sendiri dinobatkan sebagai salah satu provinsi ke-5 Produksi Beras Tertinggi pada tahun 2019 bersama empat Provinsi lainnya yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Sebelumnya HD sendiri telah menargetkan produksi padi di Sumsel di tahun 2020 bisa mencapai 4.925.191 ton GKG dan sampai dengan 17 Agustus 2020 kemarin, produksi padi di Sumsel sudah mencapai 2.899.041 ton GKG dengan luas tanam baru mencapai 840.663 Ha, dibu-



dernisasi," tegasnya.

Sementara guna mewujudkan kembali cita-cita Sumsel sebagai lumbung pangan nasional, Gubernur HD terus berkunjung ke daerah-daerah.

"Keberhasilan pertanian di lahan yang ada irigasinya tentu itu hal biasa. Namun, jika Gubernur dan bupati serta pejabat pemerintahan datang ke lahan yang mungkin tidak dijagokan hasil

hingga saat ini bisa melakukan panen dua kali dengan hasil 4 ton perhektar. Ini sudah cukup baik untuk sawah tadah hujan seperti ini," tuturnya.

Diketahui, luas lahan pertanian di Kabupaten OKU sendiri yakni 3.387 hektar. Dimana saat ini, hasil panennya mampu mencukupi kebutuhan pangan di kabupaten tersebut.

Kendati luas lahannya tidak begitu luas,

tuhkan tambahan luas tanam lagi seluas 128.719 Ha agar target capaian produksi tersebut bisa dipenuhi di tahun ini.

Seperti diketahui, meski hampir seluruh wilayah di Sumsel memiliki lahan pertanian yang luas namun setidaknya ada dua daerah yang menjadi lumbung pangan andalan Sumsel yakni OKU Timur dan Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan sentra pangan di Sumsel bahkan daerah ini lebih maju ke depan karena akan menjadi sentra budidaya porang sebagai alternatif komoditas pertanian yang bernilai ekonomis.

Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat porang dapat diolah menjadi panganan pengganti beras yakni bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, dan bahan untuk pembuatan lem atau Jelly.

"Tumbuhan ini di Sumsel tidak asing. Namun memang selama ini tidak pernah dibudidayakan. Dan ternyata, tumbuhan ini dapat dijadikan pangan alternatif. Karena ini kita mendorong agar ini dapat dibudidayakan di Kabupaten Banyuasin ini," kata HD, saat melakukan penanaman perdana porang di perkebunan Easy Porang Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin.

HD sendiri mendukung agar Kabupaten Banyuasin menjadi pilot project budidaya porang di Sumsel. Bahkan orang nomor satu di bumi Sriwijaya itu menginginkan Kabupaten Banyuasin dapat menjadi sentra tanaman porang di Indonesia.

"Tentu Pemprov akan mendukung langkah ini. Apalagi jika dilihat, sejauh ini budidaya porang ini sangat menjanjikan.

Saya ingin Banyuasin ini dapat menjadi sentra porang," tuturnya.

Lebih lanjut Gubernur berharap dengan adanya inisiatif budidaya porang tersebut tentu akan menghidupkan lahan kosong yang selama ini tidak produktif.

"Namun jangan sampai karena kita ingin menanam porang ini justru mengganggu pertanian lain. Lahan yang sudah produktif justru dibabat dan diganti porang. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus cerdas, saya minta dinas terkait memetakan kawasan mana yang bisa dijadikan lahan untuk porang ini. Rencana tata ruang itu penting dilakukan," jelasnya.

Dia pun meyakinkan, jika nantinya budidaya porang ini mendapatkan hasil yang baik untuk pembangunan ekonomi masyarakat, maka dirinya akan turun langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk penambahan lahan.

"Kalau memang hasilnya nanti sesuai harapan dan menjanjikan untuk kesejahteraan

as masyarakat. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk meminjam lahan yang tidak produktif menjadi lahan untuk porang ini," bebarnya.

Kendati begitu, dia mewanti petani porang agar selalu melakukan perhitungan sehingga nantinya tidak *over suplay* yang justru akan merugikan.

"Karena itu perlu adanya komunikasi dengan Dinas Perdagangan dan Kementerian Perdagangan agar ada perhitungan yang tepat. Jangan sampai karena terlalu menggebu, ini merugikan. Kalau bisa juga kita ada pabrik pengolahannya, agar tidak bergantung dengan pihak lain," jelasnya.

dapat digunakan sebagai bahan pembuat lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang.

Porang juga merupakan tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60 persen. Tanaman ini dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. Untuk bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak (bubil) yang ditanam secara langsung.

Tanaman porang disebut-sebut memi-



Untuk diketahui, tanaman porang atau di Sumsel lebih dikenal juga dengan nama talas ular merupakan spesies dari *Amorphophallus muelleri*.

Dilansir dari Kementerian Pertanian, umbi porang banyak mengandung glucomannan berbentuk tepung. Glucomannan merupakan serat alami yang larut dalam air biasa digunakan sebagai aditif makanan sebagai emulsifier dan pengental, bahkan

liki nilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki peluang yang cukup besar untuk diekspor.

Catatan Badan Karantina Pertanian menyebut, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp 11,31 miliar ke sejumlah negara seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain sebagainya. ♦ rhd



# DENGAN KARTU TANI, PETANI SUMSEL DIUNTUNGKAN

Upaya Gubernur Herman Deru untuk meningkatkan kesejahteraan petani Sumsel memang patut dia-cungi jempol. Kini, petani di Sumsel semakin dimudahkan dalam meningkatkan hasil produktivitas pertaniannya melalui Kartu Tani.

Kartu Tani yang diterbitkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI bekerjasama dengan BNI memberikan kemudahan dalam transaksi seperti pembelian pupuk bersubsidi.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru di sela-sela panen padi di desa Ringin Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur menyebut, petani Sumsel akan banyak diuntungkan dengan adanya kartu tani ini. Meski ditengah lahan sawah namun transaksi perbankan tetap bisa dilakukan.

"Ini namanya kartu tani yang diterbitkan Kementan RI bekerjasama dengan BNI dan Pemprov. Sumsel. Meski tengah sawah petani tetap bisa transaksi," tegasnya.

Dia menyebut Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang terintegrasi (simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman), juga berfungsi sebagai kartu subsidi/wallet. Kartu Tani diperlukan petani untuk membantu produksi pertaniannya pada komoditas Padi, Jagung.

"Saya minta Kartu Tani yang dibagikan kepada masing masing petani dapat dipastikan kevalidan dan keamanannya," harap Deru sembari menyebut, Kartu Tani juga

berfungsi sebagai identitas diri petani, sarana menabung, serta salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna pembiayaan pertanian.

Menurut Herman Deru, sebagai sektor andalan Sumsel, daerah ini harus mampu berkontribusi dalam menyiapkan ketersediaan cadangan pangan baik untuk konsumsi dalam daerah bahkan lebih luas lagi sebagai penyedia stok pangan nasional. Oleh karena itu dirinya sejak dari menjabat sebagai Bupati OKU Timur pada periode pertama tahun 2005 hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumsel, sangat konsen dengan kemajuan sektor pertanian.

"Baru saja kita saksikan tadi panen untuk penanaman kedua sekaligus awal dari musim tanam ketiga. OKU Timur kita tau menjadi lumbung pangan Sumsel. Ini juga yang pernah saya impikan saat menjabat OKU Timur, bahkan produksi.ladi OKU Timur sempat mencapai angka 1 juta ton gabah kering panen pada tahun 2015 lalu," tambahnya.

Sebagai ungkapan bagganya dengan semangat para petani di OKU Timur, dalam konjungan kerjanga di bumi Sebiduk Sehaluan kali ini, Gubernur Herman Deru membagikan bantuan sejumlah peralatan pertanian berupa *power thresher* dan *corn sheller mobile* dan benih padi unggul.

Terkait dengan semangat petani desa Ringin Sari yang cetak sawah baru secara

mandiri. HD mengaku bangga dan memberikan apresiasi yang mendalam. Terlebih OKU Timur potensinya fokus pada sektor pertanian karena ditunjang saluran irigasi teknis terbesar di Sumsel bahkan di Sumatera.

"Kita semua harus terlibat mendukung ini, termasuk pihak perbankan, harus ikut andil dengan kucuran Kredit Usaha Rakyat Daerah di sektor pertanian. Dan ini saya fokuskan pendanaan itu," imbuhnya sebari menyebut dalam waktu dekat akan menyebar Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di sejumlah daerah di Sumsel.

"Untuk mendukung majunya sektor pertanian di Sumsel kita akan sebar 1000 orang tenaga PPL ke Kabupaten/Kota di Sumsel untuk membimbing para petani," tandasnya.

Sementara itu, Bupati OKU Timur Kholid Mawardi diwakili oleh Sekda OKU Timur Jumadi mengatakan program ekstensifikasi pertanian padi di OKU Timur diharapkan dapat selain menambah luas areal tanam juga meningkatkan produksi padi sebagai wujud mendukung pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Diareal lahan Desa Ringin Sari ini, cetak sawah mandiri seluas 66 hektar yang terdiri dari cetak sawah di lahan bekas kebun karet seluas 20 hektare dan ladang seluas 46 hektar disulap menjadi lahan sawah tadah hujan yang memanfaatkan sumber air utamanya sumur bor," tandasnya. ♦rhd

## Joncik Muhammad, Bupati Empat Lawang Pertumbuhan Ekonomi Kami Menggeliat



Joncik Muhammad (ketiga kiri)

DI BAWAH kepemimpinan H.Herman Deru ini pertumbuhan Kabupaten Empat Lawang makin menggeliat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, dimana daerah harus merefocusing dana. Namun dengan bantuan gubernur yang mencapai miliaran nilainya membuat pengurangan anggaran di Empat Lawang tertutupi.

Kami akui Empat Lawang semakin menggeliat berkat Pak Herman Deru. Bantuan yang diberikan benar-benar membantu kami yang memiliki APBD Rp1 triliun ini.

Saat ini, Empat Lawang memiliki lahan pertanian seluas 13.331 ha. Dimana pada tahun 2019 lalu, panen menghasilkan 100.000 ton lebuah padi. Hasil ini sangat mencukupi kebutuhan di Empat Lawang bahkan mereka bisa ikut menyanggah kebutuhan daerah sekitarnya.

Namun dari 13.000 lahan tersebut baru 9000 lahan yang terdaftar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Melalui Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Joncik berharap kedepan 4000 lahan yang belum terdaftar tersebut bisa mendapatkan bantuan.

Saya belajar dari Pak Gubernur. Bagaimana beliau bisa memangkas kemiskinan dari 17 persen menjadi 3,8 persen saja.

Caranya dengan kerja keras dan sungguh-sungguh serta ada konsep membangun dan mencontoh pertaniannya. Dengan begitu kami yakin Empat Lawang bisa segera lepas dari kemiskinan. ♦

## H Askolani, Bupati Banyuasin

## Dukungan Gubernur Membuat Kami Yakin



H Askolani

KAMI yakin ini akan meningkat. Apalagi didukung oleh gubernur. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian gubernur yang luar biasa kepada kami.

Selain beras, kami yakin tanaman porang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Apalagi, pertanian membawa Kabupaten Banyuasin menduduki posisi ke 4 nasional sebagai produsen beras.

Banyak yang belum paham jika porang ini bernilai ekonomis. Padahal porang ini ada di Banyuasin. Itulah kita lakukan disini. Harapannya dapat terus mendongkrak pangan di Banyuasin. Tanaman porang memiliki prospek yang luar biasa untuk dibudidayakan selain padi dan jagung. ♦

## Drs. H. Kuryana Azis, Bupati OKU

## OKU Masih Butuh Bantuan

KABUPATEN OKU telah mencetak sawah baru lebih kurang dengan luas 3800 Ha. Luas persawahan ini masih sangat terbatas hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat setempat, untuk itu kedepan semakin ditingkatkan sentra produksi pertanian.

Terkait masalah infrastruktur di Kabupaten OKU, seperti jalan di Desa Gunung Meraksa sepanjang 3,3 KM sudah diperbaiki, pada kesempatan ini diharapkan Gubernur Sumsel dapat membantu perbaikan jalan yang ada di Desa Gunung Liwat sepanjang 5 km untuk dapat diperbaiki. ♦



Kuryana Azis



# SUMSEL-BABEL DALAM SATU BAHTERA SRIWIJAYA

**Dalam masa kepemimpinannya selama dua tahun Gubernur Herman Deru bersama Wakil Gubernur Mawardi Yahya memfokuskan tiga program prioritas dan saat ini telah dilakukannya yakni infrastruktur jalan, bidang pertanian menuju lumbung pangan nasional serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19.**

**"S**elama 2 tahun ini dalam kepemimpinan saya bersama pak Wagub masih konsisten pada pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok desa, juga peningkatan pertanian dan menggerakkan perekonomian," katanya.

"Kita termasuk yang paling tinggi di pulau Sumatera. Pemulihan ekonomi yang saat ini adalah memberdayakan UMKM, tidak hanya ddiberi permodalan tapi keterampilan termasuk pemasaran. Bahkan saya sampai disebut Gubernur endorse

hal ini juga salah satu mempertahankan ekonomi melalui UMKM," ungkapnya.

Dibidang infrastruktur misalnya, Gubernur HD dan Gubernur Babel DR H. Erzaldi Rosman Djohan, menggagas pembangunan jembatan Sumatera-Babel yang akan diberi nama Jembatan Bahtera Sriwijaya.

Jembatan ini akan menghubungkan Provinsi Sumsel dengan Provinsi Kepulauan Babel sepanjang 13,5 kilometer. Yang lokasi tapak jembatannya sudah disepakati masing-masing Gubernur dari ke dua provinsi bertetangga tersebut yakni, berlokasi di Desa Tanjung Tapa Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumsel dan Desa Sebagin Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Babel.

"Alhamdulillah. Kita sudah deal, titik lokasi jembatan penghubung Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terletak di Desa Tanjung Tapa Kecamatan Tunjung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumsel dan Desa Sebagin Kabupaten Bangka Selatan. Jembatan Bangka Sumatera ini

nantinya kita beri nama Bahtera Sriwijaya," ucap Herman Deru didampingi Gubernur Babel DR H. Erzaldi Rosman Djohan usai menggelar FGD yang didampingi pejabat terkait dari kedua provinsi itu.

Herman Deru berharap hasil yang telah dicapai segera ditindak lanjuti untuk melengkapi syarat usulan kepemerintah pusat yang sudah dinantikan. Direncanakan pada tahun 2024 sudah ada progres pelaksanaan pembangunannya.

Hadirnya jembatan ini nantinya diyakini Herman Deru akan membuat wilayah gambut di Kabupaten OKI kian terbuka dan mendorong datangnya banyak investor dikawasan itu. Terlebih dengan telah dioperasionalkannya tol trans Sumatera penghubung Palembang-Kayu Agung-Lampung. Tentunya akan berdampak positif dengan kemajuan sektor ekonomi bagi Provinsi Sumsel dan Provinsi Kepulauan Babel.

"Yang paling diuntungkan tentunya Sumatera Selatan. Jika jembatan Bahtera Sriwijaya sudah jadi. Dampaknya akan spektakuler bagi kedua pihak. Komoditas dari Sumsel akan lebih banyak lagi yang akan dibawa ke Bangka. Begitu juga sebaliknya, produk dari Bangka ini dengan gampang dibawa ke luar hingga ke pulau Jawa. Termasuk bagi sektor pariwisata," terang Herman Deru.



Sementara itu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman sebelumnya menyebut proyek jalur penghubung Bangka-Sumatera layak untuk dilanjutkan menuju tahap studi kelayakan atau feasibility study.

"Keberadaan jalur penyeberangan ini diharapkan berdampak positif bagi Provinsi Kepulauan Babel dan Sumsel," tandasnya. ♦rhd



## MENGINTEGRASIKAN KEMBALI SAINS DAN TEKNOLOGI DENGAN NILAI-NILAI ISLAM

Dalam Al Qur'an (Surah Ali Imran: 190), Allah menyatakan: **Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.**



**Oleh: DR. Muhammad Najib**

Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.

**S**edangkan dalam (Surah Al Ghasiyah: 17-20), Allah menyatakan: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, serta bumi bagaimana ia dihamparkan.

Selain itu, banyak lagi ayat-ayat yang diakhiri dengan pernyataan menggugah, seperti: "Afala ta'kilun", apakah kalian tidak berakal? atau "afala tatafakkarun", apakah kalian tidak berpikir?

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi akal dan fikiran manusia. Dengan demikian penggunaan akal dan pikiran memiliki posisi sangat penting dalam implementasi ajaran Islam.

Hal inilah yang menyebabkan pentingnya ilmu bagi umat Islam. Islam pada hakikatnya tidak membedakan antara ilmu dunia dan akhirat, bagi umat Islam semua ilmu bersumber dari

Allah.

Meskipun sejumlah mufassirin sering memilah antara ilmu-ilmu yang bersumber dari Al Qur'an (ilmu-ilmu Qur'aniah) dan ilmu-ilmu yang harus digali dari ciptaan Allah (ilmu Qauniah), seperti ilmu geologi, fulkanologi, biologi, pertanian, astronomi, dan sebagainya.

Cara pandang beragama seperti inilah yang mengantarkan kemajuan dan kejayaan umat Islam di era Abbasiyah, yang mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Khalifah Harun Al Rasyid, dan dilanjutkan putranya Al Makmun pada abad akhir abad ke-8 M.

Umat Islam memimpin dalam penguasaan sains dan teknologi, termasuk ilmu kedokteran dan astronomi. Pada masa inilah lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang terus dikenang sampai sekarang, seperti Al Khawami, Ibnu Rusyd, Ibnu Shina, Ibnu Haitham, dan lain-lain.

Bagdad dan Khordoba bukan saja megah secara fisik melampaui kota-kota di kawasan Eropa, akan tetapi juga gemerlap oleh banyaknya ilmuwan yang menguasai berbagai cabang ilmu dan terus berkarya di pusat-pusat pendidikan, pusat riset, dan berbagai laboratorium, sehingga berbagai temuannya dikenang sampai sekarang.

Keunggulan ini mendorong dunia ekonomi dan tumbuhnya industri yang melahirkan berbagai produk unggulan yang diperlukan umat manusia. Karena itu gaya hidup, selera makan, bentuk pakaian umat Islam ditiru dan diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Hal inilah yang digambarkan oleh kisah 1001 malam, kisah Aladin, atau Abu Nawas.

Saat itu, Amerika dan Australia belum ada, sedangkan Eropa hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Karena itulah bangsa Eropa menyebut era ini sebagai masa kegelapan. Pemuda-pemuda Eropa belajar ilmu sains, teknologi, ekonomi, maupun ilmu sosial ke Khordoba dan Bagdad.

Setelah kembali ke negrinya, mereka inilah yang menjadi pelopor menentang gereja yang dinilainya sebagai penghambat kemajuan Barat. Gerakan anti agama ini kemudian dikenal sebagai pembawa ideologi Sekularisme, yang pada puncaknya membentuk revolusi industri di Inggris pada tahun 1760, dan revolusi politik atau pemerintahan di Perancis tahun 1789.

Peristiwa ini menandai awal kebangkitan Barat yang terus berkembang sampai sekarang.

Pertanyaannya kemudian mengapa umat Islam mengalami ke-



jumlah, yang mengakibatkannya kemudian bukan saja disalip oleh Barat yang dulu menjadi muridnya. Lebih dari itu negara-negara Islam kemudian dikalahkan dan dijajah negara-negara Barat selama ratusan tahun.

Salah satu thesis yang menarik menyatakan, bahwa saat dalam masa kejayaannya umat Islam bergelimang harta dan hidup dalam kemewahan bendawi. Dalam situasi seperti ini muncul keprihatinan dan kekhawatiran sejumlah ulama, kalau-kalau umat Islam dan para pemimpinnya semakin jauh dari urusan akhirat. Salah satu ulama yang sangat menonjol bernama Imam Ghazali.

Para ulama ini kemudian mengembangkan sufisme dan mistisisme yang lebih menawarkan kebahagiaan bathin dibanding materi, memilih hidup bersahaja dibanding bergelimang harta, dan mengejar akhirat dibanding dunia.

Kini saatnya umat Islam untuk kembali menekuni sains dan teknologi, agar perhatian kita seimbang antara urusan dunia dan akhirat, atau antara urusan material dan spiritual.

Tahun 1970-an seorang cendekiawan

**MC** *Salah satu thesis yang menarik menyatakan, bahwa saat dalam masa kejayaannya umat Islam bergelimang harta dan hidup dalam kemewahan bendawi. Dalam situasi seperti ini muncul keprihatinan dan kekhawatiran sejumlah ulama, kalau-kalau umat Islam dan para pemimpinnya semakin jauh dari urusan akhirat. Salah satu ulama yang sangat menonjol bernama Imam Ghazali.*

Muslim bernama Syed M. Naguib Al Attas mendengungkan istilah Islamisasi Ilmu. Ia kemudian mendirikan International Institute of Islamic Thought Civilization (ISTAC) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tahun 1981, di Virginia, Amerika, didirikan International Institute of Islamic Thought (IIIT) yang dipelopori oleh para imigran cendekiawan yang berasal dari berbagai negara Muslim yang belajar di Amerika dan Canada.

Upaya ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Tajdid di bidang politik yang dimulai oleh Jamaluddin Al Afghani dan muridnya Muhammad Abduh, kemudian dilanjutkan dengan tajdid di bidang pendidikan modern oleh Rasyid Ridha.

Tajdid dalam masalah sains dan teknologi di Indonesia sudah dimulai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dimotori oleh B.J.Habibie.

Sayang di dunia Islam, khususnya di dunia Arab belum mendapatkan respon yang memadai. Padahal di sinilah rahasia kemajuan ekonomi dan militer sebuah negara modern yang akan bermuara pada keunggulan di bidang politik. ♦

## LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF

# PROGRAM WISATA COVID-19 SULSEL JADI ACUAN NASIONAL

Program wisata Covid-19 Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan dinilai lebih hemat dan efektif. Keberhasilan program ini diakui oleh nasional. Bahkan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta DKI Jakarta dan Provisis lainnya mengikuti Program Wisata Covid-19 Sulsel.

Melalui konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (10/9/2020), Airlangga Hartarto meminta ke Pemprov DKI untuk menerapkan program wisata Covid-19 Pemprov Sulsel. Permintaan ini agar angka kesembuhan pasien Covid-19 di Ibu Kota Negara itu meningkat.

Wisata Covid-19 yang diterapkan Pemprov Sulsel selama ini adalah dengan menempatkan pasien-pasien yang terpapar Covid-19, utamanya Orang Tanpa Gejala (OTG) di hotel berbintang, disertai program pemulihan mulai dari pemenuhan gizi, pemenuhan kebutuhan spiritual hingga mengikuti program olahraga secara rutin.

"Jadi peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu juga akan terus menambah fasilitas di hotel, termasuk memanfaatkan hotel bintang dua dan tiga seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan," ujarnya.

Hal ini disampaikan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta dalam menangani corona.

Apalagi, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan, jika sejak memasuki masa

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, persentase keterisian tempat tidur isolasi corona meningkat.

Apresiasi juga disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan. Ungkapan tersebut disampaikan Luhut pada Rapat Pengendalian dan Evaluasi Penanganan COVID-19 dengan para Gubernur se-Indonesia secara virtual beberapa waktu lalu.

Pujian serupa juga datang dari Kementerian Kesehatan RI. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS mengatakan bahwa Program Wisata Covid-19 yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan ini, dapat membuat pasien Covid-19 merasa tidak seperti sedang diisolasi dan secara psikologis tidak mengalami tekanan batin karena menderita Covid-19 dan takut dikucilkan karena harus menjalankan isolasi.

"Ini adalah Program Pemprov Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dengan program ini mereka yang positif Covid-19 diisolasi di tempat khusus (hotel) yang juga dengan cara yang khusus. Dengan cara ini mereka tidak merasa menjadi pasien sehingga secara psikologis mereka tidak tertekan" kata dr. Pattiselanno Roberth Johan saat memberi-



kan keterangan di Poltekkes Kemenkes Makassar dalam Kunjungan Tim Taskforce Kementerian Kesehatan RI ke Sulawesi Selatan, Selasa (29/9/20).

"Tekanan psikologis dikurangi dengan cara membuat mereka happy selama diisolasi di hotel. Istilah Wisata Covid ini, istilah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan ini bagus sekali, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan atau diisolasi sebagai sesuatu yang membuat mereka tertekan batin dan sebagainya, tetapi mereka menikmati itu," tambahnya.

Mendapat respon tersebut, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, mengaku senang dan bangga, karena kerja keras Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sulsel mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Program Wisata Covid-19 Sulsel diakui Pemerintah Pusat, karena program tersebut berhasil melakukan tracking kontak dengan memisahkan kasus OTG, Positif, ODP dan PDP.

Sejauh ini, Program Wisata Covid-19 Sulsel berhasil mencegah potensi penularan sekitar 170.000 kasus baru di masyarakat. Sebab warga yang memiliki potensi tertular virus corona langsung dikarantina khusus.

Dengan langkah-langkah dan keberhasilan yang di capai, maka Program Wisata Covid-19, mampu menghemat anggaran penanganan Covid-19. Program ini juga efektif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya virus corona karena para mantan pasien yang sembuh diangkat menjadi duta Covid-19.

"Anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp 765 miliar. Untuk penanganan di rumah sakit yang dapat muncul akibat kasus berat dan memerlukan perawatan intensif," kata Gubernur Nurdin.

Menurut dia, program ini juga memajukan UMKM, karena hotel dan jasa katering di Kota Makassar dan sekitarnya tetap beroperasi di masa pandemi COVID-19. Belum lagi efek yang didapat dari wisata ini.

"Sekitar 2.000-an peserta yang menjadi alumni siap untuk menjadi edukator di lingkungan masing-masing," ujar dia.

Sebelumnya Gubernur Nurdin mengklaim kesembuhan pasien COVID-19 Sulsel paling tinggi dari seluruh provinsi se-Indonesia. Selain itu penggunaan anggaran untuk penanganan dan pencegahannya dinilai paling irit.

"Kalau kita lihat dari segi keuangan, kita juga paling irit karena kita tidak menghamburkan uang untuk beli alat kesehatan," ujarnya.



**Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan**



**Menko Perekonomian Airlangga Hartarto**



**Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah**

Hal ini terungkap saat ia bersama 24 gubernur se-Indonesia menggelar rapat terbatas yang salah satunya membahas tentang penanganan Covid-19. Dalam kesempatan tersebut, hampir semua kepala daerah mengeluhkan masalah anggaran yang terkuras akibat pandemi virus corona.

"Tapi Sulsel Alhamdulillah kita kelola dengan baik. Pendapatan kita dari tahun lalu justru naik sedikit," tandasnya.

ketidaksiapan pasien saat sedang menjalani isolasi mandiri di rumah serta kondisi tempat isolasi mandiri di rumah yang tidak layak untuk digunakan, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah upaya serius dengan menyiapkan beberapa hotel yang akan digunakan sebagai tempat isolasi mandiri.

Ia juga mengatakan bahwa Program Wisata Covid-19 juga bertujuan untuk me-

Abdullah.

Selanjutnya Nurdin Abdullah berharap, Program Wisata Covid 19 ini dapat memuluskan mata rantai penularan Covid 19 sehingga masyarakat dapat terus menjalankan roda perekonomian di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Sementara itu Koordinator Wisata Duta Covid-19 Sulawesi Selatan, Husni Thamrin menambahkan bahwa pasien Covid 19 yang sedang mengikuti isolasi mandiri di Program Wisata Covid 19 telah banyak yang sembuh dan bagi pasien yang menunjukkan gejala sedang hingga berat akan dirujuk ke rumah sakit.

"Jadi sekarang ini dari 15.501 kasus positif dikonfirmasi di Sulawesi Selatan, itu 5.000 lebih sudah dirawat di Wisata Covid-19 dan 90% itu sudah pulang, sudah selesai, negatif, dan dianggap sembuh. Nah kita juga ada Tim Medis yang setiap hari melakukan pemeriksaan. Ternyata kalau ketika muncul gejala yang mengarah ke gejala sedang misalnya, itu segera dirujuk ke rumah sakit. Dari 5.500 lebih sampai saat ini, hanya 57 orang yang dirujuk. Nah ini artinya cuma 1%," tambahnya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah pasien yang masuk dalam Program Wisata Covid-19 sampai dengan 29 September 2020 sebanyak 5.523 orang. Secara rinci yang masih dirawat sebanyak 299 orang, kemudian yang dirujuk ke rumah sakit sebanyak 57 orang, dan yang sehat atau sembuh sebanyak 5.167 orang.

Dalam Program Wisata Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja sama dengan 6 hotel yang berada di Makassar untuk bisa diterapkan sebagai tempat isolasi mandiri bagi masyarakat. Total dari 6 Hotel ini, terdapat 610 kamar yang telah disediakan dan hingga saat ini hanya 3 Hotel yang aktif atau digunakan karena seiring dengan adanya jumlah pasien yang telah sembuh dari Covid-19 selama telah dilakukannya isolasi mandiri di Hotel tersebut.

Husni juga menjelaskan bahwa pasien yang mengikuti isolasi mandiri di Program Wisata Covid-19 dan telah dinyatakan sembuh akan dijadikan sebagai tenaga edukasi yang disebut sebagai Duta Covid-19 sehingga nantinya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman Covid 19.

"Salah satu tujuan Wisata Covid-19 ini adalah bagaimana mencetak para tenaga edukasi karena kita paham betul bahwa masyarakat kita ini masih butuh di edukasi, makanya jadi selama di dalam karantina mereka juga di edukasi, mereka diberikan



Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah rapat koordinasi dengan jajarannya



OTG yang mengikuti Program Wisata Covid-19

Lebih lanjut Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa Program Wisata Covid-19 merupakan tempat isolasi terpusat bagi Penderita Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan dan dikemas dalam bentuk wisata sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh pasien yang dapat melawan virus corona atau Covid 19.

Hal ini juga dilatarbelakangi karena

tekanan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat serta mencegah kelebihan kapasitas rumah sakit.

"Konsepnya adalah memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat, sehingga masyarakat tidak tertular. Nah, yang terkonfirmasi inilah yang kita lakukan isolasi dan tentu dampaknya adalah mencegah terjadinya overload rumah sakit," ujar Nurdin

motivasi untuk siap menjadi tenaga edukasi, dan mereka juga diberi pemahaman, bagaimana Covid-19 ini, seperti apa pencegahannya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Duta Covid-19 memiliki 3 hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat, yaitu memberikan pemahaman tentang pencegahan Covid-19 dengan cara menerapkan Protokol Kesehatan, memberikan penjelasan bahwa pasien Covid-19 bisa sembuh dan sehat kembali dengan membuktikan bahwa di Sulawesi Selatan angka kesembuhan mencapai 77,2%, dan menyampaikan bahwa negara atau pemerintah hadir dalam menanggulangi Covid-19 melalui program dan kebijakan yang telah dan akan diberikan kepada masyarakat.

“Nah itulah kelebihan lainnya dari pasien yang sembuh melalui Program Wisata Covid-19. Mereka yang telah sehat dan kembali ke rumah juga menjadi tenaga edukasi di tengah masyarakat,” pungkas Husni.

#### Anak Kembali Ceria Ketika Diisolasi Dengan Program Wisata Covid-19

Salah satu orang tua santriwati yang anaknya positif terinfeksi Covid-19 mengungkapkan tentang dampak isolasi dengan Program Wisata Covid-19 yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saat sang anak dibawa, dia memang merasa sangat khawatir. Tapi setelah itu dia justru mengucapkan terimakasih.

Seperti yang dikutip dari TribunLutra.com, ceritanya bermula ketika putrinya masuk dalam rombongan 19 santri asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang positif Covid-19. Para santri tersebut berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan hasil pemeriksaan PCR terkonfirmasi positif.

Atas permintaan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, ke-19 santri itu kemudian diberangkatkan ke Makassar guna menjalani karantina 14 hari di Program Wisata Covid-19.

“Setelah mendapatkan berita bahwa putri saya dinyatakan positif, saya harus menerima kenyataan dengan perasaan terasa berat. Tetapi yang lebih berat bagaimana menyampaikan berita ini kepada putri saya yang selama ini menjalani isolasi mandiri di rumah kini harus dilakukan isolasi di Makassar sesuai kebijakan Pemda,” kata orang tua yang tidak disebutkan namanya tersebut.

“Apa lagi melihat perilaku putri saya berubah jadi pendiam saat dia tahu akan diisolasi di Makassar. Saya pun sebagai orang tua langsung down (stres berat),” tambahnya.

Padahal, terang dia, sebelumnya tidak seperti itu. Walaupun telah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah, sebelum test swabnya dirilis.

“Walaupun demikian, saya tetap memberikan penjelasan agar ia dapat ikut untuk menjalani isolasi di Makassar,” ungkapnya.

Para santri itu pun kemudian diberangkatkan ke Makassar menggunakan empat unit mobil Pemkab Luwu Utara. Mereka kemudian

man yang ia dapatkan, termasuk ia mengatakan bahwa bersama dengan teman-temannya mengatakan mantap Bupati Luwu Utara, kita diisolasi di hotel serasa liburan pergi rekreasi,” ungkap orang tua tersebut.

Tentu saja, lanjutnya, ia sangat bersyukur dengan fasilitas yang telah disiapkan Pemprov Sulsel melalui inisiasi Bupati Luwu Utara dan jajarannya.



Swiss-Bellhotel Makassar adalah salah satu lokasi program wisata covid-19 Pemprov Sulsel.



Kamar Swiss Belhotel

ditempatkan di Swiss Bellhotel Makassar.

“Setelah tiba di Makassar dan telah berada di kamar 17 lantai 15 di Swiss Belhotel, sekitar pukul 23.00 wita, putriku melakukan kontak videocall memperlihatkan fasilitas kamar yang mereka dapatkan dan pelayanan yang memuaskan,” terangnya.

“Terlihat putri saya telah kembali ceria dengan semangat menceritakan pengala-

“Saya, sebagai salah satu orang tua, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian Bupati Luwu Utara dan jajarannya, mulai dari penjemputan sampai dengan anak-anak tiba di Makassar. Semoga kerja keras dan perhatian yang besar dari Pemda Luwu Utara kita bisa keluar dari wabah Covid 19 ini. Amiin yaa Rabbal Alamiin,” tandasnya. ♦



Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin.

## Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin

# PERJUANGAN KAMI AKAN LEBIH BERAT JIKA TAK ADA PORGRAM WISATA COVID

**Penderita Covid-19 di Kota Makassar cenderung menurun dalam sebulan terakhir. Ini tidak lepas dari kinerja Pj Wali Kota Makasar Prof Rudy Djamaluddin, yang bersinergi apik dengan program penanganan Covid-19 Pemprov Sulawesi Selatan dengan Program Wisata Covid-19-nya.**

**D**ilantik sebagai Pj Wali Kota Makassar pada saat puncak puncaknya pandemi, yakni pada 26 Juni 2020, Prof Rudy Djamaluddin, mengemban tugas utama dari Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah untuk mengendalikan Covid-19 dan menjalankan roda pemerintahan.

"Jadi selesai saya dilantik yang ada dalam pikiran saya, bagaimana bisa menjalankan tugas yang diamanahkan Pak Gubernur. Kita lalu susun langkah-langkah bagaimana mengendalikan Covid," ujar Prof Rudy baru-baru ini.

Maka, lanjutnya, fokus pertama bagaimana strategi menghadapi pandemi Covid-19. Ada opsi untuk dilaksanakan PSBB lagi. "Tapi, saya sampaikan PSBB itu lebih menyengsarakan rakyat. Kita hilangkan dulu opsi itu. Apalagi di beberapa kesempatan Pak Gubernur juga tidak ingin ada PSBB lagi, setelah Makassar melaksanakan PSBB dua kali," terangnya.

Akhirnya, kata Prof Rudy, disepakati tidak ada PSBB. Yang dilakukan adalah bagaimana protokol kesehatan itu lakukan kembali. Apalagi diakhir PSBB lalu terjadi euforia. "Akibat seakan-akan telah

berhasil mengendalikan Covid sehingga terjadi euforia ditambah kebijakan walikota sebelumnya cenderung bertentangan, misalnya memperbolehkan pesta pernikahan, shalat Idul Fitri di lapangan. Saat itu pak Kapolda bereaksi membubarkan bila ada yang nekad mengadakan pesta pernikahan," ungkapnya.

Maka, tegasnya, bagaimana kesadaran protokol kesehatan kembali lagi. Kedua, bagaimana membatasi transfer orang. Langkah yang dilakukan pengetatan protokol kesehatan didalam membatasi gerakan orang masuk dan keluar Makassar. Dengan tiga langkah strategis yaitu edukatif masif, preventif masif dan pengawasan masif. "Inilah yang kita kabarkan di dalam perwali no 36, untuk mengatur protokol dan pembatasan," tuturnya.

Setelah seminggu dilaksanakan, jelasnya, ada penurunan Covid-19. Untuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan sampai tingkat RT-RW. Salah satu cara diperketat dan meminta camat dan lurah melakukan memonitor sejauh mana tingkat kedisiplinan protokol kesehatan semakin baik.

"Pada saat setelah PSBB tingkat kepatu-

han masyarakat ada di level 30 persen. Pada saat PSBB sekitar 70 persen. Itu yang berusaha kita naikkan kembali. *Alhamdulillah* berdasarkan dari pemantauan lurah kemudian laporan dari camat itu bisa mencapai di level 80 persen tingkat kepatuhan," ungkapnya.

Prof Rudy menjelaskan sewaktu akan melaksanakan PSBB menemui terlebih dahulu Bupati Maros dan Gowa minta izin. Pihaknya juga memberikan bantuan rapid gratis untuk kabupaten. Kemudian rapid gratis juga di Kota Makassar. "Supaya terbantu orang-orang yang tidak punya duit," ujarnya.

Hal itu, katanya, tidak terlepas koordinasi dengan provinsi. Pada saat akan dilakukan pembatasan surat keterangan rapid dengan kebijakan gubernur lalu provinsi membikin program rapid test gratis di kota Makassar. "Selama dua minggu 500 hari di dua titik. Kantor Dharma Wanita dan Dinas Kesehatan. Kita juga memberi bantuan ke kabupaten Gowa melakukan hal sama," jelasnya.

Melalui sinergi dengan kabupaten tetangga dan provinsi terjadi pelandaian. Sampai sekitar 10 harian menjelang



**Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamiluddin.**

pilkada mulai naik lagi. Maka dengan kecenderungan ada kenaikan diperketat lagi. "Namun kami tidak ingin melakukan pembatasan wilayah. Kita lebih fokus pada pengetatan protokolnya. Maka dalam kesempatan saya ingatkan protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan dalam Perwali. Sehingga dalam pesta demokrasi ini tidak lebih memperburuk kesehatan," katanya.

Setelah berakhir kegiatan pengetatan Perwali 36, Prof Rudy menjelaskan, pihaknya mengeluarkan Perwali 51 untuk menggerakkan ekonomi disatu sisi protokol kesehatan tetap berjalan. "Disitu sudah diatur sanksi-sanksi. Kalau perorangan denda maksimum 100 ribu. Usaha-usaha kecil 300 - 500 ribu. Sampai hotel dendanya 27 juta. Itu seiring dengan instruksi pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk melakukan pengetatan kedisiplinan protokol kesehatan," jelasnya.

Kemudian, sambungnya, dikeluarkan Perwali 53 yang khusus mengatur masalah pesta pernikahan dan pertemuan di hotel. Kita bisa menjalan pesta pernikahan tapi dengan melaksanakan rambu-rambu protokol kesehatan.

Dia menjelaskan, ditengah kondisi antara kebijakan mengendalikan Covid dan melakukan pemulihan ekonomi tentu apapun kebijakan yang kita ambil tidak boleh melupakan potensi penularan Covid-19. "Bukan pada pesta pernikahan bukan pada kehadiran mempelai dan tamu, tapi pada saat makan. Karena rata-rata dalam pesta pernikahan pasti ada musik. Rata-rata yang datang sambil makan berdekatan. Makanya di dalam Perwali 53 kegiatan makan itu kita larang. Itu potensi," tegasnya.

Pihaknya berupaya mendorong pergerakan ekonomi dan protokol kesehatan.

Dalam setiap pertemuan disampaikan penurunan Covid ini tidak bisa selesai kalau tidak dilakukan bersama-sama. Sehingga dalam proses edukasi dengan cara mendorong mubaligh-mubaligh, imam masjid untuk melakukan imbauan menjelang shalat atau setelah shalat pentingnya protokol kesehatan. Agar semuanya tereduksi dengan protokol kesehatan.

Dia mengharapkan pelaksanaan protokol kesehatan bukan akibat keterpaksaan tetapi akibat kebiasaan. Pendekatan merubah dari keterpaksaan menjadi kebiasaan tentu metodenya ada pada memperbanyak edukasi bagi orang-orang menjadi faham.

"Tapi ada juga melalui 'pengawasan' bagi orang-orang yang kurang sadar. *Alhamdulillah*, ditambah etimolog dari kampus untuk menganalisis apakah langkah kita sudah benar dan apa langkah kita kedepan. Dan itu dilaporkan setiap hari," terangnya.

Kunci dari semua itu, dia sampaikan, bahwa semakin turun keterpaparan kita harusnya tindakan yang kita lakukan adalah apakah kita semakin ketat melaksana-



**Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamiluddin.**

kan kedisiplinan. "Jangan semakin turun atau semakin logar," tukasnya.

Untuk mencegah pilkada menjadi klaster baru, Prof Rudy menegaskan, dalam Perwali 51 dan 53 telah mengatur aktivitas di dalam Kota Makassar. "Siapun itu, mau ada Pilkada atau tidak ada keramaian kita beri sanksi. Tidak ada disitu disebutkan. Jadi berlaku untuk semua," terangnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan laporan dari camat bahwa tingkat kesadaran masyarakat naik kembali. Dari 30 persen menjadi 80 persen. Indikator kesadaran ini bis diukur dengan penurunan tingkat keterpaparan. Menurutnya semua ini selain kesadaran yang meningkat tidak terlepas dari strategi-strategi langkah langkah yang dilakukan, khususnya koordinasi dengan provinsi.

"Misalnya ditingkat provinsi ada Wisata Covid yang diperuntukan untuk para OTG (Orang Tanpa Gejala). Ini sangat membantu. Kita bayangkan jika kebijakannya seperti Jakarta OTG masuk ke rumah sakit. Karena kita masukan OTG ke hotel agar konsentrasi nakes-nakes dan dokter kita jadi fokus hanya merawat orang-orang yang perlu perhatian dokter. Tidak perlu memperhatikan orang yang OTG. Dan sudah terbukti dari 5.000 orang yang dimasukan ke hotel pada sembuh semua," jelasnya.

"Kunci OPG ini sebenarnya agar dia bisa bertahan berdasarkan imunitas. Dikasih makanan yang enak kemudian dikasih vitamin. Yang terpenting adalah perasaan, jangan stres. Jadi ada program program di dalam yang diramu sedemikian rupa. Ada kegiatan senam dipagi hari, siram rohani, dan ada juga acara bebas. Mereka tidak berada di kamar saja. Dia betul-betul seperti wisata. Bahkan ada yang baru seminggu sudah negatif," sambungnya.

Dia memuji program gubernur Sulsel dengan Wisata Covid nya karena sangat membantu penanganan Covid di Makassar. Kalau tidak ada Wisata Covid, menurutnya, Kota Makassar akan jauh lebih berat menanganinya. "Dengan adanya Duta Wisata Covid kita menghemat dana Covid hampir Rp760 miliar," ucapnya.

Salah satu yang paling menggembirakan adanya Duta Wisata Covid dari kabupaten kabupaten diluar Makassar semua dibawa untuk mengikuti program Wisata Covid. Sehingga kegiatan ekonomi diluar Kota Makassar tetap berjalan.

"Walaupun awalnya banyak yang pesimis dengan program Wisata Covid yang dinilai sebagai pemborosan tetapi setelah berjalan ternyata merupakan efisiensi yang luar biasa. Pada akhirnya pemerintahan pusat sudah merekomendasi Wisata Covid. Jakarta sudah mulai, ada 13 hotel yang mendaftar," tandasnya. ♦



## KEMENAG RESMI GELAR PROGRAM KOMPETENSI PENCERAMAH AGAMA

Kementerian Agama secara resmi menggelar program Kompetensi Penceramah Agama Angkatan I. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang dai yang berasal dari perwakilan ormas dan berlangsung selama tiga hari, 29 September - 1 Oktober 2020. Program yang sebelumnya bernama sertifikasi penceramah ini ditargetkan akan diikuti oleh lebih dari 8.000 penceramah.

Pada program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan I ini Kemenag menggandeng sejumlah narasumber diantara Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Menteri Agama Periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin serta Staf Ahli Menteri Agama Oman Fathurahman.

Kemenag melibatkan narasumber dari Lemhanas, BPIP, dan BNPT untuk memberikan wawasan terkini tentang kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Beberapa ormas Islam yang mengikuti program tersebut diantaranya Alwashli-

yah, Wanita Islam, LDNU, Ittihadul Mubalighin, Mathlaul Anwar, Muslimat NU, Al Isryad Al Islamiyyah, PUI, IKADI, dan PSQ.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan program ini merupakan bagian dari pembangunan nasional. Ia menyatakan program pembinaan keumatan tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenag tahun 2020-2024.

"Kemenag telah menggariskan pembinaan keumatan sebagai bagian penting pembangunan nasional. Dalam bahasa kekinian, diharapkan bahasa agama akan

benar-benar semakin nyata dalam pembangunan nasional," kata Zainut saat pembukaan program tersebut.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan penceramah agama yang mumpuni untuk menghasilkan umat beragama yang berkualitas. Ia pun berharap program penguatan kompetensi yang digelar Kemenag ini bisa menghasilkan penceramah berwawasan keislaman yang moderat dan berkebangsaan.

"Materi dakwah, akan dapat diterima dengan baik bila disampaikan dengan cara atau metode yang tepat oleh mereka yang memiliki wawasan keagamaan luas," kata dia.

Sebelumnya, Zainut meluncurkan secara resmi program ini pada Jumat (18/9/20). Dia menegaskan program ini bukanlah sertifikasi penceramah agama, tapi lebih ke pembinaan teknis dalam rangka penguatan kompetensi penceramah agama.

Program ini tidak hanya dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam, tapi juga Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Pusat Pembinaan dan Pendidikan

(Pusbindik) Khonghucu.

"Ini bukan sertifikasi. Tidak ada paksaan untuk mengikuti program ini. Sifatnya sukarela. Karenanya, yang tidak ikut Bimtek juga tidak terhalang haknya untuk terus berdakwah," terang Wamenag.

Sedangkan Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin saat penutupan program Kompetensi Penceramah Agama Angkatan I mengungkapkan kepada peserta bahwa kiprah mereka sudah ditunggu oleh banyak pihak. Dia mengaku sudah dihubungi banyak pihak yang menanyakan kapan para penceramah bisa berbagi pengetahuan di tempatnya.

"Medan kiprah sudah menunggu. Banyak media yang sudah bertanya kepada kami. Masjid-masjid kementerian juga bertanya tentang bagaimana penceramah agama yang sekarang sedang ikut latihan di Kemenag, kapan mereka bisa berceramah di tempat kami?," kata Kamaruddin di Jakarta, Kamis (1/10/20).

"Ke depan, penceramah bisa mengisi sejumlah ruang publik yang sangat strategis, seperti media elektronik dan lainnya. Kita bisa saling mempromosikan. Kita akan coba sampaikan ke beberapa pihak tentang profile penceramah yang sudah mengikuti pelatihan," lanjutnya.

Kamaruddin yakin, tiga hari mengikuti penguatan kompetensi, telah terjadi proses transformasi akademik dan pengetahuan. Mantan Dirjen Pendidikan Islam ini optimis ke depan pihaknya bisa membangun sinergi untuk bersama-sama berkontribusi dalam proses berbangsa dan bernegara, membimbing umat ke arah yang lebih baik.

Menurutnya, ormas Islam dan penceramah adalah mitra strategis Pemerintah. Sinergi keduanya diharapkan dapat bersama-sama meningkatkan kualitas kehidupan beragama di Indonesia dan pada akhirnya bisa berkontribusi dalam proses berbangsa dan bernegara.

"Indonesia bangsa yang sangat religius, sehingga religiusitas di Indonesia sangat sentral dan fundamental. Kita diharapkan bisa bersama-sama memberikan saran dan masukan yang orientasinya untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara," tuturnya.

"Saya berharap peserta bisa segera beraktivitas memberi pencerahan umat. Kehadiran penceramah agama sangat dibutuhkan untuk memberi pencerahan kepada umat yang sangat majemuk," tandasnya.

Program penguatan kompetensi penceramah agama angkatan pertama dilaksanakan tiga hari, 29 September hingga

1 Oktober 2020 atau setara 24 jam pelajaran.

Guru Besar Ilmu Hadits UIN Alauddin Makassar ini mengatakan bahwa penguatan kompetensi penceramah angkatan kedua akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Bersamaan itu, akan berjalan juga kegiatan sejenis di Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.

"Penguatan kompetensi 8000 penceramah di daerah segera berjalan. Total

masing. Sehingga, mereka bisa memberikan informasi yang cukup kepada peserta.

"insya Allah kebijakan yang kita lakukan berorientasi pada kemaslahatan," tuturnya.

Kepada peserta angkatan pertama, Kamaruddin menyarankan untuk membentuk forum komunikasi sebagai wadah produktif dalam membangun ide bersama. Tujuannya, meningkatkan kualitas dan respon para penceramah terhadap



Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi



Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin

targetnya 8.200 penceramah, pusat dan daerah," terang Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, pihaknya akan mengawal dan berupaya agar kualitas program terjaga. Caranya, berusaha menghadirkan narasumber yang memiliki otoritas keilmuan pada bidangnya masing-

persoalan keummatan dan kebangsaan.

"Kami juga berharap peserta segera beraktivitas memberi pencerahan umat. Kehadiran penceramah agama sangat dibutuhkan untuk memberi pencerahan kepada umat yang sangat majemuk," tandasnya. ♦



## KEBERANGKATAN JEMAAH UMRAH MASIH MENUNGU IZIN DARI ARAB SAUDI

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menegaskan bahwa kepastian keberangkatan jemaah umrah Indonesia masih menunggu pengumuman dan izin dari Arab Saudi. sampai saat ini belum ada informasi resmi yang disampaikan berkenaan dengan kemungkinan akan diizinkan keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia.

**"B**elum ada kepastian terkait izin keberangkatan jemaah umrah Indonesia. Kita masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak perwakilan di KJRI Jeddah," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar, Kamis (1/10/20).

Memang, lanjutnya, Pemerintah Arab Saudi akan mulai memberikan izin penyelenggaraan umrah secara bertahap. Ada tiga tahap yang direncanakan. Pertama,

menizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana (mukimin) untuk menunaikan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020 M.

"Izin ini hanya untuk 30% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu: enam ribu jemaah umrah per hari," ujarnya.

Kedua, mengizinkan ibadah umrah dan salat di Masjidil Haram bagi warga negara Saudi dan mukimin mulai 18 Oktober 2020 M. "Jumlahnya bertambah menjadi 75% dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, atau 15 ribu jemaah umrah per hari dan 40 ribu jemaah salat per hari," jelasnya.

Ketiga, mengizinkan ibadah umrah dan salat bagi warga Saudi, mukimin dan warga dari luar kerajaan. Rencananya akan dimulai pada 1 November 2020 M. Pada tahap ini, Masjidil Haram diharapkan dapat menampung 100% sesuai hitungan pro-

tokol tindakan pencegahan, yaitu: 20 ribu jamaah umrah per hari dan 60 ribu jamaah salat per hari.

"Namun, ini masih menunggu pengu-  
muman resmi kondisi pandemi Covid-19,"  
tegas Nizar yang saat ini menjabat sebagai  
Plt Sekjen Kemenag.

"Kemenkes Saudi nanti akan merilis  
daftar negara dari luar kerajaan yang di-  
izinkan masuk atau memberangkatkan  
jemaah," harapnya.

Terpisah, Konsul Haji KJRI Jeddah En-  
dang Jumali menambahkan, GACA Cir-  
cular Saudi melalui surat No 4/6346 tang-  
gal 15 September 2020 telah merilis tiga  
negara yang sementara ini tidak diizinkan  
masuk ke sana untuk penerbangan non  
umrah, yaitu: India, Brazil, dan Argentina.  
"Jadi sampai sekarang belum ada pem-  
beritahuan resmi dari Saudi untuk pener-  
bangan umrah," jelasnya.

"Saat ini kita masih menunggu dan  
semoga Indonesia termasuk yang diizin-  
kan untuk memberangkatkan jemaah  
umrah pada 1 November mendatang,"  
tutupnya.

Arab Saudi telah mengumumkan akan  
kembali membuka penyelenggaraan um-  
rah secara bertahap. Arab Saudi juga  
menginformasikan bahwa akan merilis  
daftar negara yang diizinkan memberang-  
katkan jemaah umrah.

#### MENYIAPKAN REGULASI UMRAH DI MASA PANDEMI

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan  
Haji Khusus M. Arfi Hatim menyambut baik  
kebijakan Saudi. Dia berharap Indonesia  
masuk dalam daftar negara yang diizinkan  
memberangkatkan jemaah. "Mudah-mu-  
dahan Indonesia termasuk yang diizinkan  
untuk memberangkatkan ibadah umrah.  
Komunikasi dan koordinasi terus diban-  
gun melalui perwakilan pemerintah RI di  
Arab Saudi dengan pemerintah Kerajaan  
Arab Saudi," katanya.

Bersamaan itu, lanjut Arfi, pihaknya saat  
ini tengah menyiapkan regulasi umrah di  
masa pandemi. Regulasi ini dibutuhkan  
karena akhir dari pandemi Covid-19 ini  
belum diketahui. Selain itu, negara juga  
harus hadir dalam rangka memberikan  
pelayanan, pembinaan, dan perlindungan  
kepada jemaah umrah.

"Regulasi ini menitikberatkan pada as-  
pek kesehatan dan keselamatan jemaah.  
Beberapa yang sedang dibahas antara  
lain terkait penerapan protokol kesehatan,  
serta batasan usia dan ketentuan tentang  
penyakit bawaan/penyerta. Termasuk  
juga aturan skema transportasi dan aspek  
pelayanan lainnya yang diberikan oleh  
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

(PPIU)," jelasnya.

"Pembahasan regulasi ini melibatkan  
lintas kementerian dan lembaga terkait,  
terutama Kemenkes, Kemenhub, Kemen-  
lu, dan Satgas Penanganan Covid-19.  
Tentu asosiasi PPIU juga akan dilibatkan,"  
lanjutnya.

Arfi menegaskan, pembahasan regula-  
si ini juga akan memperhatikan kebijakan  
yang diterbitkan Saudi dalam penyeleng-  
garaan umrah di masa pandemi. Sebab,  
layanan umrah lebih banyak diberikan  
saat jemaah di Saudi. Misalnya, apakah  
Saudi akan menerapkan karantina atau  
tidak, mekanismenya seperti apa, dan  
bagaimana ketentuan yang terkait den-  
gan tes bebas covid-19. "Hal ini masih



**Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah\_Nizar**

dibahas bersama Kemenkes dan Satgas,"  
tegas Arfi.

"Kita masih kaji dan mempertimbang-  
kan segala risikonya. Kita tidak ingin ada  
kluster umrah sekembalinya mereka mel-  
aksanakan umrah, dan negara harus had-  
ir," sambungnya.

Arfi berharap jemaah tetap bersabar  
menunggu kebijakan dari Arab Saudi dan  
pemerintah kita serta tetap selalu menjaga  
kesehatan. Kemenag masih menunggu  
perkembangan kebijakan dari Saudi.

"Jika memang Indonesia diizinkan  
memberangkatkan jemaah, akan kita pri-  
oritaskan bagi mereka yang tertunda ke-  
berangkatannya sejak 27 Februari 2020,"  
tandasnya. ♦

# PERTENTANGAN PALSU ANTARA KESEHATAN DAN EKONOMI

*Health is not everything. But without health, everything is nothing. Kesehatan memang bukan segalanya. Tapi, tanpa kesehatan, segalanya jadi tak berarti.*

Ungkapan itu pernah menjadi slogan lembaga kesehatan Persekutuan Bangsa Bangsa World Health Organisation (WHO). Itu pula yang menjiwai pandangan-pandangan WHO dalam kaitannya dengan upaya menghadapi wabah Covid-19.

Jadi, dengan alasan itu, Direktur Jen-



deral WHO menegaskan, membingkai keputusan untuk memberlakukan lockdown COVID-19 berhadapan dengan membuka kembali ekonomi sebagai pilihan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi adalah dikotomi atau pertentangan yang palsu. "Itu adalah pilihan yang salah," kata Dr Tedros dalam pesan yang direkam sebelumnya dan diputar pada sesi pembukaan seminar online (webinar) mengenai Update Covid-19 di Universitas Nasional Singapura (NUS), Kamis, 17 September 2020.

Selebihnya, Tedros mendesak negara-

negara di dunia ini, "fokus pada empat prioritas penting." Prioritas pertama adalah mencegah pertemuan massal, seperti di stadion dan klub malam, yang jelas-jelas telah menunjukkan peningkatan "ledakan wabah".

Kedua, melindungi kelompok warga yang rentan, menyelamatkan nyawa dan mengurangi beban sistem kesehatan. Ketiga, memenuhi kebutuhan literasi masyarakat tentang jarak fisik, kebersihan tangan, etiket pernapasan, dan penggunaan masker untuk mengekang penularan.

Sedangkan yang keempat berhadapan langsung dengan wabah Covid-19. Caranya, menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat kasus, serta melacak dan mengkarantina kontak mereka.

"Sudah banyak contoh negara yang secara efektif mencegah atau mengenda-

**Direktur Layanan Medis Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura Kenneth Mak memberikan gambaran umum tentang situasi Covid-19 Singapura.**

likan wabah mereka dengan melakukan empat hal ini, dan melakukannya dengan baik. Tema umum di semua negara ini adalah komitmen terhadap persatuan nasional dan solidaritas global," katanya sambil menyebutkan Selandia Baru, Islandia, Senegal, Mongolia dan Singapura sebagai contoh yang layak ditiru.

Di acara ini pula, Direktur Layanan Medis Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura Kenneth Mak memberikan gambaran umum tentang situasi COVID-19 Singapura. Ia menguraikan beberapa pelajaran yang didapat dari upaya negara itu melawan virus corona, antara lain membuat badan pemerintah bekerja sama memimpin upaya segenap bangsa menekan

wabah Covid-19 sebagai salah satu faktor penting.

Ia menegaskan, cara-cara tradisional penanganan wabah dalam mengelola kelompok infeksi, pelacakan kontak dan isolasi telah terbukti efektif. Dia menyoroti bahwa meski Singapura telah melaporkan lebih dari 57.000 kasus COVID-19, hanya 40 orang yang masih dirawat di rumah sakit.

Sekitar 490 orang dengan gejala ringan ditempatkan di fasilitas perawatan komunitas. "Dengan melindungi mereka yang rentan, kami telah berhasil menjaga tingkat morbiditas dan komplikasi tetap rendah di sini di Singapura," kata Kenneth Mak.

Sedangkan Tedros mengemukakan, perkembangan baru bahwa lebih dari 170 negara telah bergabung dalam rencana global untuk mendistribusikan vaksin secara adil di seluruh dunia, dan prioritas utama WHO untuk vaksin adalah keamanan. Sebuah program yang dinamai Covax dan negara yang berpartisipasi diberi waktu sampai dengan Jumat, 18 September 2020

"Vaksin pertama yang disetujui mungkin bukan yang terbaik. Semakin banyak tembakan ke gawang yang kita miliki, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan vaksin yang sangat aman dan sangat manjur," kata Dr Tedros.

Ia mengaku, WHO sudah menghadapi tantangan dengan menerima vaksin dengan banyak jenis yang sudah terbukti ampuh sesuai dengan jenis penyakitnya. Jadi, kata dia, "Kita tidak bisa mengambil risiko memiliki vaksin yang efektif untuk Covid-19 yang ditolak orang karena dianggap tidak aman."

Namun, ia menegaskan, hal-hal teknis dan ilmiah seperti keandalan vaksin bukanlah persoalan utama pada saat ini, melainkan karakter bangsa-bangsa. "Ini adalah ujian karakter: Bisakah negara bersatu dalam solidaritas untuk berbagi hasil penelitian, atau akankah nasionalisme yang salah arah memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang telah merusak dunia kita?"

Terlebih, kata dia memperingatkan, Covid-19 tidak akan menjadi pandemi terakhir, Tedros mengatakan bahwa dunia harus siap ketika wabah berikutnya melanda. "Tidak pernah lebih jelas lagi bahwa kesehatan adalah pilihan politik dan ekonomi. Dalam 20 tahun terakhir, negara-negara telah berinvestasi besar-besaran dalam mempersiapkan serangan teroris, tetapi relatif sedikit dalam mempersiapkan serangan virus, yang, sebagaimana dibuktikan oleh pandemi, bisa jauh lebih mematikan, mengganggu, dan mahal," katanya.

Dr Tedros mengatakan pandemi telah

**MC** *Rupanya Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengumpulkan sampel data sekeuing genom melalui mutasi virus D614G pada virus Covid-19 yang ditemukan di Indonesia. "Mutasi Virus D614G dapat menular tetapi memiliki siklus yang lebih ringan setelah ditemukan di dalam data sekuensing genom, dari data sampel yang dikumpulkan oleh Institut Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman tersebut," kata Wakil Direktur Herawati Sudoyo pada Senin, 31 Agustus 2020.*

mengubah dunia. "Kehidupan dan mata pencaharian telah hilang, ekonomi dan masyarakat telah jungkir-balik," katanya. "Pandemi telah mengungkapkan dan mengeksploitasi rentetan kesalahan dan ketidaksetaraan politik serta kesenjangan dalam sistem kesehatan nasional."

Pertanyaan sebenarnya adalah apakah negara-negara dapat bersatu dalam solidaritas untuk berbagi hasil penelitian ketika vaksin yang layak tersedia.

Dr Tedros berkata: "Virus tumbuh subur dalam perpecahan. Tapi bersatu, kita bisa mengalahkannya. Pandemi telah mengingatkan kita pada kebenaran sederhana - bahwa untuk semua perbedaan kita, kita adalah satu ras manusia dan kita bersamasama lebih kuat."

Tetapi dengan catatan yang lebih positif, dia mengatakan untuk semua yang direnggut Covid-19 dari kita, itu juga memberi sesuatu pengingat tentang apa yang benar-benar penting dan peluang untuk menempa masa depan bersama. Ya itu tadi: Kesehatan memang bukan segalanya. Tapi, tanpa kesehatan ya percuma. ♦

## 15 KEUTAMAAN SEDEKAH DI HARI JUMAT

Rasulullah Shallallahu Alihi Wasal-lambersabda, "Hari terbaik yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Sebab pada hari itu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam as. Dia memasukan Adam ke surga, pada hari itu ia diturunkan ke bumi dan pada hari itu terjadi kiamat serta pada hari itu terdapat satu masa di mana tidak seorangpun berdoa kecuali Dia akan mengabulkan doa itu." [HR.Muslim].

**K**arena itulah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam amat mengagungkan, mengistimewakan dan juga memuliakan hari Jumat jika dibandingkan dengan hari yang lain. Beliau juga turut memperbanyak ibadah pada hari itu. Berikut beberapa keutamaan dari bersedekah di hari Jumat:

### 1. SEPERTI SEDEKAH BULAN RAMADHAN

Keutamaan melakukan sedekah di hari Jumat jika dibandingkan dengan hari lainnya adalah karena bersedekah di hari itu sama halnya seperti sedekah di bulan Ramadhan.

Ibnu Qayyim berkata, "Sedekah di hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadhan dibandingkan sedekah di bulan-bulan selainnya."

### 2. PAHALA BERLIPAT GANDA

Hari Jumat juga menjadi hari terbaik dimana nilai dan juga segala macam pahala akan dilipat gandakan, sehingga melakukan sedekah di hari Jumat akan memperoleh pahala yang berlipat ganda.

### 3. MEMPERKUAT IMAN

Ibadah merupakan salah bentuk pengabdian yang dilaksanakan seorang hamba pada Allah SWT dan bersedekah dengan niat ibadah di hari Jumat pada Allah maka akan semakin memupuk keimanan seseorang pada Allah SWT.

### 4. MEMBERI BERKAH REZEKI DAN KELUARGA

Sedekah di hari Jumat juga akan membuahkan keajaiban serta pertolongan yang tidak pernah di duga sebelumnya seperti aliran rezeki yang semakin lancar. Sedekah sendiri tidak selalu harus berupa materi, akan tetapi juga bisa dalam bentuk bantuan atau tenaga yang juga termasuk dalam sedekah pada orang lain.

### 5. MEMPERKUAT TALI SILAHTURAHMI

Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan pernah mengetahui

kapan kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan memperbanyak sedekah khususnya di hari Jumat, maka bisa dijadikan sebuah cara untuk menambah keluarga baru, kerabat baru atau teman baru. Sebab, kita tidak akan pernah mengetahui seperti apa kehidupan seseorang kelak dan saat kita membutuhkan bantuan, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan membantu kita.

### 6. MERUPAKAN AMALAN MULIA

Keutamaan berikutnya tentang sedekah pada hari Jumat adalah karena sedekah pada hari Jumat merupakan amal mulia yang dikerjakan pada hari paling mulia dibandingkan dengan amal yang dilakukan pada waktu kurang mulia lainnya.

### 7. HARI YANG DIANJURKAN UNTUK AMAL SOLEH

Dianjurkan juga untuk semakin memperbanyak sedekah serta amal soleh pada hari Jumat atau malam Jumat. Memperbanyak shalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam atau siang hari di hari Jumat sebab shalawat dan sedekah yang sudah dilakukan pada hari Jumat akan diperlihatkan untuk Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

Dianjurkan memperbanyak sedekah dan beramal soleh di hari jumat atau malam jumat. Memperbanyak shalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam di malam atau siang hari Jumat. Berdasarkan hadis: "Sesungguhnya hari yang paling afdhal adalah hari Jumat. Karena itu, perbanyaklah membaca shalawat untukku. Karena shalawat kalian diperlihatkan kepadaku." [al-Iqna', 1/170].

### 8. MEMILIKI KEISTIMEWAAN KHUSUS

Sedekah yang dilakukan pada hari Jumat juga mempunyai keistimewaan khusus jika dibandingkan dengan beberapa hari lainnya. Sedekah pada hari jumat dibandingkan dengan hari lain tersebut seperti layaknya perbandingan sedekah di bulan Ramadhan dibandingkan dengan sedekah pada bulan lainnya.

Saya pernah melihat Syaikhul Islam - rahimahullah - apabila beliau berangkat jumat, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan diam-diam. Saya pernah mendengar beliau mengatakan, "Apabila Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka bersedekah sebelum menghadap Allah lebih afdhal dan lebih besar keutamaannya." [Zadul Ma'ad, 1/407].

### 9. HARI TERBAIK DALAM SEPEKAN

Allah juga sudah menyiapkan ampunan, pengabulan doa dan juga pahala yang sangat besar bagi setiap hamba beriman dan oleh karena itu, hendaknya amal shalih dan juga ketaatan lebih ditingkatkan khususnya pada ibadah yang diagungkan di dalamnya seperti shalat Jumat, lebih memperbanyak shalawat, membaca surat Al-Kahfi dan sebagainya.

### 10. DILIMPAHKAN KARUNIA

Salah satu amal shalih yang sangat mendapat perhatian dari

para ulama adalah sedekah yaitu mengeluarkan infak dan juga sedekah pada hari dimana Allah sudah melimpahkan karunia serta kebaikan untuk setiap hamba-Nya. Sedekah yang dilakukan pada hari jumat sangat lebih baik dan lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan hari lain selain hari jumat.

Ibnu al-Qayyim Rahimahullah berkata tentang keutamaan hari Jumat, "Bahwasanya sedekah di hari Jumat dibandingkan semua hari dalam sepekan seperti sedekah di bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan selainnya."

Beliau memberi kesaksian bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -Qaddasallahu ruhahu- apabila keluar shalat Jumat membawa roti atau selainnya yang ada di ru-

menunaikan sholat jumat dan juga sangat dianjurkan untuk memberi sedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Hal ini juga sejalan dengan keterangan dari Ibnu Qoyim dalam kitab Zadul Ma'ad, "Saya pernah melihat Ibnu Taimiyah apabila beliau berangkat jumat, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya, dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan dengan diam-diam. Ibnu Taimiyah sendiri adalah pemikir dan ulama Islam yang hidup sekitar tahun 661-728 Hijriah.

### 13. HARI MEMOHON KEBAIKAN

Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam 'Abdurrazaq ash-Shan'ani rahimahullah dari Imam Sufyan ats-Tsauri, dari Mansur,

daripada sedekah di hari lainnya. Ibnu Taimiyah jika keluar menuju Jum'at beliau bawa apa yang ada di rumahnya lalu beliau sedekahkan dalam perjalanannya menuju masjid secara sembunyi-sembunyi".

Sedekah yang dilakukan pada hari Jumat ini juga sangat disarankan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat melakukan perjalanan ke masjid sebelum shalat jumat.

### 15. SEDEKAH AKAN DIBALAS 700 KALI LIPAT

Alquran Surah Al Baqarah Ayat 261, "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan



mahnya lalu menyedekahkannya secara sembunyi-sembunyi di jalan yang dilaluinya.

### 11. MERUPAKAN SUNNAH RASULILLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM

Dalam Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib tentang hari Jumat disebutkan jika, "Disunnahkan memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan di siang dan malam hari Jumat. Juga disunnahkan memperbanyak shalat atas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam di siang dan malam harinya berdasarkan khobar."

### 12. DILAKUKAN SEBELUM SHOLAT JUMAT

Sedekah di hari Jumat hendaknya juga dilakukan sebelum berangkat pergi untuk

dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu 'anhuma, "Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengannya dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala melainkan Dia akan mendatangkan kebaikan itu kepadanya."

Dengan hari penuh kebaikan pada hari Jumat ini, maka sedekah yang dilakukan khususnya pada hari Jumat akan memberikan kebaikan yang lebih berlipat ganda dibandingkan dengan hari lainnya dan kebaikan yang bisa dilakukan diantaranya adalah sedekah pada hari Jumat tersebut.

### 14. SEDEKAH DILAKUKAN SEMBUNYI SEMBUNYI

Sedekah pada hari Jum'at lebih baik

kan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam ayat tersebut, Allah sudah dengan jelas menyebutkan perhitungan sistematis atas apa yang sudah kita keluarkan dari harta untuk bersedekah. Apabila dari perhitungan matematis ayat diatas, maka sedekah yang sudah diberikan khususnya untuk hari Jumat akan dibalas sampai 700 kali lipat dan Allah juga menekankan akan membalas sedekah untuk siapa pun yang Allah SWT kehendaki. ♦ nurul aziz



## 7 Artis Ibukota Maju di Pilkada 2020

# DARI SAHRUL GUNAWAN HINGGA IYETH BUSTAMI

Pesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 menjadi isu yang hangat dan menjadi perbincangan masyarakat sejak beberapa bulan terakhir ini.

Sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan Pilkada, tahap pendaftaran dan pelaporan harta kekayaan telah dilakukan oleh para bakal calon kepala daerah masing-masing pada Sabtu, 5 September 2020 lalu.

Deretan Partai Politik turut serta dalam memberikan dukungan kepada para Calon Kepala Daerah dan Wakil Calon Kepala Daerah yang mereka usung dalam Pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Selain wajah-wajah lama yang secara umum telah dikenal masyarakat sebagai politikus, Pilkada tahun 2020 ini juga diramaikan dengan munculnya para bakal

calon yang datang dari dunia hiburan.

Sejumlah selebriti pun tercatat akan ikut maju dalam Pemilihan Kepala Daerah. Setelah menjalani proses pendaftaran dan telah ditetapkan sebagai Calon, maka mereka kini akan memasuki tahapan kampanye Pilkada di daerah masing-masing.

Dihimpun dari Berbagai Sumber, Berikut 7 Artis yang Siap Maju dalam Pilkada 2020:

### 1. SAHRUL GUNAWAN

Aktor Sahrul Gunawan menambah deretan kalangan artis yang terjun ke politik. Pria yang dikenal sebagai bintang sinetron ini memutuskan maju sebagai calon Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten

Bandung 2020. Dia akan mendampingi Dadang Supriatna sebagai Calon Bupati Kabupaten Bandung. Keduanya telah resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung.

Dilihat dari postingannya di Instagram, pemain sinetron Jin dan Jun ini telah mulai 'bergerilya' terjun ke masyarakat.

Lalu, apakah itu berarti Sahrul Gunawan akan meninggalkan dunia keartisanannya jika hijrah ke dunia politik? Bintang berusia 44 tahun ini mengatakan, meskipun telah terjun ke dunia politik, namun profesinya sebagai entertaimen tidak akan ditinggalkan.

"Saya tidak meninggalkan entertainment, apakah harus seorang politisi meninggalkan entertain? Kan enggak juga. Artinya jangan memilah-milah bahwa ini ada kotaknya (profesi) di sini dan kotaknya di sini," jawabnya tegas.

Dadang dan Sahrul termasuk pasangan calon yang pertama mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Bandung. Keduanya didukung oleh empat partai, yaitu PKB, Nasdem, Demokrat dan PKS.

Aktor yang memiliki kekayaan lebih dari Rp 22 Milyar ini yakin, bahwa jika dipercaya rakyat, maka dirinya bisa membantu Dadan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

"Karena saya ingin bersama masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin ada perubahan yang signifikan. Yang sebetulnya pemerintah daerah itu hanya memberikan wadahnya saja untuk semuanya bisa beraktualisasi dan membantu seluruh masyarakatnya bukan memperkaya dirinya," tambahnya.

Sebelumnya, Sahrul pernah gagal dalam pemilihan calon Legislatif DPR RI periode 2019-2024 yang diusung Partai nasdem dari Dapil Jawa Barat V.

## 2. ADLY FAIRUZ

Aktor Adly Fairuz juga akan bertarung dalam Pilkada. Atas rekomendasi dari DPP PDIP, Adly Fairuz akan bertarung di wilayah Karawang, Jawa Barat. Pemain sinetron Cinta Fitri itu maju sebagai Calon Wakil Bupati mendampingi Yessy Karya Lianti sebagai Calon Bupati Karawang.

Pasangan Yessy Karya Lianti dan Adly Fairuz selain diusung oleh partai PDIP, juga didukung oleh tiga Partai lainnya yaitu PBB, PAN, dan PPP.

Dan pasangan tersebut mendapat nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Karawang yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang. Usai pemilihan nomor urut, suami Angbeen Rishi

itu mengaku siap secara lahir dan batin untuk berjuang sekuat tenaga bersama masyarakat memenangkan kontestasi.

"Alhamdulillah. Insya Allah siap lahiriah dan bathiniah," kata Adly Fairuz.

Adly mengaku akan mengunjungi desa-desa di Kabupten Karawang, untuk bertemu dengan masyarakat dan memaparkan rencana-rencana yang akan dilakukan apabila diberikan kepercayaan menjadi pemimpin di sana.

"Seoptimal mungkin silaturahmi dengan masyarakat untuk mengutarakan visi dan misi," katanya lebih lanjut.



**MC** *Aktor Adly Fairuz juga akan bertarung dalam Pilkada. Atas rekomendasi dari DPP PDIP, Adly Fairuz akan bertarung di wilayah Karawang, Jawa Barat. Pemain sinetron Cinta Fitri itu maju sebagai Calon Wakil Bupati mendampingi Yessy Karya Lianti sebagai Calon Bupati Karawang.*

Aktor kelahiran Jakarta, 14 April 1987 ini mengusung tagline kampanye #EnergiBaruKarawang, untuk berusaha merebut hati calon pemilih. Adly menegaskan, bahwa dirinya akan tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun harus datang ke desa-desa di Karawang dan bertemu dengan masyarakat. Rajin cuci tangan, menjaga jarak fisik dan menggunakan masker akan dilakukannya ketika terjun ke masyarakat.

Yesi Karya Lianti dan Adly Fairuz diketahui resmi mendaftar sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupten Karawang pada 4 September ke KPU setempat. Mereka akan bersaing melawan petahana yaitu pasangan Cella Nurrachadiana- Aep Saepulloh.

Tidak hanya itu, Yesi-Adly Fairuz juga harus berhadapan dengan pasangan Ahmad Zamakhsyari-Yusni Rinzani di Pilbub Karawang.

## 3. LUCKY HAKIM

Lucky Hakim yang merupakan mantan anggota DPR RI 2014-2019, tahun 2020 ini maju di Pilkada Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Bupati. Dia akan mendam-

pingi Nina Agustina yang menjadi Calon Bupati, yang tak lain adalah putri mantan Kapolri, Da'i Bachtiar.

Lucky Hakim sendiri mendapatkan rekomendasi dari PDIP, Nasdem dan Partai Gerindra.

Lucky Hakim menganggap bahwa pertarungannya kali ini untuk memper-  
ebutkan pimpinan daerah di Indramayu sebagai kelanjutan dari perjuangan politiknya usai nyaleg mencalonkan diri menjadi DPR RI dapil Jabar 6 pada pemilu legislatif periode 2014-2019.

Dan keputusan dari pria berusia 42 tahun itu untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Indramayu tidak lepas dari dorongan kuat yang diberikan keluarga.

"Awalnya di 2014

saya nyaleg DPR dapil Jabar 6 Kota Bekasi dan Kota Depok. Tapi diskusi keluarga mendorong saya untuk pulang kampung ke Indramayu," katanya beberapa waktu lalu.

Dia mengakui, meski bukan orang yang terlahir di Indramayu, namun Lucky memiliki darah Indramayu dari ibunya yang berasal dari Kedokan Indramayu.

"Juga ada beberapa dorongan dari sahabat di partai dan beberapa organisasi. Mereka mengajak bertemu, ngobrol, diskusi panjang lebar dan akhirnya saya semakin mantap ikut Pilkada di Indramayu," ujar artis kelahiran Cilacap, 42 tahun silam tersebut.

Bermodalkan popularitas yang kini digenggamnya sebagai artis, Lucky Hakim mengaku tidak mempersiapkan dana besar untuk bertarung dalam Pilkada 2020. Lucky mengaku dirinya lebih banyak mengandalkan jaringan keluarga besar di Indramayu dan ditopang oleh jaringan partai serta relawan.

"Saya tidak punya sponsor. Modal utamanya adalah jaringan partai dan *the power of silaturahmi*. Tetu banyak dibantu teman-teman relawan, kader-kader militan partai pengusung dan pendukung," tandas Lucky Hakim.

#### 4. DAVID CHALIK

Aktor kenamaan David Chalik juga turut bertarung dalam Pilkada 2020 untuk kawasan Sumatera Barat. Pemain film Liam dan Laila itu maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Bukittinggi, mendampingi

**MC** Lucky Hakim menganggap bahwa pertarungannya kali ini untuk memper-  
ebutkan pimpinan daerah di Indramayu sebagai kelanjutan dari perjuangan politiknya usai nyaleg mencalonkan diri menjadi DPR RI dapil Jabar 6 pada pemilu legislatif periode 2014-2019.



Calon Wali Kota Bukittinggi, Irwandi.

Pasangan Irwandi dan David Chalik didukung oleh partai politik PAN, PKB, dan Nasdem. Artis, pesinetron sekaligus pengusaha yang merupakan pria berdarah Minangkabau itu maju dalam Pilkada 2020 karena niat ingin memajukan daerah asl usulnya, Bukittinggi.

David Chalik memastikan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). Artis, pesinetron sekaligus pengusaha ini berpasangan dengan Irwandi, yang merupakan wakil wali kota Bukittinggi saat ini.

Dalam kontestasi Pilkada tersebut, David Chalik sebagai calon wakil wali kota, sedangkan Irwandi calon wali kota. Pasangan ini diusung tiga partai sekaligus, di antaranya Nasdem, PAN dan PKB.

Irwandi dan David Chalik merupakan putra asli Kota Bukittinggi. David mengaku jatuh bangun berpolitik. Baginya, sudah saaatnya untuk tampil dalam menata Kota Bukittinggi untuk lebih baik bersama Irwandi, yang berpengalaman di bidang birokrasi dan pemahaman pengelolaan yang bagus.

Menurut David, untuk mengelola pemerintahan tidak hanya cukup dengan kata goodwill atau niat baik. Namun juga segala sesuatu harus dengan perencanaan yang baik.

"Untuk mendata Bukittinggi sudah tepat pilihan, jika insyallah, diarahkan pilihan kita wali kota untuk putra daerah yang memiliki background pemahaman pengelolaan yang baik. Karena mengelola pemerintahan itu tidak hanya cukup dengan goodwill," katanya.

"Segala sesuatu niat baik, harus cara baik dan perencanaan baik. Saya lihat



dengan pengalaman Inyik Batujuah (Irwandi) sebagai birokrat dan beliau terakhir sebagai wakil wali kota, adalah modal besar yang saya yakin menjadikan Bukittinggi jadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan," tambahnya.

Bersama Irwandi, salah satu fokus David Chalik dalam memimpin pemerintahan Kota Bukittinggi adalah pembenahan masalah perekonomian umat, khususnya masalah perdagangan.

Menurutnya, Kota Bukittinggi sebagai dasar pijakan adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Maka itu, David Chalik menyediakan alternatif pilihan di dalam lembaga keuangan. Sehingga pedagang, terutama PKL dan UMKM bisa mendapatkan solusi dukungan pendanaan mulai pemerintah pusat dan daerah.

"Lembaga keuangan Islam yang syariah, dan mudah-mudahan juga bisa disupport di pemerintahan ke depan bersama Pak Irwandi," tuturnya.

David Chalik mengatakan, dirinya juga akan fokus mengembalikan pendidikan dan pengembangan pemahaman untuk kembali ke surau kepada generasi penerus. Bagi laki-laki di Ranah Minang, pendidikan dasar adalah di surau.

"Dengan pemahaman ini, insyaallah lima tahun atau 10 tahun ke depan lahir generasi penerus baru yang lebih baik. Karena apa? Tantangan ke depan bangsa Indonesia tak hanya kecerdasan, tapi adalah krisis moral," ujarnya.

"Nah dengan kembalikan pemahaman kita dan meletakkan pijakan ke agama, insyaallah masalah moral dan akhlak pelan-pelan bisa dibenahi. Terlebih masalah hal-hal lainnya yang menjadi tantangan ke depan," sambungnya penuh semangat.

Bagi David Chalik, terjun di dunia politik bukanlah hal yang baru. Dia telah memutuskan meninggalkan dunia entertainment sejak tahun 2007 dan banyak belajar dan mencari pengalaman sebagai politikus.

Bahkan, saat ini, David Chalik sedang mengambil pendidikan pascasarjana tafsir Al-Quran di Institut PTIQ Jakarta. Tak hanya itu, dia juga mengambil jurusan Islamic Finance (ekonomi syariah) di Universitas Paramadina.

David Chalik juga dikenal sebagai pengusaha sukses. Dia mengaku berkomitmen untuk membangun Kota Bukittinggi.

"Saya belajar menikmati proses, jatuh bangun berpolitik. Alhamdulillah, pada tahun 2020 ini saya mencoba untuk memberikan kemampuan dan pengetahuan saya, bersama Inyik Batujuah untuk

**MC** *Iyeth mengatakan, salah satu motivasinya maju di Pilkada Bengkalis adalah ingin mengembangkan Bengkalis, khususnya dalam melestarikan kesenian tradisional Melayu.*

bisa memimpin Bukittinggi ke depan," jelasnya.

## 5. IYETH BUSTAMI

Penyanyi dangdut Iyeth Bustami mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bengkalis pada Pilkada 2020. Pemilik nama asli Sri Barat itu akan mendampingi Kaderismanto sebagai Calon Bupati Bengkalis.

Iyeth mengatakan, salah satu motivasinya maju di Pilkada Bengkalis adalah ingin mengembangkan Bengkalis, khususnya dalam melestarikan kesenian tradisional Melayu.

"Saya telah berjuang untuk melestarikan budaya Melayu (sebagai penyanyi) sejak dulu hingga di titik sekarang ini. Memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sekarang ini budaya kita tergeserkan oleh kemajuan teknologi. Saya sangat sedih dengan kondisi anak-anak milenial yang sekarang ini cenderung tidak mau viralkan budaya kita.

Mereka lebih cinta dengan budaya luar," kata Iyeth Bustami saat berada di Pekanbaru beberapa waktu saat itu.

Iyeth mengaku, akan berupaya untuk menguatkan budaya serta mengajak peran ibu-ibu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada anak-anaknya agar tetap bisa mencintai budaya Melayu.

Terkait keterlambatannya muncul di kontestasi Pilkada Bengkalis 2020, Iyeth mengaku perlu mematangkan sikap untuk maju. Dia mengaku, bukan pertama kali terjun ke dunia



politik, namun dia pernah menjadi calon anggota DPR RI pada 2014, namun gagal.

Pelantun lagu 'Laksmiana Raja di Laut' itu juga mengaku, bukan orang baru di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi partai pendukungnya dalam Pilkada Bengkulu. Sebab, saat di pemilihan legislatif 2014, dia maju dari partai PKB.

"Saat ini saya merasa harus kembali ikut berjuang membangun Bengkulu. Sebab, ini adalah kampung halaman saya. Saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Bengkulu, untuk bersama-sama gunakan hati nurani yang tulus dan ikhlas menentukan nasib kampung halaman kita ke depan. Agar menjadi lebih baik bersih dan bermartabat," tegasnya.

Sementara itu, Kaderismanto mengatakan, dirinya maju di Pilkada Bengkulu

Bengkalis. Dengan APBD yang begitu besar tapi belum mampu menyentuh semua kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat," kata Kaderismanto.

Dengan mengantongi pengalaman dua periode sebagai anggota DPRD Bengkulu, Kaderismanto memahami betul tentang apa yang terjadi di Kabupaten Bengkulu. Oleh karenanya, dia bercita-cita untuk betul-betul memanfaatkan APBD di Bengkulu demi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terselesaikan, baik di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan, begitu juga lainnya seperti pariwisata dan infrastruktur.

Tak hanya itu, Kaderismanto juga menyebutkan banyak potensi-potensi daerah yang sampai saat ini belum tergalai dan belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal Bengkulu sebuah kabupaten yang cukup kaya sumber daya alamnya.

## 6. FADIA A RAFIQ

Masih ingatkah Anda dengan nama Laila Fadia Elfouz Rafiq, pelantun lagu dangdut Cik Cik Bum Bum? Anak dari penyanyi dangdut senior, almarhum A Rafiq ini kembali maju sebagai bakal calon Kepala Daerah di Pilkada Pekalongan.

Mantan biduan dangdut itu, kini resmi mengantongi rekomendasi dari DPP Golkar dan DPP PDIP. Iya, Fadia akan ikut meramaikan bursa Calon Bupati Pekalongan di Pilkada Desember 2020 mendatang. Fadia akan berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Pekalongan, Riswadi.

"Ya persiapan seperti biasa saja, menguatkan teman-teman partai semua yang mendukung dan tim-tim relawan pada hari ini semakin menguat juga," kata Fadia beberapa waktu lalu saat berada di Kantor DPC PDIP Pekalongan, Jalan Teuku Umar, Tanjung Sari, Kabupaten Pekalongan.

Fadia hadir bersama suaminya, Ashraf Khan yang kompak mengenakan setelan baju warna merah. Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016 ini mengaku siap membangun kampung halamannya dan bakal mengajak teman-teman artisnya untuk berkampanye.

"Itu pasti, kita siap. Insyaallah tokoh-tokoh Nasional akan turun di Kabupaten Pekalongan, karena ini kampung halaman kita. Kita bertekad perubahan untuk Pekalongan lebih maju," ucap Fadia yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan.

Fadia menyebut, selain Golkar dan PDIP, pihaknya optimistis mengantongi rekomendasi dari parpol lain. Dia menyebut hingga saat ini, hanya ada satu parpol yang belum mengusung dirinya maju di



2020 karena diberikan kepercayaan oleh PDIP. Sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Riau, Kaderismanto bertekad untuk maju dengan modal 6 kursi di DPRD Bengkulu.

Apalagi saat ini, dia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkulu dari partai berlambang banteng tersebut. Kemudian Kaderismanto mendapat dukungan dari PKB dengan berpasangan dengan Iyeth Bustami. PKB menyumbang 3 kursi sehingga mencukupi untuk maju dengan persyaratan minimal 9 kursi di DPRD Bengkulu.

"Niat dan semangat maju pada Pilkada Bengkulu 2020 ini, tentu tidak terlepas dari melihat kondisi real yang pada akhir-akhir ini cukup memprihatinkan di

**MC** *Mantan biduan dangdut itu, kini resmi mengantongi rekomendasi dari DPP Golkar dan DPP PDIP. Iya, Fadia akan ikut meramaikan bursa Calon Bupati Pekalongan di Pilkada Desember 2020 mendatang. Fadia akan berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Pekalongan, Riswadi.*

Pilkada Pekalongan 2020 ini.

Fadia dan Riswadi bakal berpasangan sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan 2020. Fadia merupakan Ketua DPC Golkar Pekalongan, sedangkan Riswadi merupakan Ketua DPC PDIP Pekalongan.

## 7. FIRMAN MUTAKIN

Aktor Firman Mutakin memilih ikut dalam Pilkada 2020 sebagai calon Wakil Bupati Cilegon. Pemain sinetron Cinta Fitri itu mendampingi calon Bupati Cilegon, Ali Mujahidin.

Pasangan Ali Mujahidin dan Firman Mutakin akan maju lewat jalur independen dengan sekitar 39.262 bukti dukungan dari masyarakat Kota Cilegon.

**MC** *Bakal Calon Wakil Wali Kota Cilegon, Firman Mutakin mengatakan, keputusannya untuk maju pada Pilkada Kota Cilegon 2020 karena ingin memberikan kontribusi, agar kota kelahirannya semakin maju dan lebih baik.*

sesuatu yang lebih baik buat Cilegon. Kenapa tidak?," kata Firman kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sejauh ini, keputusannya untuk terjun ke dunia politik dan bertarung di kancah Pilkada didukung penuh oleh teman-teman artis dan keluarga.

"Teman-teman (artis) support terbesar adalah teman teman, keluarga saya, masyarakat saya yang ada di kota Cilegon yang menjadi kekuatan kita," ujar Firman.

Sementara itu, bakal calon Wali Kota Cilegon, Ali Mujahidin menambahkan, konsolidasi terus dilakukan guna memperkuat dukungan yang sudah ada. Hal itu dilajukan agar pasangan yang mempunyai slogan Perubahan Cilegon itu Adil, Makmur dan Sentosa dapat memenang-



Bahkan saat mendatangi kantor KPU Cilegon, pasangan yang dikenal dengan Mumu-Lian ini dikawal oleh puluhan pendukungnya yang didominasi oleh emak-emak alias ibu-ibu.

Bakal Calon Wakil Wali Kota Cilegon, Firman Mutakin mengatakan, keputusannya untuk maju pada Pilkada Kota Cilegon 2020 karena ingin memberikan kontribusi, agar kota kelahirannya semakin maju dan lebih baik.

"Cilegon kota kelahiran saya, saya besar disini. Jadi, sekiranya sudah kewajiban saya ketika saya bisa memberikan

kan kontestasi di Pilkada Cilegon.

"Kita punya loyalis, punya militan. Kita percaya militan kita terus bergerak, terus konsolidasi, terus menggalang, mengajak temannya, keluarga untuk gimana Cilegon berubah," kata Mumu alias Ali Mujahidin.

Firman Mutakin menyatakan, bahwa untuk sementara dirinya tak lagi menerima tawaran untuk bermain dalam sinetron serta film, sejak maju dalam Pilkada Cilegon 2020 ini. Setidaknya, dia ingin lebih focus dan serius di karier barunya ini.

◆mt/berbagaisumber

# BELT AND ROAD INITIATIVE MENGULANG KESALAHAN YANG SAMA

Sebuah kajian dengan banyak studi mengenai sabuk dan jalan (Belt and Road) Tiongkok mengungkapkan risiko global yang mengintai proyek-proyek itu. *Belt and Road Initiative Tiongkok* adalah visi geoekonomi yang paling ambisius dan banyak yang belum memahaminya.

"Sabuk" mengacu pada hubungan darat yang lebih baik antara Eropa dan Asia, dengan banyak menyebutkan Jalur Sutra, bahkan meskipun negara-negara Amerika Selatan dan Afrika telah tercakup. "Jalan", yang membingungkan, adalah penghubung maritim Tiongkok ke Eropa melalui Terusan Suez.

Buku ini menawarkan gambaran kenyataan tentang proyek infrastruktur global Beijing, dengan menjelaskan: "Pelabuhan tanpa kapal, kereta api tanpa penumpang, bandara tanpa penerbangan, dan zona perdagangan bebas yang sebagian besar justru tanpa perdagangan". Tanpa terkecuali, proyek-proyek Tiongkok di Indonesia juga menjadi bahasan buku ini. Antara lain mengenai proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta (halaman 117-8), dan beberapa halaman lain yang mengulas hubungan bisnis-investasi Jepang di Indonesia dengan masuknya proyek Tiongkok.

Untuk melaksanakan upaya kebijakan luar negeri utama Presiden Xi Jinping, Tiongkok berjanji membelanjakan lebih dari satu triliun dolar AS untuk proyek pembangunan pelabuhan baru, jalur kereta api, kabel serat optik, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya. Rencana tersebut mencakup lebih dari seratus tiga puluh negara dan telah meluas ke Kutub Utara, dunia maya, dan bahkan luar angkasa. Beijing mengatakan sedang mempromosikan pembangunan global, tetapi dalam hal ini Washington memperingatkan bahwa Tiongkok sedang memetakan jalan menuju dominasi global.

Buku ini mengantarkan pembacanya menyusuri perjalanan dan menganalisis proyek-proyek Tiongkok di Asia, Eropa, dan Afrika. Jonathan E Hillman mengungkapkan bagaimana visi besar itu secara terbuka. Gerakan Tiongkok keluar perbatasannya dan jauh ke dalam wilayah berbahaya, menurut Hillman, mengulangi kesalahan kekuatan besar yang datang

sebelumnya. Sekiranya berhasil, Tiongkok akan mengubah dunia dan menempatkan dirinya di pusat segalanya. Tetapi Xi mungkin melampaui batas: semua jalan belum mengarah ke Beijing.

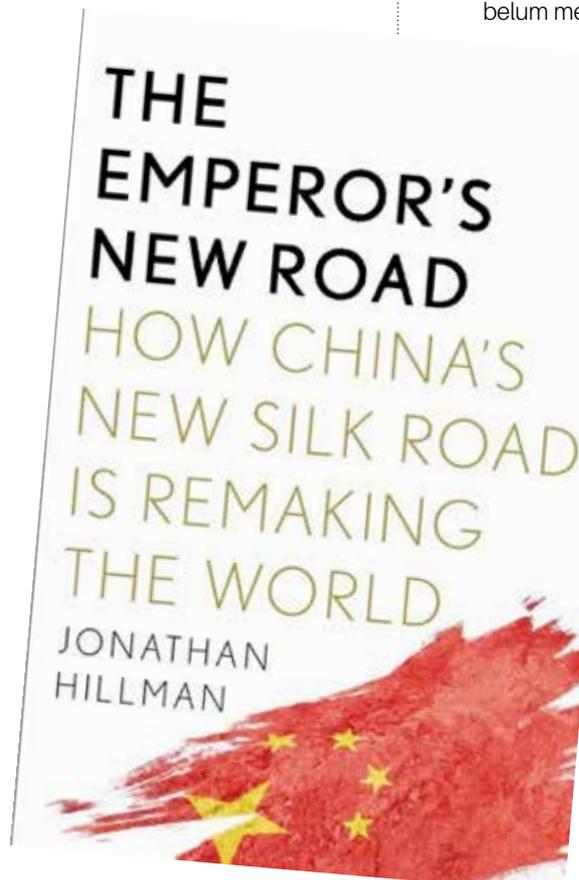
Hillman, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), adalah Direktur Reconnecting Asia Project, salah satu basis data paling luas yang melacak *Belt and Road Initiative Tiongkok*. Ia memang beberapa kali menuliskan pandangannya tentang *Belt and Road Initiative Tiongkok*, yang dimulai pada 2013, memicu korupsi, merusak lingkungan, menciptakan ketergantungan finansial dan memperluas kekuatan militer.

Namun, catatan Hillman menunjukkan tidak ada yang perlu ditakuti dengan ambisi Tiongkok ini. Bukan karena *Belt and Road Initiative* tidak berbahaya, dengan menyodor-

kan banyak bukti yang sebaliknya, melainkan lantaran tidak ada petunjuk mengenai visi dan strategi yang jelas. Bahkan lembaga-lembaga di Tiongkok sendiri, baik kementerian, bank, atau perusahaan milik negara, tidak setuju tentang banyak hal sebagaimana terlihat dalam kajian lebih dari 100 lembaga pemikir Tiongkok yang mendalaminya.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan, investasi, koordinasi kebijakan, dan bahkan ikatan budaya," tulis Hillman. Tapi itu adalah gagasan yang sangat kabur sehingga proyek yang dimulai jauh sebelum digagas sekarang (pun) membawa label *Belt and Road Initiative*, seperti yang dilakukan di Kutub Utara, dunia maya, dan bahkan luar angkasa.

Kita lihat saja kenyataannya. Bagaimana? ♦



**JUDUL BUKU:**

**The Emperor's New Road: How China's New Silk Road is Remaking**

**The World**

**PENULIS:**

**Jonathan E. Hillman**

**PENERBIT:**

**Yale University Press:**

**New Haven and London**

**TEBAL:**

**304 halaman**

**UKURAN:**

**155 x 27 x 235 mm**

**EDISI:**

**Cetakan Pertama  
(29 September 2020)**

**ISBN:**

**978-0300244588**



ANDA INGIN

**BERLANGGANAN**

3 EDISI (3 BULAN) RP 125.000,- 6 EDISI (6 BULAN) RP 250.000,- 12 EDISI (12 BULAN) RP 500.000,-



(021) 791 96781  
(021) 791 96786



HUBUNGI: PROMOSI/SIRKULASI  
PT. INTER MEDIA DIGITAL

Jalan Raya Kalibata No. 8, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

EMAIL : moeslimchoice@gmail.com

WEBSITE: www.moeslimchoice.com

FACEBOOK : moeslimchoice

TWITTER : @moeslimchoice



## Enam Wabah Penyakit Menular Mematikan DALAM SEJARAH ISLAM

Dunia Internasional telah dihebohkan oleh sebuah wabah yang sangat mengerikan pada penghujung 2019 yang lalu. Wabah tersebut dikenal dengan corona (Covid-19) yang telah memakan korban ribuan nyawa manusia di seluruh dunia. Melihat dari fakta, corona ini termasuk wabah yang sangat mengerikan, karena penyebarannya sangat cepat.

**B**erdasarkan data yang dilansir dari Worldometers.info, bahwa Pandemi virus corona yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan telah menyerang setidaknya 215 negara dan menginfeksi sebanyak 34.534.040 kasus, serta telah menyebabkan sekitar 1.028.540 jiwa meninggal karena virus corona.

Lima Negara yang menjadi korban terparah dari virus ganas tersebut, adalah yang pertama Amerika Serikat. Kini, sekitar 7,5 juta warga AS terinfeksi virus tersebut, dan sekitar 212.694 meninggal dunia. Negara kedua yang mempunyai kasus positif tertinggi adalah India. Negara yang dipimpin Narendra Modi ini memiliki kurang lebih 6.397.896 kasus positif, dan seban-

yak 99 ribu lebih yang meninggal dunia.

Tempat ketiga diduduki oleh Brazil, dengan kasus positif sekitar 4,8 juta jiwa dan angka kematian sebanyak 144.767 kasus. Dan tempat keempat adalah Rusia dengan kasus positif terinfeksi sekitar 1.194.643 kasus, sebanyak 21 ribu lebih telah meninggal dunia. Sementara tempat kelima sebagai Negara dengan kasus tertinggi adalah Kolombia. Kasus positif terinfeksi tercatat sebanyak 835.339 kasus, dengan kasus meninggal sebanyak 26 ribu lebih.

Dan masih belum diketahui, sampai kapan pandemi atau wabah virus corona ini akan berakhir. Namun perlu diketahui, bahwa jauh sebelum kasus ini muncul, telah terdapat juga sebuah wabah yang

dikenal dengan istilah Tho'un.

Lalu apakah Pandemi atau wabah Corona bisa disamakan dengan Tho'un. Melihat definisi para Ulama, wabah Corona ini tidak bisa dikategorikan Tho'un. Tho'un adalah sejenis wabah penyakit yang mematikan, lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah, namun walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan.

Jika dirunut dari sejarah terjadinya, penyakit-penyakit wabah semacam Corona ini atau pun Tho'un, sudah ditemukan sejak masa Nabi Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum Nabi diutus, yaitu pada zaman Bani Isra'il.

Tho'un pernah terjadi pada Ramadhan,

yang jika dianalogikan, peristiwa ini sama halnya dengan wabah Corona yang terjadi pada Ramadhan 1441 H lalu. Bahkan akibat dari pandemi yang belum terhenti, terhitung per 5 Ramadhan atau 28 April 2020 pada penanggalan Masehi, telah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, serta daerah-daerah lain di Indonesia.

Jika dikembalikan pada hadits Rasulullah SAW, bahwa wabah penyakit tidak menjadi alasan adanya sikap panik berlebihan dan mudah berpikir su'udzon terhadap sesama manusia yang beresiko terdikasi Covid 19. Sikap sabar seyogyanya dimiliki ketika menghadapi situasi seperti ini, terlebih dapat memperkuat tawakkal pada Allah SWT.

Hadits Imam Bukhari nomor 5443: "Dari Aisyah istri Nabi SAW, sesungguhnya ia bercerita bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw mengenai penyakit tho'un.

Beliau memberitahukan kepadanya, bahwa sesungguhnya penyakit tersebut merupakan siksaan yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki.

Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setiap hamba yang negerinya sedang dilanda wabah tho'un, namun dia tetap bersabar tinggal di dalamnya saja karena dia merasa yakin akan selamat, maka Allah akan mencatat untuknya seperti pahala orang yang mati secara syahid.

Hadits tersebut menjadi sebuah penghibur hati bahwa sepele apapun situasi, maka kita kembalikan sebagai Rahmat Allah SWT. Manusia berada pada titik mengambil hikmah atas semua yang terjadi. Sebagai contoh, hikmah lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga untuk mendidik anak, karena pangkal bangunan modal sosial adalah dari didikan keluarga.

Mengenai ikhtiar doa yang dilakukan untuk melewati sebuah pandemi, hadits Rasulullah juga menjelaskan doa yang disampaikan Rasulullah pada sahabat Anas tentang doa meminta kesembuhan.

Pada hadis nomor 5451 Imam Bukhari, dijelaskan doa tersebut, yang artinya, Ya Allah Tuhannya manusia, Dzat yang menghilangkan kesengsaraan, sembuhkanlah. Engkau-lah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang kuasa menyembuhkan selain Engkau kesembuhan yang tidak lagi meninggalkan sakit.

Doa dan ikhtiar, tentunya harus kita

yakini sebagai pangkal utama melawan Covid 19. Ikhtiar menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan doa di dalamnya, tentu jauh lebih indah daripada khawatir secara berlebihan terhadap potensi penyebaran Covid 19.

Bagaimanapun situasi bangsa, membentuk kehidupan sosial dengan menjaga solidaritas sesama dan bergotong royong melawan Covid-19, sejatinya itulah ciri khas bangsa Indonesia

### 6 Macam Wabah Paling Berbahaya

Al-Imam Nawawi dalam sarah Muslim menjelaskan panjang lebar tentang wabah Tho'un. Beliau mengulang pembahasan lebih ringkas dalam satu bab khusus tentang wabah Tho'un dalam Kitabnya Al-Adzkar yang meriwayatkan perkataan Abul Hasan Al-Mada'iny.

Ada lima peristiwa wabah Tho'un yang masyhur dan paling besar dalam sejarah

peradaban Islam. Begitu di dalam kitab al-Isya'ah li Asyrot al-Sa'ah yang ditulis oleh al-'Allamah al-Muhaqqiq Muhammad bin Rasul al-Husaini (1040 H- 1103 H) disebutkan, bahwa Tho'un yang paling berbahaya dalam Islam ada lima, yaitu:

#### 1. Tho'un Syirawaih

Sebenarnya di dunia Islam pun tidak hanya sekali ini saja mengalami Pandemi. Tercatat wabah pertama kali dalam sejarah Islam terjadi pada masa kenabian sekitar tahun 627-628 M.

Dikenal dengan nama wabah Shirawaih, karena wabah tersebut terjadi atau dikaitkan dengan bangsa Persia pada saat itu. Dan untuk pertama kalinya di kota Ctesiphon (Irak modern, Mada'in), bahkan Siroe juga banyak yang meninggal karena wabah penyakit.

Wabah ini menjadi salah satu sumber kemunculan riwayat-hadits mengenai wa-



bah pada era kenabian, khususnya saat di Kota Madinah, saat Nabi Muhammad SAW sedang hijrah pada tahun 622 M.

## 2. Tho'un 'Amwas

Awal sejarah Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khatab ra, enam tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, saat itu sekitar tahun 17/18 H atau 638/639 M, terjadi wabah Emaus atau Syria.

Nama wabah tersebut disebabkan oleh kota-kota kuno di Palestina termasuk Syria, disebabkan oleh kutu yang terinfeksi Yersinia pestis yang dibawa oleh binatang kecil seperti serangga.

Dianggap salah satu wabah besar karena saat itu telah menewaskan kurang lebih 25.000 pasukan Muslim yang sedang berhadapan dengan tentara Bizantium, termasuk para sahabat senior antara lain Abu Ubaidah bin Jarrah ra, Muadz bin

lim ke daerah yang lebih sehat dan aman, yaitu kembali ke Madinah.

Sebuah analogi yang mencerminkan bagaimana umat Islam merespons wabah penyakit dan mengubah paradigma terhadap wabah sebelumnya, yang mengarah pada tiga hal yaitu:

Wabah adalah keberkahan dan kesyahidan dari Tuhan serta hukuman untuk orang yang ingkar (kafir), orang Islam tidak boleh meninggalkan dan atau memasuki wilayah yang terpapar wabah

Adanya kepercayaan bahwa penyakit itu tidak ada apalagi menular karena Tuhanlah yang mengirimkan penyakit, agar kita bersikap takawal.

Kemudian setelah Tho'un 'Amwas ini berakhir, tho'un berikutnya terjadi di al-Kufah pada tahun 49 H, dan 4 tahun berikutnya muncul lagi wabah Tho'un pada tahun 53 H.

sebanyak 73 ribu, sedangkan pada hari keempatnya seakan-akan semua manusia itu meninggal, kecuali sedikit saja yang masih hidup.

Al-Hafidz Abu Nu'aim al-Ashfahani, seorang saksi sejarah pada saat itu menerangkan, "Pada awalnya kami mendatangi setiap kabilah-kabilah, jika ada yang meninggal kami tetap menguburkannya, namun ketika sudah banyak sekali yang meninggal, kami pun tak sanggup untuk menguburkan. Sehingga setiap kami memasuki rumah, kami menemukan penghuninya sudah tergeletak di depan pintu."

## 4. Tho'un Fatayat

Kemudian tidak lama setelah itu, pada tahun 87 H, terjadi lagi peristiwa wabah Tho'un yang mana pada saat itu mayoritas yang menjadi korbannya adalah para gadis-gadis, sehingga penyakit tersebut



Jabal ra, Syurahbil bin Hasanah ra, Yazid bin Abi Sufyan radan Harits bin Hisyam bin Al-Mughirah ra.

Yang menarik di sinilah terjadi dialog bersejarah antara Umar dengan Abu Ubaidah dengan latar belakang keinginan Umar untuk menarik pasukannya dari kamp (tenda pasukan) di Amwas untuk menghindari wabah, khususnya para sahabat yang turut serta di dalamnya.

Dalam riwayat lain ucap Umar, "kita berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain". Artinya Umar tidak menggajak melawan kehendak Tuhan, namun berikhtiar menyelamatkan pasukan Mus-

## 3. Tho'un Al-Jarif

Setelah kejadian wabah Tho'un di al-Kufah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, terjadi lagi wabah yang sangat mengerikan di Bashra sekitar tahun 69 H, penyakit yang membahayakan ini dinamakan dengan Tho'un al-Jarif.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa Tho'un ini dinamakan dengan Jarif, karena dia menyapu manusia sebagaimana banjir besar menyapu bersih tanah-tanah. Ibnu Katsir menerangkan, hari pertama masyarakat di Bashra yang meninggal sebanyak 70 ribu, hari keduanya juga meninggal sebanyak 70 ribu, hari ketiga

dinamakan dengan Tho'un al-Fatayat, yang bermakna para pemudi.

Ibnu Abi al-Dunya menerangkan di dalam kitabnya al-I'tibar menerangkan bahwa ada seorang laki-laki Arab bersama 10 orang anak gadisnya datang ke Bashra, hanya berselang beberapa hari saja 10 orang anak gadisnya itu langsung meninggal dunia.

Begitulah gambarannya wabah Tho'un pada saat itu.

## 5. Tho'un Al-Asyraf

Kemudian setelah wabah yang menyerang mayoritas para gadis berakhir,

terjadi lagi Tho'un al-Asyraf. Dinamakan dengan Tho'un al-Asyraf, karena pada peristiwa ini di antara korban yang meninggal, mayoritas adalah orang-orang yang terhormat.

Kemudian wabah terus berlanjut pada tahun 100 H dan dinamai dengan Tho'un 'Ady bin Arthah, berlanjut lagi pada tahun 107 H yang dinamakan Tho'un di Syam. Lalu pada tahun 115 H juga terjadi di Syam.

Kemudian pada tahun 127 H terjadi Tho'un Ghurap, dimana pada masa tersebut umat Islam memang diuji betul keimanan dan kesabarannya dalam menghadapi berbagai Tho'un yang terjadi dari tahun ke tahun berikutnya.

Kemudian pada bulan Rajab tahun 131 H terjadi Tho'un Muslim bin Quthaibah, terus berlanjut ke Sya'ban dan Ramadhan, kemudian wabah ini berkurang pada bu-

pemimpin."

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari segala macam penyakit yang membahayakan.

## 6. Wabah Black Death

Setelah Wabah Tho'un, wabah terparah berikutnya adalah Black Death yang awal penyebarannya berasal dari Eropa, Asia dan Afrika pada abad ke 14 Masehi, hingga memasuki negara-negara Islam melalui kota-kota besar di Timur Tengah pada 1347-1349 M, seperti Makkah, Madinah, Kairo, Kairouan (Tunisia), Damaskus, Mosul, Basrah, Baghdad, Palestina, Konstantinopel dan telah menyebabkan kematian di seluruh dunia saat itu kurang lebih 200 juta jiwa.

Sejarawan Al-Maqrizi melukiskan, penyebaran wabah ini di Kairo pada Ramadhan 749 H/Januari 1349 M, di mana

dari sudut pandang teologi dan sains, Lewat bukunya Muqni'at as-Sa'il 'an Maradh al-Ha'il, dia dianggap ilmuwan pertama yang membedakan antara wabah bubonic dan pneumonic.

Jika wabah penyakit pes atau sampar (bubonic) menyerang kelenjar getah bening sebagai bagian penting sistem kekebalan tubuh yang banyak membantu melawan virus yang dibawa bakteri, wabah pneumonic yang dibawa oleh bakteri yersinia pestis menyerang paru-paru manusia.

Dari sisi sains akan wabah dalam Islam juga dilakukan oleh banyak nama-nama ulama dan ilmuwan antara lain Ali bin al-Abbas Al-Majusi (w. 998 M), Ibnu Sina (w. 1037 M), Ibnu an-Nafis (w. 1288), Ibnu Al Wardi (w. 1349 M), dan Ibnu Abi Hajalah (1362 M), Ibnu Khatimah (w. 1369 M).

Dari sisi teologi dan sejarah Islam, ban-



lan Syawwal. Wabah ini memakan korban sebanyak hampir 1.000 orang perhari.

Semua wabah Tho'un tersebut, kebanyakan terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Sehingga para pemimpin bani Umayyah ketika terjadi wabah Tho'un, mereka pergi mengungsi ke padang pasir.

Kemudian pada masa Bani 'Abbasiah wabah Tho'un mulai berkurang, sehingga sebagian pemimpin-pemimpin Bani Abbasiah pun berpidato di Syam:

"Bersyukurlah kepada Allah yang telah menghilangkan wabah penyakit Tho'un dari kalian, semenjak kami yang menjadi

banyak orang yang tertular dengan tanda awal meludah darah, demam tinggi, mual lalu meninggal, sehingga Masjid ditutup dan ibadah shalat Jum'at ditiadakan.

Sejarawan lain, Al-'Aini, menambahkan, ketika orang lain bertatap muka dengan orang yang terkena virus, maka dalam beberapa langkah, dia langsung meninggal.

Sejarawan Al-Dzahabi mencatat di Cordoba Masjid-masjid ditutup, sedang Ibnu Hajar Al-Asqalani melaporkan di Makkah setiap hari rata-rata sekitar 40 orang meninggal.

Islam menyikapi akan wabah tersebut

yak karya-karya khusus mengenai wabah (tha'un) yang dihasilkan oleh para ulama berkisar ratusan (termasuk dari sisi sains) dan yang terpopuler adalah Badhlu al-Ma'un fi Fadhli at-Tha'un oleh Ibnu Hajar AlAsqalani (w. 1449 M) dan Jalaludin As-Suyuthi (w. 1505 M) seorang ulama multi keahlian (polymath) dalam Ma Rawahul-wa'un fi Akhbar at-Tha'un.

Demikian menandakan bahwa wabah dalam sejarah Islam direspon dengan sangat dinamis oleh para pemeluknya dan menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. ♦mt/berbagaisumber

## BAHAYA MEMUSUHI DAN MENYAKITI ULAMA

**Ulama adalah sosok yang Allah SWT muliakan. Sudah sepantasnya kaum Muslim juga memuliakan ulama. Melindungi dan menjaga mereka. Tidak memperolok-olok apalagi menyakiti mereka.**

**S**ayang, yang terjadi di Tanah Air, untuk kesekian kali terjadi serangan terhadap ulama dan tokoh Islam. Bukan saja diolok-olok. Bahkan nyawa mereka sampai terancam. Sebagian dari mereka ada yang dianiaya di rumah, di masjid, bahkan kini di tempat terbuka di tengah panggung dakwah. Sebagian luka-luka. Sebagian lagi bahkan dianiaya hingga wafat. Keadaan ini menggambarkan bahwa para ulama dan tokoh Islam belum bebas dari ancaman.

### KEMULIAAN ULAMA

Maraknya ancaman terhadap para ulama dan tokoh Islam adalah sebuah ironi. Palsunya, kita hidup di negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Setiap hari kita juga mendengar semakin banyak orang berani mengolok-olok ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pelecehan tersebut terutama ditujukan pada ulama dan tokoh Islam yang giat melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Misalnya, baru-baru ini seorang elit parpol menghina keberadaan MUI dengan menyebut lembaga ulama itu selevel dengan LSM. Bahkan ada kalimat yang bertendensi menyamakan ulama dengan binatang. "Sama seperti LSM urusan hewan, apakah pengurusnya laler dan kecoa? Gak, kan?" tutur politisi tersebut lancang.

Mulut-mulut kotor mereka terhadap para ulama jauh berbeda dengan predikat yang Allah SWT berikan. Ulama dalam timbangan agama adalah sosok yang istimewa.

Pertama, Para ulama dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala beberapa tingkat di atas manusia lain. Seperti firman Allah yang artinya: Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. [QS. al-Mujadilah: 11].

Tidak ada manusia yang diberi kebaikan oleh Allah SWT melainkan para ulama. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alihi Wasallam yang berbunyi: Siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Dia akan menjadikan dirinya faqih dalam agama. [HR. Muttafaq 'alayhi].

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ketinggian derajat para ulama di dunia ini dibandingkan dengan segenap manusia. Sabda beliau: "Permisalan ulama di muka bumi seperti bintang yang ada di langit. Bintang dapat memberi petunjuk kepada orang yang berada di gelap malam, di daratan maupun di lautan. Jika bintang tak muncul, manusia tak mendapatkan petunjuk." [HR. Ahmad].

Kedua: Para ulama disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi

Wasallam sebagai pewaris para nabi. Di tengah umat ini, tak ada satu pun yang layak disebut pewaris para nabi melainkan para ulama. Sabda Rasulullah: "Sungguh ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak." [HR at-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi, Abu Dawud dan Ibnu Majah].

Mengapa di dalam hadis ini disebut kata pewaris? Tidak menggunakan istilah yang lain? Imam al-Munawi mengatakan, "Karena warisan itu berpindah kepada manusia yang paling dekat. Sosok manusia yang paling dekat dengan para nabi dalam urusan agama adalah para ulama yang berpaling dari dunia, menghadap akhirat dan kedudukan mereka terhadap umat adalah sebagai pengganti dari para nabi. Para ulama adalah orang yang memperoleh kebahagiaan dengan dua kebaikan: ilmu dan amal. Mereka pun mendapatkan dua keutamaan: kesempurnaan dan menyempurnakan." [Al-Munawi, Faydh al-Qadir, 4/105].

Ketiga, Demikian besar derajat para ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan memberi mereka kesempatan untuk memberikan syafaat pada Hari Kiamat. Sabda Nabi Shallallahu Alihi Wasallam berbunyi: "Akan memberi syafaat pada Hari Kiamat tiga golongan: para nabi, ulama, lalu para syuhada." [HR. Ibnu Majah].

Keempat, karena keberadaan para ulama pula agama ini terpelihara dan umat akan terjaga dari berbagai kesesatan. Jika para ulama telah tiada, ilmu akan lenyap dan umat pun akan mudah tergelincir dalam kesesatan. Sabda Nabi Shallallahu Alihi Wasallam berbunyi: "Sungguh Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan mencabut ilmu itu dari manusia. Namun, Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama." [HR al-Bukhari].

Demikian vital kehadiran dan peran ulama, kematian mereka adalah musibah berat bagi umat. Berpulanginya mereka tak bisa digantikan dengan mudah, bahkan oleh ribuan ahli ibadah sekalipun.

Dalam mukadimah Kifayah al-Akhyar, dituliskan perkataan Umar bin al-Khaththab ra, "Kematian seribu ahli ibadah yang senantiasa bangun malam untuk shalat dan berpuasa pada siang hari lebih ringan dari kematian satu orang alim yang mengetahui apa yang Allah halalkan dan apa yang Dia haramkan." Inilah derajat agung yang hanya dimiliki para ulama.

### ULAMA SEJATI

Tentu yang dimaksud dengan para Ulama Sejati di sini bukan sekadar orang yang berilmu namun lancang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memutarbalikkan hukum-hukum-Nya dan bersekutu dengan kedzaliman. Ulama bukan semata mereka yang faqih fiddin (paham agama), tetapi pribadi-pribadi yang punya rasa takut paling tinggi kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi: Sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama (QS. Fathir: 28).

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, "Bukanlah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang banyak hapal hadis. Akan tetapi, yang dinamakan orang berilmu adalah orang yang amat besar rasa takutnya (kepada Allah)."

Atas dasar inilah Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah berkomentar tentang ayat di atas, "Hal ini menunjukkan bahwa setiap yang takut kepada Allah, dialah orang alim. Ini adalah haq. Para ulama sejati ini disebut sebagai ulama akhirat.

Di sisi lain ada yang dinamakan ulama dunia. Ibn al-Jauzi dalam Shaid al-Khatir menyebutkan, "Perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah: ulama dunia haus kekuasaan di dalam dunia dan suka mendapatkan harta plus gila pujian. Sebaliknya, ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia." [Ibn al-Jauzi, Shaid al-Khatir].

Ulama yang menjual agama untuk sampah dunia berupa harta dan ketenaran, menjilat kekuasaan serta memutarbalikkan ayat-ayat Allah justru kelak akan didera kehinaan dan siksaan pada Hari Akhir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperingatkan umat akan bahaya sikap condong pada kedzaliman dan para pelakunya

"Dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang kafir yang zalim itu, baik dengan cara berdamai atau berkasih sayang dengan mereka. Karena kecenderungan itu bisa membuat kalian terancam dengan api Neraka. Dan kalian tidak memi-

liki pelindung yang dapat menyelamatkan kalian dari api Neraka selain Allah. Kemudian kalian tidak akan menemukan seseorang yang dapat menolong kalian." [HS Hud [11]: 113].

Imam Sayyid bin al-Musayyib juga mengingatkan dengan keras tentang para ulama yang mendatangi penguasa dengan tujuan menjilat, "Jika engkau melihat seorang alim mengelilingi penguasa, hati-hatilah terhadap dirinya karena dia adalah seorang pencuri."

### **BAHAYA MEMUSUHI ULAMA**

Karena itu para ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, giat amar maruf nahi mungkar, berjuang untuk menegakkan agama-Nya wajib untuk diikuti dan pantang untuk dimusuhi apalagi dikriminalisasi. Dalam hadis qudsi Allah SWT menyatakan perang terhadap mereka yang mengganggu para wali-Nya: "Siapa saja yang memusuhi wali-Ku, sungguh Aku telah mengumumkan perang kepada dirinya." (HR al-Bukhari).

Hadis ini menjelaskan betapa kerasnya pembelaan Allah SWT kepada para wali-Nya. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang alim yang selalu taat dan ikhlas dalam beribadah. Imam Syafii menjelaskan, jika para ulama itu bukan wali-wali Allah, tentu tidak ada wali-Nya di muka bumi ini.

Tentang larangan menghina dan menyakiti ulama, Ikrimah, seorang tabi'in, berkata, "Janganlah kamu menyakiti se-

orang ulama. Siapa saja yang menyakiti ulama berarti dia telah menyakiti Rasulullah. Sebabnya, ulama berkedudukan sebagai pewaris ilmu para nabi untuk disampaikan kepada umat hingga Hari Kiamat nanti."

Al-Hafizh Ibnu Asakir, dalam kitab Tabyin Kadzib al-Muftari, juga mengingatkan bahwa daging ulama itu 'beracun'. Siapa saja yang menghina, memfitnah, apalagi menyakiti para ulama akan mendapat balasan keras dari Allah SWT. Kata Ibnu Asakir, "Tidaklah saya tahu seseorang yang menghina ulama kecuali akan mati dalam keadaan su'ul khatimah karena sungguh daging ulama itu 'beracun'."

Begitu keras ancaman Allah SWT dan Rasul-Nya terhadap orang-orang yang memfitnah, memusuhi termasuk mengkriminalisasi para ulama dan pejuang Islam. Apalagi jika tindakan mereka disertai dengan pelecehan dan penistaan terhadap ajaran Islam seperti menangkap mereka yang mendakwahkan seruan penegakan syariah dan Khilafah Islam, bahkan menyamakan ajaran kekhilafahan dengan ajaran komunis.

Alhasil, sudah sepatutnya kaum Muslim bersatu membela para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang mukhlis dan tegar menegakkan kalimatullah. Umat wajib melindungi dan membela mereka. Tidak memandang ormas atau kelompok manapun. Selama ia istiqamah dan ikhlas memperjuangkan agama Allah, sudah menjadi tanggung jawab umat untuk membela dan melindungi mereka. ♦ B. Kaffah



## MUSA VS MUSA

**D**i zaman Fir'aun atau Ramses II, ada dua nama orang yang sama, dan keduanya sama-sama terkenal dengan nama Musa. Yang satu adalah Nabi Musa yang satu lagi adalah Musa Samiri.

Uniknya, Nabi Musa AS itu sejak kecil diadopsi anak oleh Fir'aun. Kita tahu sendiri bahwa Fir'aun ini orang kafir yang mengaku sebagai tuhan.

Sedangkan yang satu lagi adalah Musa Samiri. Siapa Musa Samiri?

Yaitu seorang anak kecil yang saat itu sebagaimana nasib bayi-bayi lelaki lainnya, yang diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh.

Samiri membuat patung itu dengan metode tertentu, seperti diberi lobang, diberi benang, atau diberi suatu alat yang bila mana ada angin masuk ke situ maka dapat berbunyi.

Kalau di Jawa Timur ada yang namanya Layangan Sowangan atau layang-layang Sowang yaitu layang-layang yang besar, kemudian diberi tali sedemikian rupa, lantas dinaikkan ke udara sehingga terdengar suara yang kencang dari bawah, kira-kira sapi bikinan Musa Samiri ya seperti itu.

Jadi Musa Samiri orangnya cerdas, tapi masalahnya justru ia mengajak Bani Israel kepada kekafiran, yaitu menyembah berhala sapi, dan tidak menyembah Allah.

Aneh, Musa Samiri yang mulai kecil dipelihara oleh Malaikat



Maka Musa Samiri ini oleh orang tuanya disembunyikan di suatu gua, tapi Allah SWT menghendaki bahwa Musa Samiri ini dipelihara oleh Malaikat Jibril.

Nah, dalam permasalahan yang akan dibahas adalah, anehnya Nabi Musa AS yang dipelihara mulai kecil sampai besar oleh Fir'aun yang kafir bahkan mengaku sebagai Tuhan itu, justru menjadi orang yang shaleh bahkan diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, itulah Nabi Musa AS.

Sedangkan yang aneh lagi, namanya Musa Samiri ini justru saat dewasa menjadi orang kafir, bahkan dialah yang memprakarsai pembuatan patung anak sapi.

Tatkala Nabi Musa AS munajat kepada Allah, yang Allah SWT saat itu berbicara langsung kepada Nabi Musa. "Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan benar-benar firman yang didengarkan."

Tapi, di saat itu pula si Musa Samiri ini justru mengajak orang-orang Bani Israel, untuk membuat patung dari emas untuk disembah.

Patung tersebut di dalam riwayat dikatakan bisa bergerak, tapi menurut pendapat yang lain dikatakan, caranya Musa

Jibril justru menjadi kafir.

Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa seseorang itu pertama untuk menjadi baik adalah membutuhkan hidayah dari Allah SWT.

Kedua, lingkungan dan pergaulan itu sangatlah penting. Menurut suatu riwayat, memang Nabi Musa, lingkungan beliau mulai kecil sampai menginjak dewasa ini, lingkungan tidak baik karena ada Fir'aun.

Tapi tatkala sudah dewasa maka Nabi Musa berinteraksi dengan orang-orang yang baik.

Beda dengan Musa Samiri, Musa Samiri ini tatkala mulai remaja atau tumbuh dewasa justru berinteraksi dengan orang-orang yang jahat.

Maka orang yang bergaul dengan orang baik, akan menjadi baik, dan orang yang bergaul dengan orang jahat juga akan menjadi jahat pula.

Itulah makna di dalam hikayat tentang dua nama Musa yaitu Nabi Musa AS yang dirahmati oleh Allah, dan Musa Samiri yang dilaknat oleh Allah SWT. ♦



IKLAN 1 HALAMAN FC  
Rp. 50.000.000



IKLAN BACK COVER FC  
Rp. 75.000.000



IKLAN 1/2 HALAMAN FC  
Rp. 25.000.000

## Media Yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

# MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 ALAMAN  
UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN 1/2 CENTERSPREAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 X 124 MMK)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 X 124 MMK (HORIZONTAL), 90 X 250 MMK (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL (FC) 1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN CENTERSPREAD (FC) DILUAR EDISI KHUSUS, 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN DISPLAY (FC) 1 HALAMAN 210 X 297MMK
- IKLAN HALAMAN 13, 15, 17 (FC)  
1 HALAMAN UKURAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN 210 X 297 MMK

### MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE:

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai Dengan Topik Bahasan.
- Pilihan Halaman Iklan Yang Mudah Disimak Pembaca
- Harga Iklan Yang Bertabur Diskon Untuk Para Pelanggan



IKLAN CENTER SPREAD FC Rp. 80.000.000

- Contact Person : ZULFAHMI JAMBA

▶ 021 - 79196781

▶ 081380196507

▶ Email : moeslimchoice@gmail.com



# MOESLIM CHOICE



**PROGRAM  
WISATA COVID  
SULSEL  
DIAPRESIASI WHO**